

Menebar Manfaat untuk Kemaslahatan Umat

SPREADING GOODNESS FOR THE BENEFIT OF THE UMMAH



2023

LAPORAN KEMASLAHATAN
Kemaslahatan Report



Tentang Tema

About Theme

Menebar Manfaat untuk Kemaslahatan Umat

Spreading Goodness for the Benefit of the Ummah

Pada tahun 2023, BPKH telah memperluas cakupan programnya secara signifikan. Menyadari kebutuhan mendesak untuk penanggulangan bencana, BPKH telah menginisiasi program-program khusus untuk memberikan bantuan cepat dan dukungan kepada daerah-daerah yang terkena bencana, serta memastikan pemulihan bagi para korban. Selain itu, BPKH juga telah meluncurkan inisiatif perlindungan lingkungan sebagai upaya mempromosikan praktik berkelanjutan di dalam masyarakat.

BPKH telah mendirikan entitas anak yaitu BPKH Limited untuk mendukung dan memaksimalkan nilai manfaat serta memperkuat kapasitasnya dalam melayani umat, dengan cara mengelola dan menginvestasikan dana haji secara syariah. Dalam upayanya untuk mendorong kolaborasi dan memperkuat manfaat yang disalurkan, BPKH juga secara aktif meningkatkan kualitas kemitraan dengan Mitra Kemaslahatan. Melalui program peningkatan kapasitas, BPKH tidak hanya membantu mitra kemaslahatan untuk tumbuh, tetapi juga memastikan mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.

By 2023, BPKH has significantly expanded the scope of its programs. As we recognize that disaster management is urgently needed, BPKH has initiated programs specialized to provide quick relief and support to disaster-affected areas, as well as ensure recovery for the victims. BPKH has also launched environmental protection initiatives in an effort to promote sustainable practices within the community.

BPKH Limited, a subsidiary of BPKH, was established for managing and investing Hajj funds in a sharia manner to support and maximize the return value and strengthen its capacity to serve the ummah. BPKH also actively improves the quality of partnerships with Benefit Partners as efforts to foster collaboration and strengthen the benefit that's being channeled. BPKH' capacity building programs not only help benefit partners to grow, but also ensure they can give maximum contribution in providing benefits to society.





Menebar Manfaat untuk Kemaslahatan Umat

SPREADING GOODNESS FOR THE BENEFIT OF THE UMMAH





Daftar Isi

Table of Content



2	Tentang Tema
	About the Theme
4	Daftar Isi
	Table of Content
6	Ikhtisar Penting Kemaslahatan
	Key Highlights of the Benefit Program
8	Sambutan Kepala Badan Pelaksana BPKH
	Message from the Head of BPKH Executive Board
12	Sambutan Anggota Bidang Kemaslahatan, SDM, Pengadaan, dan Umum
	Message from by Members of the Benefit Program, Human Resources, Procurement, and General Affairs Division
18	Penghargaan Tahun 2023
	Awards in 2023
20	Peristiwa Penting Tahun 2023
	Key Events in 2023



PROFIL BPKH PROFILE OF BPKH

24	Sekilas BPKH
	BPKH At a Glance
26	Visi, Misi dan Nilai BPKH
	BPKH's Vision, Mission and Values
27	Divisi Kemaslahatan BPKH
	BPKH Benefit Division
29	Distribusi Dana Abadi Umat (DAU)
	Ummah Trust Fund (DAU) Distribution
31	Mitra Kemaslahatan
	Benefit Program Partners
34	Mekanisme Penyaluran Nilai Manfaat
	Mechanism of Return Value Distribution



RANTAI KEMASLAHATAN UMAT THE CHAIN OF UMMAH'S BENEFIT PROGRAM

38	Program Kemaslahatan
	The Benefit Program
42	Penyaluran Nilai Manfaat
	Distribution of Return Value
45	Mengabdikan kepada Umat, Menyebarkan Keberkahan
	Serving the Ummah, Spreading Blessings
48	Sinergi Kemaslahatan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	Synergy of Benefit Program and Sustainable Development Goals



- 79 Tanggapan Bencana**
Disaster Relief
- 82 Dampak Ekonomi Tidak Langsung Program Kemaslahatan**
Indirect Economic Impact of Benefit Program
- 84 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi**
Monitoring and Evaluation Activities



INSAN BPKH BPKH'S PEOPLE

- 98 Ketenagakerjaan**
Employment
- 107 Anti Diskriminasi**
Anti-discrimination
- 108 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**
Occupational Health and Safety (OHS)

- 135 Pelibatan Pemangku Kepentingan**
Stakeholder Engagement
- 137 Tantangan Penerapan Aspek Keberlanjutan**
Challenges in Sustainability Aspects Implementation



TENTANG LAPORAN KEMASLAHATAN BPKH ABOUT BPKH KEMASLAHATAN REPORT

- 140 Profil Laporan**
Report Profile
- 142 Topik Material**
Material Topics
- 146 Keanggotaan Asosiasi**
Association Membership
- 146 Perubahan Signifikan**
Significant Changes
- 147 Lampiran**
Appendix
- 148 Indeks GRI**
GRI Index
- 154 Indeks POJK-51/2017**
POJK-51/2017 Index
- 157 Lembar Umpan Balik**
Feedback Form



INISIATIF HIJAU BPKH BPKH' GREEN INITIATIVE

- 88 Komitmen Operasional Ramah Lingkungan**
Commitment to Environmentally Friendly Operations
- 92 Aksi Bagi Lingkungan dan Masyarakat**
Actions for the Environment and Society



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH MANAGING BPKH' SUSTAINABILITY

- 112 Tata Kelola BPKH**
BPKH Governance
- 115 Organ Tata Kelola Bidang Kemaslahatan**
Governance Organs of the Benefit Program Division
- 123 Nilai dan Integritas**
Value and Integrity
- 131 Pengelolaan Risiko**
Risk Management



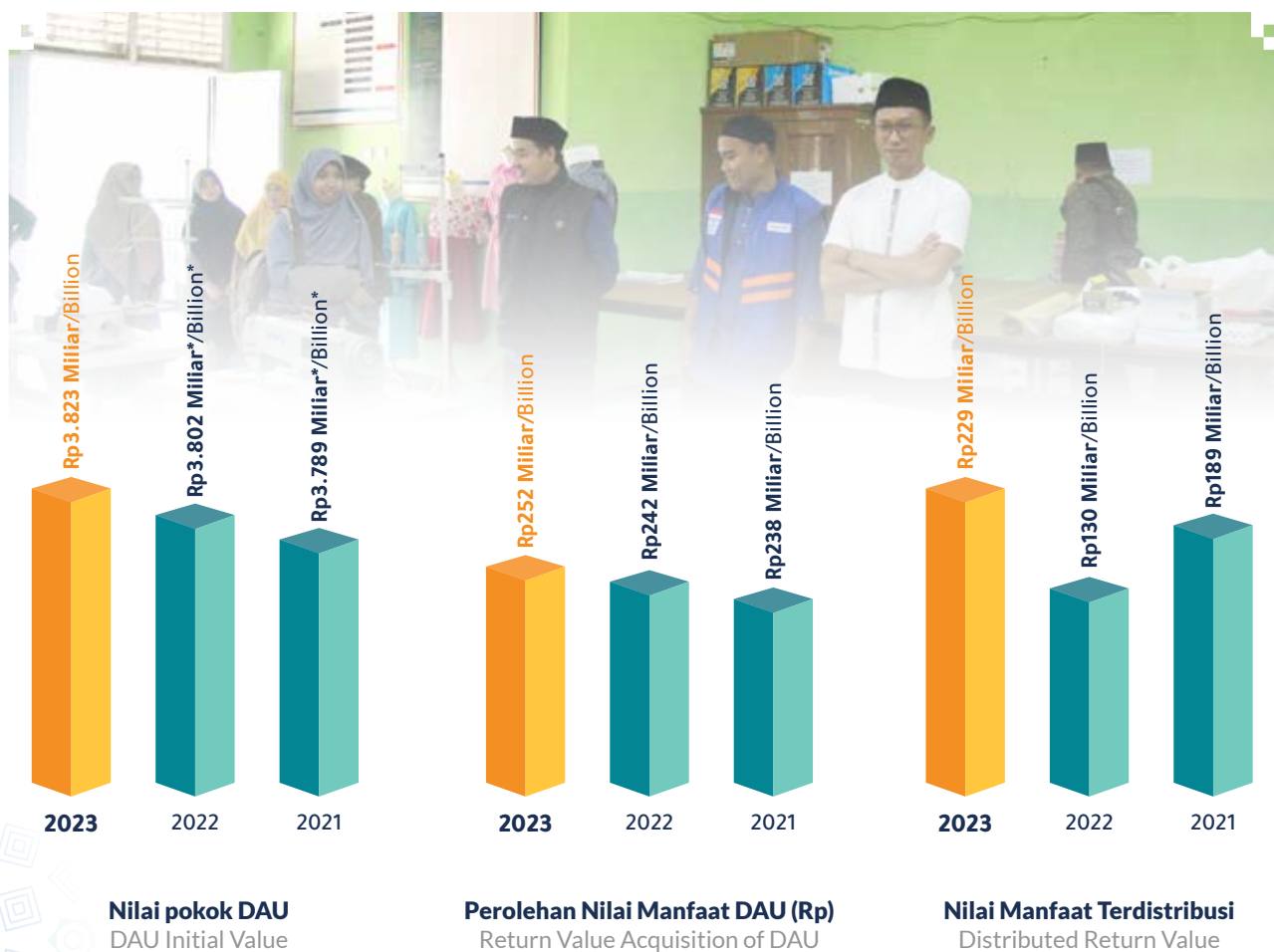
Ikhtisar Penting Kemaslahatan

Key Highlights of the Benefit Program

ASPEK EKONOMI [SEOJK B.1]

ECONOMIC ASPECTS [SEOJK B.1]

Total Proposal yang diterima
Total Received Proposals



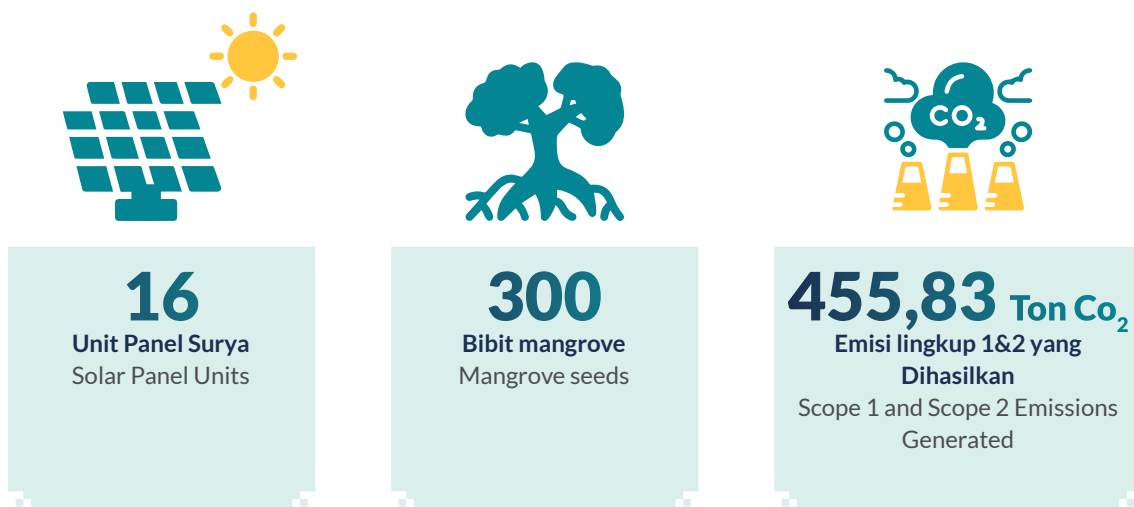
ASPEK SOSIAL [SEOJK B.3]

SOCIAL ASPECTS [SEOJK B.3]



ASPEK LINGKUNGAN [SEOJK B.2]

ENVIRONMENTAL ASPECTS [SEOJK B.2]





Sambutan Kepala Badan Pelaksana BPKH

Message from the Head of BPKH Executive Board

Fadlul Imansyah,
S.E., M.M., CIFP., AAK
Kepala Badan Pelaksana BPKH
Head of BPKH Executive Board



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Q.S. al-Anfal ayat 27)

Sambutan Kepala Badan Pelaksana BPKH

Message from the Head of BPKH Executive Board

[GRI 2-22]

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat kembali menghadirkan Laporan Kemaslahatan BPKH tahun 2023. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada tahun 2023, BPKH menunjukkan komitmen dalam merespon berbagai tantangan untuk pemenuhan strategi keberlanjutan. Salah satu langkah nyata adalah dengan menambah satu ruang lingkup kegiatan Kemaslahatan, yaitu Tanggap Bencana. Hal ini merupakan wujud kepedulian BPKH terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.

BPKH juga terus memperkuat tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan haji. Digitalisasi proses bisnis, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta penerapan mitigasi risiko menjadi fokus utama BPKH. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan dana haji yang aman, efektif, dan akuntabel.

BPKH juga mendirikan entitas anak bernama BPKH Limited. BPKH berharap entitas anak ini dapat mengelola dana haji dengan berkelanjutan dan menghasilkan manfaat tak terbatas bagi jemaah haji dan umat Islam. BPKH Limited tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek ESG dalam setiap investasinya.

Pada tahun 2023, BPKH berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-5 kalinya secara berturut-turut. Pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen BPKH dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Dear Respected stakeholders,

All praise and gratitude to Allah SWT for His abundance of blessing and grace that enable us to once again present the BPKH Kemaslahatan Report for 2023. Shalawat and greetings always poured out to our savior Prophet Muhammad SAW, along with his family, friends, and followers until the end of time.

In 2023, BPKH showed its commitment in addressing various challenges to achieve its sustainability strategy. One concrete step is to add one scope of Benefit Program activities, Disaster Relief. This is a form of BPKH's concern for our brothers and sisters who have been affected by natural disasters throughout Indonesia.

BPKH also continues to strengthen good governance in the Hajj fund management by mainly focusing in digitalizing business processes, increasing accountability and transparency, and implementing risk mitigation. These steps are taken to ensure safe, effective, and accountable Hajj fund management.

BPKH established a subsidiary called BPKH Limited. BPKH expects that this subsidiary can manage Hajj funds sustainably and provide unlimited benefits for hajj pilgrims and Muslims. Aside from financial returns, BPKH Limited also focuses on ESG aspects in each of its investments.

In 2023, BPKH successfully achieved an Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board (BPK) for the 5th time in a row. This achievement clearly highlights BPKH's commitment to transparent, accountable, and free from irregularities financial management.



Sambutan Kepala Badan Pelaksana BPKH

Message from the Head of BPKH Executive Board

BPKH tidak hanya bercita-cita untuk mencapai target kemaslahatan, tetapi juga berkomitmen untuk mewujudkannya melalui strategi yang terukur dan terarah. Salah satu strategi utama kami adalah meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk mitra kemaslahatan. Kami percaya bahwa kolaborasi dan kerjasama adalah kunci untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Selain upaya peningkatan sinergi, kami juga berfokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Mitra Kemaslahatan, yang diwujudkan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Salah satu contoh nyata adalah keberhasilan BPKH dalam mendampingi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummul Quro (LAZUQ) yang resmi ditetapkan menjadi LAZ tingkat provinsi.

Komitmen BPKH terhadap lingkungan hidup sejalan dengan program *Net-Zero Emission* pemerintah. BPKH yakin bahwa dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Hal ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti: mengurangi jejak lingkungan, melakukan kegiatan penanaman bakau, serta memberikan bantuan panel surya bagi masjid dan musala.

Saya selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH, menyampaikan apresiasi atas pencapaian kinerja Program Kemaslahatan pada tahun 2023. Saya berharap, kemaslahatan yang disebarkan pada tahun-tahun mendatang akan semakin luas dan BPKH berhasil menjadi Lembaga Kemaslahatan bereputasi internasional.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, partisipasi, dukungan, dan kerjasama seluruh Insan BPKH, Mitra Kemaslahatan, masyarakat, dan berbagai pihak yang berperan dalam keberhasilan penyelenggaraan Program Kemaslahatan pada tahun 2023. Semoga ikhtiar bersama memajukan umat dan bangsa senantiasa mendapat ridho Allah SWT.

BPKH not only aspires to achieve the benefit program target, but is also committed to realizing it through measurable and targeted strategies. One of our main strategies is to increase synergy with various parties, including benefit program partners. As we believe that collaboration and cooperation are the keys to achieving greater goals.

In addition to efforts to improve synergy, we also focus on developing the capacity of human resources (HR) of Benefit Program Partners through various training and development programs. One concrete example is BPKH's success in assisting Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummul Quro (LAZUQ) in becoming officially designated provincial-level LAZ.

BPKH's commitment to the environment is in line with the government's *Net-Zero Emission* program. BPKH believes that by preserving the environment, we can create a brighter future for future generations. Which is accomplished through various activities: reducing the environmental footprint, conducting mangrove planting activities, and providing solar panel assistance for mosques and musallahs.

As the Head of the BPKH Executive Board, I would like to express my appreciation for the achievement of the Benefit Program performance in 2023. I hope in the coming years, the benefits will be spread even wider and BPKH will succeed in becoming an internationally reputable benefit institution.

Finally, I would like to thank all BPKH's People, Benefit Program Partners, the community, and various parties for their dedication, participation, support, and collaboration that eventually led to the Benefit Program's successful implementation in 2023. May Allah SWT continue to bless our efforts to empower the ummah and nation.

Kepala Badan Pelaksana BPKH
Head of BPKH Executive Board

Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CFP., AAK





Sambutan Anggota Bidang Kemaslahatan, SDM, Pengadaan, dan Umum

Message from by Members of the Benefit Program, Human Resources, Procurement, and General Affairs Division

Ibu Sulistyowati

Anggota Bidang Kemaslahatan, SDM, Pengadaan, dan Umum
Members of the Benefit Program, Human Resources, Procurement, and General Affairs Division



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Q.S. al-Anfal ayat 27)

Sambutan Anggota Bidang Kemaslahatan, SDM, Pengadaan, dan Umum

Message from by Members of the Benefit Program, Human Resources, Procurement, and General Affairs Division

Para Pemangku Kepentingan yang dimuliakan Allah,

Alhamdulillah, berkat kerja keras dan sinergi semua pihak, Program Kemaslahatan BPKH di tahun 2023 menorehkan berbagai pencapaian yang membanggakan. Pelaksanaan Program Kemaslahatan telah mencapai 37 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Nilai manfaat DAU yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar Rp98.262.755.025 dengan total penerima manfaat mencapai 1.220.533 Jiwa. Selama periode pelaporan, Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan telah menerima 1.300 proposal dimana jumlah proposal yang disetujui mengalami peningkatan sebesar 9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebanyak 8.000 jemaah haji untuk Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, kami melaksanakan beberapa program seperti penyediaan 6 unit kendaraan operasional; Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT); hingga penyediaan 50% kebutuhan souvenir ibadah yang disalurkan melalui bank syariah.

Dalam asnaf Pendidikan dan Dakwah, Bidang Kemaslahatan berhasil menyelenggarakan 61 inisiatif pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia. BPKH juga melanjutkan program inisiatif beasiswa untuk mendukung 663 orang mahasiswa berprestasi namun kurang mampu.

Dear Stakeholders who are blessed by Allah,

Alhamdulillah, thanks to the hard work and synergy of all parties, the BPKH Benefit Program in 2023 successfully achieved various milestones. The Benefit Program has been implemented in 37 provinces out of a total of 38 Indonesian provinces. The distributed return value of the DAU has also grown by Rp98.262.755.025 with a total of 1.220.533 beneficiaries. During the reporting period, the Corporate Secretary and Benefit Program Division received 1.300 proposals, with a 9% increase in approved proposals over the previous year.

The Kingdom of Saudi Arabia allocated an additional 8,000 pilgrims quota to Indonesia in 2023. To support this, we implemented several programs, including the provision of 6 units of operational vehicles; the construction of an Integrated Hajj and Umrah Service Center (PLHUT); and the provision of 50% of worship souvenirs needs, were distributed through Islamic banks.

In the Education and Da'wah asnaf, the Benefit Program Division successfully organized 61 initiatives to build educational facilities and infrastructure in various Indonesian regions. BPKH also continued the scholarship initiative program, which helps 663 people outstanding but underprivileged students.



Sambutan Anggota Bidang Kemaslahatan, SDM, Pengadaan, dan Umum

Message from by Members of the Benefit Program, Human Resources, Procurement, and General Affairs Division

Dalam ruang lingkup Kesehatan, BPKH berfokus pada pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, serta peningkatan kualitas peralatan medis. BPKH telah memberikan sumbangan 20 unit mobil ambulans, bantuan alat kesehatan untuk ruang operasi, mendukung pembangunan klinik gratis, serta pelaksanaan operasi katarak massal gratis.

Pada ruang lingkup sosial keagamaan, BPKH telah menyalurkan sebanyak 1.031 ekor sapi dan 808 ekor kambing/domba ke seluruh Indonesia. BPKH juga telah menyalurkan 6.000 mushaf Al-Qur'an, 1.500 peralatan shalat, 1.500 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan, menyelenggarakan program khitanan massal gratis untuk 1.200 anak, serta pelaksanaan Program "Balik Kerja Bareng BPKH 2023" yang diikuti 2.650 orang peserta.

Sepanjang tahun pelaporan, BPKH telah menyalurkan nilai manfaat sebesar Rp23.170.881.067 untuk membantu ekonomi umat. Bantuan-bantuan ini berhasil dinikmati oleh 8.725 orang penerima manfaat di berbagai daerah. Selain itu, BPKH juga menyalurkan nilai manfaat sebesar Rp23.359.355.600 untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat fungsi sosial masjid dan musala sebagai pusat kegiatan umat.

Kegiatan Kemaslahatan dalam bidang tanggap bencana telah dilaksanakan pada empat wilayah terdampak yaitu gempa bumi di Kota Jayapura, banjir dan tanah longsor di Kabupaten Natuna, kebakaran dan kekeringan di Kabupaten Bandung Barat, serta Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. BPKH menyalurkan bantuan pokok dan prioritas berupa 3.250 paket makanan siap saji, 950 paket sembako, 350 selimut, air mineral, dan hygiene kits, 3.000 paket suplemen gizi, 2.350 kotak masker medis, serta penyediaan akomodasi bagi tim relawan.

In the scope of Health, BPKH focuses on the procurement of adequate medical facilities and infrastructure, as well as improving the quality of medical equipment. BPKH donated 20 units of ambulance, medical equipment assistance for the operating room, supported the construction of a free clinic, and free mass cataract surgery implementation.

In the scope of socio-religion matters, BPKH distributed 1,031 cows and 808 goats/sheep throughout Indonesia. BPKH has also distributed 6,000 Al-Qur'an copies, 1,500 prayer kits, and 1,500 basic food packages for those in need, organized a free mass circumcision program for 1,200 children, as well as the implementation of "Balik Kerja Bareng BPKH 2023" Program which was attended by 2,650 participants.

Throughout the reporting year, BPKH has channeled Rp23.170.881.067 of return value to help the ummah's economy. This assistance is delivered by 8,725 beneficiaries from various regions benefited from these programs. In addition, BPKH also distributed benefits amounting to Rp 23,359,355,600 to improve the quality of worship and strengthen the social function of mosques and prayer rooms as centers of community activities.

Benefit Program activities in the field of disaster relief have been carried out in three affected areas: earthquake in Jayapura City, flood and landslide in Natuna Regency, fire and drought disaster in West Bandung Regency, and the eruption of Mount Marapi in West Sumatra. BPKH distributed basic and priority assistance such as 3,250 ready-to-eat food packages, 950 basic food packages, 350 blankets, mineral water, hygiene kits, 3,000 packages of nutritional supplements, 2,350 boxes of medical masks, and accommodation for the volunteers.

BPKH mengambil langkah nyata dengan menjalankan program-program terkait aksi iklim. Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. BPKH telah memberikan kesempatan akses energi bersih kepada masjid dan musala melalui bantuan panel surya, serta melakukan penanaman 300 bibit mangrove pada peringatan hari jadi BPKH ke-6. BPKH juga mengadakan program bantuan sumur bor untuk menyediakan sumber air bersih dengan perkiraan total dukungan air bersih sebesar 13.000 liter.

Selain itu, BPKH juga terus melakukan berbagai upaya untuk menciptakan kantor yang minim jejak lingkungan. Hal ini dilakukan dengan penghematan air, pengelolaan sampah, transformasi digital untuk mengurangi penggunaan kertas, penerapan *co-working* dan *open space* pada area kantor untuk mengurangi konsumsi energi, serta berbagai upaya lainnya. Melalui upaya-upaya tersebut, BPKH berhasil menurunkan penggunaan emisi sebesar 1.149,79 ton CO².

PENGELOLAAN MITRA KEMASLAHATAN

Total Mitra Kemaslahatan BPKH keseluruhan berjumlah 18 mitra, namun hanya 12 Mitra Kemaslahatan yang turut aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan kemaslahatan kepada penerima manfaat. Sepanjang periode pelaporan, Mitra Kemaslahatan BPKH telah merealisasikan 380 program, dengan 330 program yang berhasil diselesaikan pada akhir periode 2023. Kami menyadari tentunya terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, namun dengan sinergi dan kolaborasi dengan Mitra Kemaslahatan dapat menjadi langkah strategis dan efektif dalam menyalurkan nilai manfaat DAU untuk meningkatkan kemaslahatan umat Islam.

BPKH takes concrete steps to address it by implementing climate action programs. This program aims to reduce greenhouse gases emission and increase community resilience to the impacts of climate change. BPKH has provided clean energy access opportunities for mosques and musallah through the assistance of solar panels, and planted 300 mangrove seeds on its 6th anniversary. BPKH also established a borewell assistance program to provide clean water sources with an estimated total clean water support of 13,000 liters.

Additionally, BPKH also continues to make various efforts to create an office with a minimal environmental footprint, which is done by saving water, waste management, digital transformation to reduce paper usage, implementing co-working and open space in office areas to reduce energy consumption, and various other efforts. Through these efforts, BPKH successfully reduced emissions by 1,149.79 tons of CO².

BENEFIT PROGRAM PARTNER MANAGEMENT

BPKH has a total of 18 Benefit Program Partners, but only 12 of them are actively involved in the process of implementing benefit program activities to beneficiaries. Throughout the reporting period, BPKH's Benefit Program Partners have organized 380 programs, 330 of which were successfully completed by the end of 2023. Although we know there are certainly shortcomings in program implementation, synergy and collaboration with Benefit Program Partners can surely be a strategic and effective step in distributing the return value of DAU to improve the welfare of Muslims.



Sambutan Anggota Bidang Kemaslahatan, SDM, Pengadaan, dan Umum

Message from by Members of the Benefit Program, Human Resources, Procurement, and General Affairs Division

PENERAPAN SDGS

Melalui implementasi ketujuh ruang lingkup kegiatan Kemaslahatan, BPKH berhasil meningkatkan dukungan terhadap SDGs dan memberikan dampak positif yang signifikan. Pada tahun 2023, Program Kemaslahatan BPKH berkontribusi pada pencapaian 14 dari 17 tujuan SDGs.

PENUTUP

Pencapaian yang telah diraih BPKH di tahun 2023 merupakan hasil kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Insan BPKH, Mitra Kemaslahatan, masyarakat, dan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan Program Kemaslahatan.

Meskipun telah mencapai berbagai pencapaian, kami menyadari bahwa masih banyak tantangan yang perlu dihadapi. BPKH berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam *Roadmap* Program Kemaslahatan 2021-2025.

BPKH yakin bahwa dengan sinergi dan kerjasama semua pihak, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih gemilang bagi umat Islam di Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun BPKH yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, dan terus berkontribusi untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia.

SDGS IMPLEMENTATION

BPKH has succeeded in increasing support for the SDGs by implementing the seven scopes of Benefit Program activities, resulting in a significant positive impact. In 2023, BPKH's Benefit Program contributed to the achievement of 14 of the 17 SDGs goals.

CLOSING

BPKH's achievements in 2023 are the result of hard work and synergy from various parties. We would like to extend our gratitude to all BPKH's People, Benefit Program Partners, the community, and various parties who have contributed to the Benefit Program's success.

Although we have achieved various achievements, we realize that there are still many challenges that need to be faced. BPKH is committed to continuously improving performance and achieving the set targets in the 2021-2025 Benefit Program Roadmap.

BPKH believes that with the synergy and collaboration of all parties, we can achieve a brighter future for Indonesian Muslims. Let's work together to build a more professional, transparent, and accountable BPKH that will continue to contribute to the welfare of Muslims in Indonesia.

Anggota Bidang Kemaslahatan, SDM, Pengadaan, dan Umum
Members of the Benefit Program, Human Resources, Procurement, and
General Affairs Division

Dr. (C) Sulistyowati, ME, WMI, CFP





Penghargaan Tahun 2023

Awards in 2023



SILVER TROPHY PADA PENGHARGAAN ASIA SUSTAINABILITY REPORT RATING (ASRRAT) 2023

Silver Trophy at the Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2023 award

National Center for Corporate Reporting (NCCR)



KATEGORI "COMMENDATION 1ST YEAR" PADA PENGHARGAAN ASIA SUSTAINABILITY REPORT RATING (ASRRAT) 2023

"Commendation 1st year" Category at the Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2023 Award

National Center for Corporate Reporting (NCCR)



BAZNAS AWARD 2023 SEBAGAI LEMBAGA PENDUKUNG EKOSISTEM ZAKAT SEJAHTERAKAN UMMAT

Baznas Award 2023 as an Institution Supporting the Zakat Ecosystem for the Prosperity of Ummah

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)



PENGHARGAAN KATEGORI MITRA KOLABORASI KEBAIKAN PADA ACARA PUBLIC EXPOSE 2023

Award for Good Collaboration Partner Category at Public Expose 2023

Rumah Zakat



PENGHARGAAN SEBAGAI “LEMBAGA PENGGERAKAN EKONOMI SYARIAH” DALAM ACARA ANUGERAH SYARIAH REPUBLIKA (ASR) 2023

Award for the “Sharia Economic Driving Institution” Category at the Anugerah Syariah Republika (ASR) 2023

Republika



PENGHARGAAN KATEGORI “OWNED MEDIA” DAN “SILVER WINNER” PADA AJANG PUBLIC RELATION INDONESIA AWARD (PRIA) 2023

Award for the “Owned Media” and “Silver Winner” Category at the Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2023

PR Indonesia



GOLD WINNER DALAM GELARAN ANUGERAH HUMAS INDONESIA (AHI) 2023

Gold Winner in the Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2023 event

Humas Indonesia



SILVER PLAY BUTTON

YouTube



Peristiwa Penting Tahun 2023

Key Events in 2023



1

1 2018

BPKH resmi melakukan Peluncuran Program Kemaslahatan untuk menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU)

BPKH officially launched the Benefit Program to distribute the return value of Ummah Trust Fund



3



2

3 2020

Dukungan Program Kemaslahatan terhadap pandemi COVID-19 mencapai Rp44,259 miliar atau setara dengan 28% dari keseluruhan dana Program Kemaslahatan

The Social Responsibility Program's support for the COVID-19 pandemic reached IDR 44.259 billion or equivalent to 28% of the total Social Responsibility Program funds.

2 2019

- Program Kemaslahatan mulai ikut berkontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
- Peletakan batu pertama Kampung BPKH di Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah
- The Benefit Program started its contribution to help improve the quality of services for Indonesian Hajj pilgrims in Saudi Arabia.
- Groundbreaking of BPKH Village in Sigi and Donggala, Central Sulawesi

4 2021

Kegiatan Program Kemaslahatan berhasil menjangkau 34 Provinsi di Indonesia hingga daerah 3T

The Benefit Program activities successfully reached 34 provinces in Indonesia to even reach 3T areas



4



6



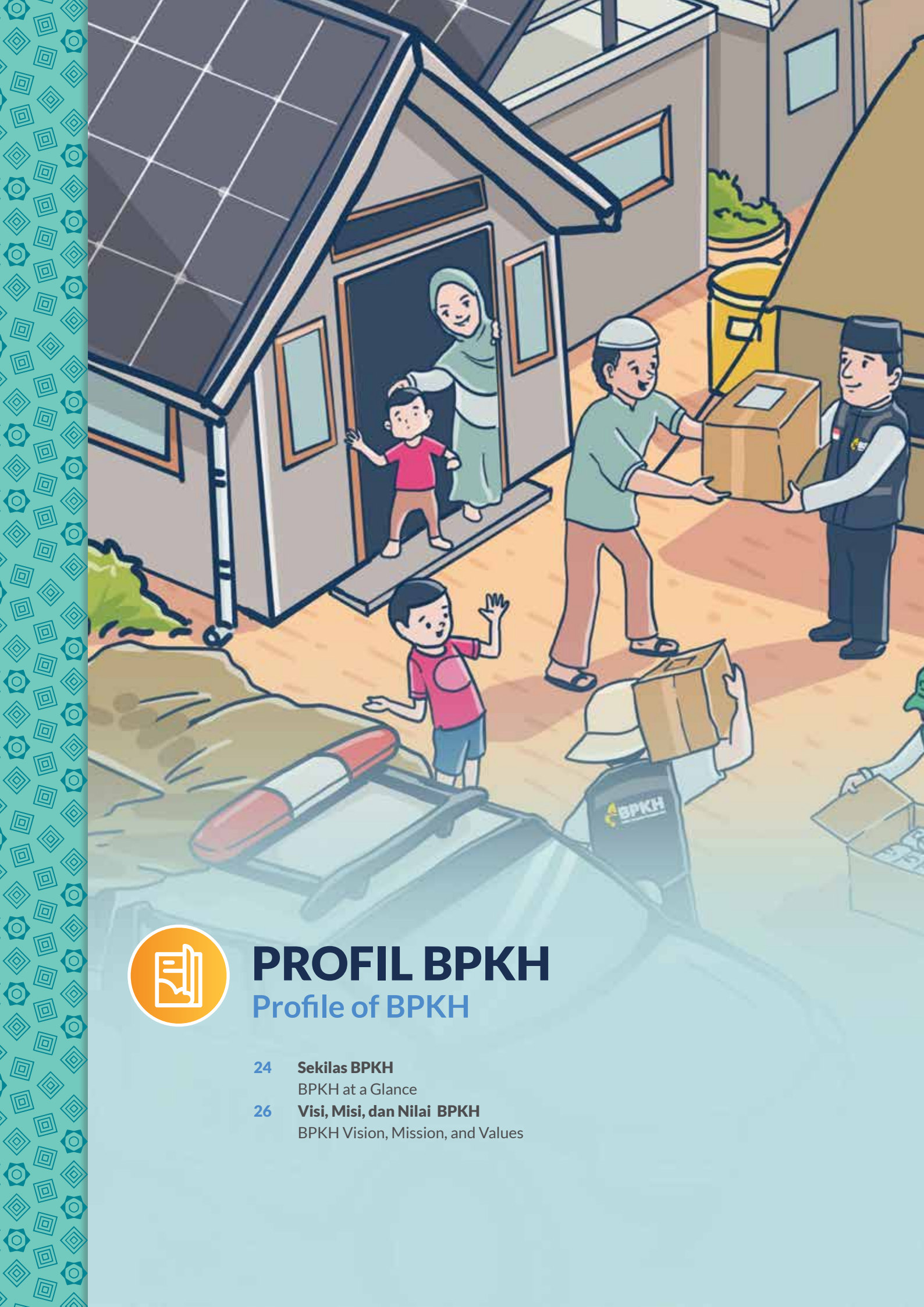
5

5 2022

- Memperoleh Penghargaan Tokoh pemberdayaan dan Happiness Awards Rumah Zakat 2022
- Memperoleh Baznas Award
- Berhasil membangun Klinik Muhammadiyah di Merauke dan masjid di Papua Barat
- Received the Rumah Zakat 2022 Empowerment Figure Award and Happiness Awards
- Received the Baznas Award
- Successfully built Muhammadiyah Clinic in Merauke and mosque in West Papua

6 2023

- Peletakan Batu Pertama Kampung Kampung “Haji” untuk korban bencana tanah bergerak di Sukabumi
- Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 5 tahun berturut-turut
- Mendirikan BPKH Limited untuk memaksimalkan ekosistem ekonomi haji dan umroh di Arab Saudi
- Berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan melakukan penanaman pohon mangrove
- Mengadakan Program Balik Kerja Bareng BPKH yang diikuti 2.650 orang pemudik
- Menyediakan setengah dari total kebutuhan Souvenir Ibadah Haji melalui BPS BPIH
- The Social Responsibility Program's support for the COVID-19 pandemic reached IDR 44.259 billion or equivalent to 28% of the total Social Responsibility Program funds.
- Received an Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) 5 years in a row
- Established BPKH Limited to maximize the economic ecosystem of Hajj and Umrah in Saudi Arabia
- Contributed to environmental conservation by planting mangrove trees
- Organized the Balik Kerja Bareng BPKH Program which was attended by 2,650 pilgrims
- Provided half of the total Hajj Souvenir needs through BPS BPIH



PROFIL BPKH

Profile of BPKH

- 24 **Sekilas BPKH**
BPKH at a Glance
- 26 **Visi, Misi, dan Nilai BPKH**
BPKH Vision, Mission, and Values



- 27** **Divisi Kemaslahatan BPKH**
BPKH Benefit Division
- 29** **Distribusi Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (DAU)**
Distribution of Return Value of Ummah Trust Fund (DAU)

- 31** **Mitra Kemaslahatan**
Benefit Program Partners
- 34** **Mekanisme Penyaluran Nilai Manfaat**
Mechanism of Return Value Distribution



Profil BPKH
Profile of BPKH

Sekilas BPKH [GRI 2-1]

BPKH at a Glance

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga hukum publik bersifat mandiri yang bertanggung jawab mengelola semua harta dan uang yang berkaitan dengan ibadah haji. Mulai dari uang setoran jemaah, hingga keuntungan yang didapat dari investasi. Pengelolaan ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan dana haji digunakan secara efektif dan efisien, sehingga kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat Islam.

Awalnya pengelolaan dana haji dilakukan langsung oleh Kementerian Agama. Hal ini mengakibatkan luasnya cakupan tanggung jawab yang diemban oleh Kementerian Agama. Sebagai upaya mengatasi hal ini, Pemerintah mendirikan badan khusus yang bertugas untuk mengelola dana haji yang bernama Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU). Berdasarkan UU No. 34 tahun 2014, BP DAU resmi berubah nama menjadi BPKH dengan perluasan wewenang yang mencakup investasi DAU melalui produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Struktur organisasi BPKH terdiri dari dua organ utama yaitu Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Kedua organ ini berfungsi secara sinergis dalam pengelolaan dana haji, mirip dengan hubungan antara Komisaris dan Direksi dalam sebuah perusahaan. Namun, berbeda dengan Komisaris pada umumnya, Dewan Pengawas BPKH memiliki wewenang khusus untuk memberikan persetujuan terkait penempatan dan investasi dana BPKH.

BPKH merumuskan langkah strategis ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap menyiapkan fondasi kelembagaan.
The phase of preparing the institutional foundation.
2. Tahap membangun kepercayaan dan kredibilitas kelembagaan BPKH.
The phase of building trust and institutional credibility of BPKH.
3. Tahap mengembangkan peran strategis dan tanggung jawab BPKH untuk kemaslahatan umat.
The phase of developing the strategic role and responsibilities of BPKH for the welfare of the ummah.
4. Tahap mengembangkan pengelolaan dan pelayanan haji terpadu.
The phase of developing integrated Hajj management and services.

The Hajj Fund Management Agency (BPKH) is an independent public legal entity responsible for managing all assets and funds related to the Hajj pilgrimage. This includes pilgrim deposits and investment returns. The management is conducted transparently, accountably, and in accordance with Sharia principles. The objective is to ensure that Hajj funds are used effectively and efficiently, thereby improving the quality of Hajj pilgrimage and providing greater benefits to the Muslim community.

Initially, the management of Hajj funds was carried out directly by the Ministry of Religious Affairs. This resulted in a broad scope of responsibilities borne by the Ministry. In an effort to address this issue, the Government established a special body tasked with managing Hajj funds, namely the Ummah Trust Fund Management Agency (BP DAU). Based on Law No. 34 of 2014, BP DAU was officially renamed BPKH with expanded authority, which includes investing the Ummah Trust Fund in banking products, securities, gold, direct investments, and other investments.

The organizational structure of BPKH consists of two main bodies: the Supervisory Board and the Executive Board. These two bodies work synergistically in managing Hajj funds, similar to the relationship between Commissioners and Directors in a company. However, unlike typical Commissioners, the BPKH Supervisory Board has the specific authority to approve the placement and investment of BPKH funds.

BPKH has formulated strategic steps into 4 (four) phases:

PROFIL BPKH

[GRI 2-1, 2-2, 2-6, SEOJK C.2, C.3, C.4]

PROFILE OF BPKH

[GRI 2-1, 2-2, 2-6, SEOJK C.2, C.3, C.4]

Nama Resmi Legal Name	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Hajj Fund Management Agency's (BPKH's)
Aktivitas dan Layanan Activities and Services	BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi kegiatan perencanaan, penerimaan, pengembangan, pengeluaran, pengawasan dan pertanggungjawaban.	BPKH is tasked with managing Hajj Fund which includes planning, receipt, development, expenditure, monitoring, and accountability.
Sifat Organisasi Nature of Organization	Lembaga hukum publik independen yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Didirikan berdasarkan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.	An independent public legal entity that is directly accountable to the President. Established based on Law No. 34/2014 on Hajj Financial Management.
Sektor Operasional Operational Sector	Pembiayaan Syariah	Sharia Funding
Skala Organisasi (per 31 Desember 2023) Scale of Organization (as of December, 31 2023)		
✳ Jumlah Dana Abadi Umat (DAU) Total Ummah Trust Fund	Rp3.823 Miliar	IDR3,823 Billion
✳ Wilayah Operasional Operational Areas	Mencakup seluruh Indonesia yang dikontrol langsung oleh BPKH, sehingga tidak terdapat pembagian wilayah operasional.	Covering all of Indonesia and directly managed by the BPKH, there are no operational regional divisions.
✳ Total Seluruh Pegawai BPKH: Total Number of BPKH's Employees:	199 orang	199 people
Cakupan Layanan Service Coverage	Seluruh Masyarakat Muslim di Indonesia	All Muslims in Indonesia
Entitas Anak Subsidiaries	BPKH Limited	
Dasar Hukum Legal Basis	Dasar hukum yang terkait dengan pembentukan bidang Kemaslahatan: 1. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, 3. Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.	Legal basis related to the establishment of the Benefit Program Division: 1. Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management. 2. Government Regulation Number 5 of 2018 on Implementation of Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management Agency. 3. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Muamalat Tower Lt./floor 15, Jl. Prof. Dr. Satrio No.Kav. 18, Jakarta Selatan/South Jakarta 12940	
Call Center	(021) 83793001	
Layanan via WhatsApp (WA) Service via WhatsApp (WA)	08882298820 (WhatsApp only)	
E-mail	kemaslahatan@bpkh.go.id	
Website	www.bpkh.go.id	



Profil BPKH
Profile of BPKH

Visi, Misi, dan Nilai BPKH [GRI 2-23, SEOJK C.1]

BPKH Vision, Mission, and Values

Visi Vision

Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat

To become the trusted financial management agency that provides optimum benefit value for hajj pilgrims and welfare of ummah.

Misi Mission

1. Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern;
2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis;
3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas;
4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional; dan
5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

1. To build trust through transparent and modern financial system management.
2. To increase efficiency and rationality of BPIH through strategic cooperation.
3. To invest in optimum return of profits with sharia principles and by considering security, prudence, and professionalism aspects.
4. To create a comprehensive and accountable governance and working system by developing Human Resources that possess integrity and professionalism.
5. To provide welfare to increase the prosperity of ummah.

Kode Etik BPKH

BPKH Code of Ethics

1. Penegakan Integritas
2. Menjaga Kerahasiaan
3. Larangan penyalahgunaan jabatan
4. Kepatuhan penggunaan dokumen
5. Larangan bantuan kepentingan

1. Upholding Integrity
2. Maintaining Confidentiality
3. Prohibiting abuse of power
4. Complying with the use of documents
5. Prohibiting conflict of interest

Core Value of BPKH

IQRA

1. Integrity
2. Quality
3. Respect
4. Accountability



Divisi Kemaslahatan BPKH [GRI 2-22, SEOJK A.1]

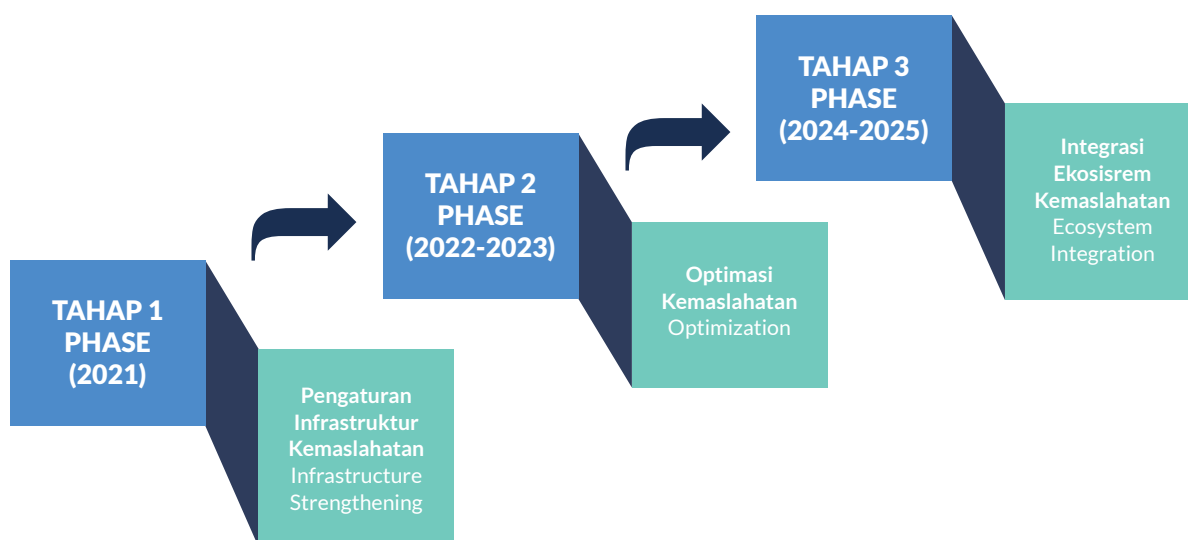
BPKH Benefit Division

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, khususnya Pasal 3 butir c, salah satu tujuan pengelolaan Keuangan Haji adalah untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemerintah membentuk bidang khusus di bawah naungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang tertuang dalam PP No.5 Tahun 2018 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

Bidang Kemaslahatan dibentuk untuk menyalurkan nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) dan memastikan tercapainya tujuan BPKH untuk meningkatkan kemaslahatan umat Islam. Nilai manfaat DAU disalurkan melalui kerja sama dengan Mitra Kemaslahatan dalam bentuk bantuan langsung maupun tidak langsung.

Bringing more prosperity to Muslims is one of the objectives of managing Hajj Fund in accordance with the Law No. 34 of 2014 concerning Hajj Fund Management, particularly Article 3 point c. To realize the objective, the Government established a specific field under the advocacy of the Hajj Fund Management Agency (BPKH) as stated in PP No.5 of 2018 concerning the Hajj Fund Management Agency.

The Benefit Program Division was established to distribute the return of Ummah Trust Fund (DAU) and to ensure the achievement of BPKH's goals of bringing more prosperity to Muslims. By cooperating with Benefit Program Partners we distribute the return of DAU through direct and indirect assistance.



Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan visi menjadi penyelenggara Program Kemaslahatan bereputasi internasional, BPKH telah menyusun rencana strategi Program Kemaslahatan dengan jangka 5 tahun (2021-2025). Rencana strategis ini dirancang dalam tiga tahap yang tersusun secara sistematis, dengan setiap tahap memiliki target kinerja yang jelas dan strategi pelaksanaan yang terperinci.

BPKH has developed a 5-year Benefit Program strategy plan (2021-2025) as a commitment in realizing its vision of becoming an worldwide renowned Benefit Program organizer. We design this strategic plan in three systematically organized phases, with each phase having clear performance targets and detailed implementation strategies.



Profil BPKH

Profile of BPKH

Pencapaian Rencana Strategis Program Kemaslahatan

Achievement of the Strategic Plan of Benefit Program

Aspek Kuantitatif Kinerja Utama Quantitative Aspects of Key Performance	Tahap 1 Penguatan Infrastruktur Kemaslahatan Phase 1 Infrastructure Strengthening	Tahap 2 Optimasi Kemaslahatan Phase 2 Optimization		Tahap 3 Integrasi Ekosistem Kemaslahatan Phase 3 Ecosystem Integration
	2021	2022	2023	2024-2025
Pencapaian kegiatan Kemaslahatan untuk masing masing ruang lingkup Achievement of Benefit Program activities for each scope	75%	90%	94%	Program mulai berjalan di 2024 Program started in 2024
Dukungan terhadap program SDGs sesuai kebijakan Kemaslahatan yang ditetapkan Support for SDGs programs in accordance with established Benefit Program policies	10 Program SDGs 10 SDGs Programs	12 Program SDGs 12 SDGs Programs	14 Program SDGs 14 SDGs Programs	
<i>Branding</i> kelembagaan yang diukur dari hasil survei kepuasan penerima manfaat (skala Likert 1-4) Institutional branding as measured by the results of beneficiary satisfaction surveys (Likert scale 1-4)	>3,00	>3,50	>3,50	
Cakupan jangkauan kewilayahan kegiatan Kemaslahatan hingga daerah 3T Regional coverage of Benefit Program activities to 3T areas	34 Provinsi* 34 Provinces*	34 Provinsi* 34 Provinces*	37 Provinsi dan 25% Kabupaten/ Kota 37 Provinces and 25% Regencies/Cities	
Jumlah Mitra Kemaslahatan aktif Total Benefit Program Partners	8 Mitra 8 Partners	12 Mitra 12 Partners	12 Mitra 12 Partners	

Catatan/Notes:

*Terdapat perbedaan perhitungan persentase Kabupaten 3T yang dijangkau oleh Program Kemaslahatan pada tahun 2022 dan 2021, sehingga BPKH memutuskan untuk tidak menampilkan data persentase pada tahun tersebut. [\[GRI 2-4\]](#)

*There is a difference in the calculation of the percentage of 3T districts reached by the Kemaslahatan Program in 2022 and 2021, so BPKH decided not to display the percentage data for that year. [\[GRI 2-4\]](#)

Distribusi Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (DAU) [3-3]

Distribution of Return Value of Ummah Trust Fund (DAU)

Dalam kerangka pelaporan keberlanjutan kami, penting untuk menyoroti peran DAU dalam mendukung prinsip-prinsip keuangan yang bertanggung jawab. Sejalan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, DAU merupakan alokasi dana yang diperoleh sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Dana ini berasal dari hasil pengembangan dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, serta sumber lain yang halal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa BPKH memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan pengeluaran dana haji yang berasal dari DAU, di mana nilai manfaat yang diterima akan diarahkan secara khusus untuk mendukung kegiatan yang mengarah pada kemaslahatan umat Islam.

BPKH juga telah merumuskan Peraturan BPKH Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat DAU untuk mendukung Upaya tersebut. Peraturan ini mengatur tentang besaran penggunaan nilai manfaat, prioritas kegiatan kemaslahatan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan kegiatan kemaslahatan.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan DAU, nilai pokoknya ditempatkan pada instrumen keuangan yang memiliki tingkat atau profil risiko yang rendah. Selama lima tahun terakhir, sebanyak 30% dari total nilai pokok DAU ditempatkan pada produk perbankan syariah, sementara 70% sisanya ditempatkan dalam bentuk investasi. Pendekatan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

To support the principles of responsible finance, it is crucial to highlight the role of the DAU in the framework of our sustainability reporting. Aligned with the provisions outlined in Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Fund Management, the DAU is a funds allocation obtained prior to the law's enactment. The fund comes from the proceeds of development and/or the remaining operational costs of organizing the Hajj pilgrimage, as well as other sources that are halal and in accordance with applicable laws.

The law further states that BPKH is responsible for overseeing and implementing the expenditure of Hajj funds obtained from DAU, with the received return will be specifically directed to support activities that lead to the benefit of Muslims.

BPKH has also formulated BPKH Regulation No. 7 of 2018 on Prioritization of Benefit Program Activities and Use of Return from DAU to support these efforts. This regulation regulates the amount of use of return, prioritization of benefit program activities, as well as evaluation and accountability on the implementation of benefit program activities.

DAU's initial fund is placed in low-risk financial instruments to ensure its sustainability over the long run. Over the last five years, 30% of the total DAU's initial fund has been placed in sharia banking products, with the remaining 70% allocated to investments. This approach is in accordance with the provisions stipulated in Government Regulation No. 5 of 2018 on the Implementation of Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management.



Profil BPKH

Profile of BPKH

Nilai Manfaat yang Dihasilkan dan Disalurkan (Rp) [SEOJK F.2] Generated and Distributed Return Value (IDR)

	2023	2022	2021
Nilai pokok DAU (Rp) DAU Initial Fund (IDR)	3.823.284.066.396	3.795.924.828.633	3.698.625.127.602
Nilai manfaat yang dihasilkan (Rp) Generated Return Value (IDR)	251.545.776.914	242.297.133.737	237.615.583.591
Nilai manfaat yang didistribusikan (Rp) Distributed Return Value (IDR)	228.581.514.254	130.318.759.229	189.446.292.902
Sisa nilai manfaat (Rp) Remaining Return Value	22.964.262.660	111.978.374.508	48.169.290.689

		2023	2022	2021
Nilai penempatan DAU DAU Placement Fund	Investasi Investment	3.340.973.671.741	3.795.924.828.633	3.698.625.127.602
	Bank Syariah Sharia Bank	482.310.394.655	242.297.133.737	237.615.583.591
Nilai manfaat yang dihasilkan Generated Fund	Investasi Investment	225.892.985.478	130.318.759.229	189.446.292.902
	Bank Syariah Sharia Bank	25.652.791.436	111.978.374.508	48.169.290.689

Tujuan dari pengelolaan keuangan haji, termasuk DAU, adalah untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Hal ini direalisasikan melalui Program Kemaslahatan, di mana sumber pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU. Adapun nilai manfaat DAU yang dapat digunakan setiap tahun tidak dapat melebihi total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 2023, nilai manfaat DAU yang digunakan mencapai 94% dari total nilai manfaat DAU yang dihasilkan pada tahun 2022.

Dalam pengelolaan DAU, setiap tahunnya BPKH diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kualitas pengelolaan keuangan haji dan meningkatkan kepercayaan publik. Selama lima tahun berturut-turut sejak berdirinya, BPKH konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan capaian ini, BPKH terus menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.

The purpose of Hajj fund management, including DAU, is to bring more benefits to the prosperity of Muslims. BPKH realizes this through the Benefit Program, which is funded from the return of DAU. Each year, the return of DAU that can be used cannot exceed the total return of DAU from the previous year. For example, in 2023, we used 94% of the return of DAU from the total return of DAU generated in 2022.

To ensure the quality of Hajj fund management and to increase public trust, the Audit Board of RI (BPK) conducts an annual audit of the DAU's management. For five consecutive years since its establishment, BPKH has consistently obtained an Unqualified Opinion (WTP). With this achievement, BPKH continues to demonstrate its commitment to transparency and accountability in Hajj fund management.

Mitra Kemaslahatan [GRI 3-3]

Benefit Program Partners

Rantai Nilai Bidang Kemaslahatan [GRI 2-6] Value Chain of Benefit Program Division



Penyaluran dana Kemaslahatan melalui kegiatan yang dijalankan oleh Mitra Kemaslahatan menegaskan pentingnya sinergi dengan organisasi mitra lainnya untuk mencapai tujuan Kemaslahatan bagi umat Islam. Komunikasi yang efektif, kerjasama yang solid, dan koordinasi yang baik antar lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal dan berdampak positif terhadap kesejahteraan umat.

Bidang Kemaslahatan menjalin kolaborasi dengan organisasi dan lembaga yang telah ditunjuk sebagai Mitra Kemaslahatan. Proses seleksi dan penentuan Mitra Kemaslahatan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2019 dan amandemennya. Persyaratan dan kriteria untuk menjadi Mitra Kemaslahatan ditetapkan secara cermat, disesuaikan dengan tujuan serta program Kemaslahatan yang akan dilaksanakan.

BPKH secara konsisten memilih dan memberdayakan Mitra Kemaslahatan yang 100% berasal dari Indonesia, dengan prioritas utama pada mitra lokal yang berasal dari sekitar daerah pelaksanaan program. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Data menunjukkan bahwa seluruh nilai manfaat program, sebesar Rp228.581.514.254, disalurkan langsung kepada mitra dalam negeri. [GRI 204-1]

Dalam menetapkan Mitra Kemaslahatan, kredibilitas mitra tersebut dalam melaksanakan tugas amanah umat menjadi aspek krusial yang diperhatikan. Oleh karena itu, rekam jejak organisasi Mitra Kemaslahatan dalam

The distribution of Benefit Program funds through Partner-led activities emphasizes the importance of collaboration with other partner organizations to achieve goals of Muslims' prosperity. Effective communication, solid cooperation, and good coordination between these institutions can provide an optimal contribution and positively impact the welfare of the ummah.

The Benefit Program Division collaborates with organizations and institutions that have been appointed as Benefit Program Partners. BPKH Regulation Number 2 of 2019 and its amendments becomes the basis for the selection and determination process of Benefit Program Partners. The requirements and criteria for becoming a Benefit Program Partners are carefully determined, adjusted to the objectives and benefit programs that will be implemented.

BPKH consistently selects and empowers Benefit Program Partners that are 100% Indonesian-owned, with a primary focus on local partners from the surrounding areas of program implementation. This is aimed at stimulating regional economic growth and empowering local micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Data shows that the entire program benefit value of Rp228,581,514,254 was channeled directly to domestic partners. [GRI 204-1]

The credibility of these partners in carrying out the mandate of the ummah becomes a crucial aspect in determining the Benefit Program Partners. As a result, we consider the Partner organization's track record in organizing various



Profil BPKH

Profile of BPKH



menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial menjadi faktor penting yang dipertimbangkan. Program Kemaslahatan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Oleh karena itu, dipilihnya organisasi Mitra Kemaslahatan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia menjadi hal yang sangat penting.

Perjanjian kerjasama antara BPKH dan Mitra Kemaslahatan menjadi landasan yang penting untuk mengatur hubungan kerja yang efektif dan memastikan pencapaian tujuan sesuai harapan bersama. Dokumen perjanjian ini mengikat kedua belah pihak, memberikan dasar bagi Bidang Kemaslahatan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Mitra. Melalui perjanjian ini, diatur pula berbagai indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan telah menjalin kemitraan dengan 12 Mitra Kemaslahatan yang semuanya (100%) merupakan organisasi

social activities as a key factor. The Benefit Program program aims to provide benefits to the people of Indonesia, especially Muslims. Therefore, the selection of Partner organizations that have a deep understanding of the social context and needs of the Indonesian people is extremely important.

The collaboration agreement between BPKH and Benefit Program Partners serves as a solid foundation to regulate effective working relationships and to ensure the goals are achieved according to mutual expectations. This agreement document is binding on both parties, providing a basis for the Benefit Program Division to monitor and evaluate Partner performance. This agreement regulates numerous previously established program performance indicators, ensuring that program implementation meets predetermined standards.

In 2023, the Corporate Secretariat Benefit Program Division has established partnerships with 12 Benefit Program Partners, all of which are Philanthropic organizations

Kemaslahatan yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ), serta telah diseleksi menggunakan kriteria sosial. Kolaborasi ini telah dipilih melalui proses seleksi ketat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, termasuk evaluasi terhadap aspek sosial. Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan telah sukses merealisasikan 380 program Kemaslahatan, dengan total dana penyaluran mencapai Rp228,6 billion. [GRI 414-1]

Dengan bergabungnya kembali BSI Maslahat, jumlah Mitra Kemaslahatan BPKH bertambah menjadi 12. BSI Maslahat merupakan hasil penggabungan dari PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM), yang sebelumnya telah menjadi Mitra Kemaslahatan BPKH pada tahun 2021. Penambahan mitra ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat.

Sebagai bentuk dukungan tambahan terhadap mitra kemaslahatan, dimulai sejak 2023, BPKH berupaya memberikan support melalui *management fee*. Upaya ini merupakan komitmen BPKH dalam memperkuat hubungan kemitraan dengan mitra kemaslahatan, yang sebagian besar terdiri dari LAZ dan BAZ. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendukung keuangan syariah, zakat, dan wakaf, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan serta pelaporan.

Evaluasi yang cermat telah dilakukan terhadap kinerja Mitra Kemaslahatan tersebut, termasuk penilaian terhadap dampak sosial dari program-program yang dijalankan.

Dari total 12 Mitra Kemaslahatan yang telah dinilai terkait dengan dampak sosial yang dihasilkan, tidak ditemukan adanya mitra yang menunjukkan dampak sosial negatif, baik secara aktual maupun potensial. Akibatnya, tidak ada peristiwa di mana hubungan kerja dengan mitra diakhiri sebagai hasil dari penilaian tersebut, dan tidak ada penyebab yang mendasarinya.

(100%) (LAZ or BAZ), and have been selected using social criteria. These collaborations have been selected through a rigorous selection process based on predetermined criteria, including evaluation of social aspects. The Corporate Secretariat and Benefit Program Division have successfully realized 380 Social Responsibility programs, with total distribution funds of Rp228,6 billion. [GRI 414-1]

As BSI has been reinstated, the number of BPKH Benefit Program Partners has increased to 12. BSI is the result of the merger of PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), and PT Bank Syariah Mandiri (BSM), which had previously become BPKH Benefit Program Partners in 2021. The addition of these partners is expected to provide wider benefits for the people.

Starting from 2023, management fees are provided by BPKH as a form of additional support for benefit program partners. This effort represented BPKH's commitment in strengthening partnership relationships with benefit partners, which mostly consist of LAZ and BAZ. This initiative aims to support sharia finance, zakat, and waqf while also improving the capacity and quality of implementation and reporting.

The Benefit Program Partners' performance has been carefully evaluated, including an assessment of the social impact of the implemented programs.

Out of a total of 12 Partners that have been assessed for social impact, none were found to have shown negative social impact, either actual or potential. As a result, there were no instances where the working relationship with a partner was terminated due to said assessment, and there was no underlying cause.





Mekanisme Penyaluran Nilai Manfaat

Mechanism of Return Value Distribution



Nilai manfaat dari Dana Abadi Umat disalurkan melalui serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Dalam pelaksanaannya, semua pihak, termasuk lembaga pemerintah, Mitra Kemaslahatan, dan masyarakat umum, diundang untuk berpartisipasi dalam merancang program Kemaslahatan. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan mengajukan proposal kegiatan melalui situs web resmi BPKH (www.bpkh.go.id), melalui alamat email Kemaslahatan (Kemaslahatan@bpkh.go.id), atau melalui metode non-elektronik.

Proposal yang diajukan akan diproses oleh Divisi Registrasi dan Analisis Kemaslahatan, yang akan melakukan serangkaian tahap seleksi dan evaluasi berdasarkan kriteria kelayakan. Tujuannya adalah untuk memperoleh persetujuan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan kegiatan yang didukung oleh Program Kemaslahatan untuk menjadi solusi atas berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat.

The return of the Ummah Trust Fund is distributed through several activities aimed at improving the prosperity of the ummah. In its implementation, we invite all parties, including government agencies, Benefit Program Partners and the general public, to participate in designing Benefit programs by submitting an activity proposal through BPKH's official website (www.bpkh.go.id), through the email address (Kemaslahatan@bpkh.go.id), or through non-electronic methods.

The Division of Registration and Analysis of Benefit Program will process the submitted proposals through several selection and evaluation stages based on eligibility criteria, which aim is to obtain approval for the activity. This approach allows activities supported by the Benefit Program to become solutions to various community's issues.

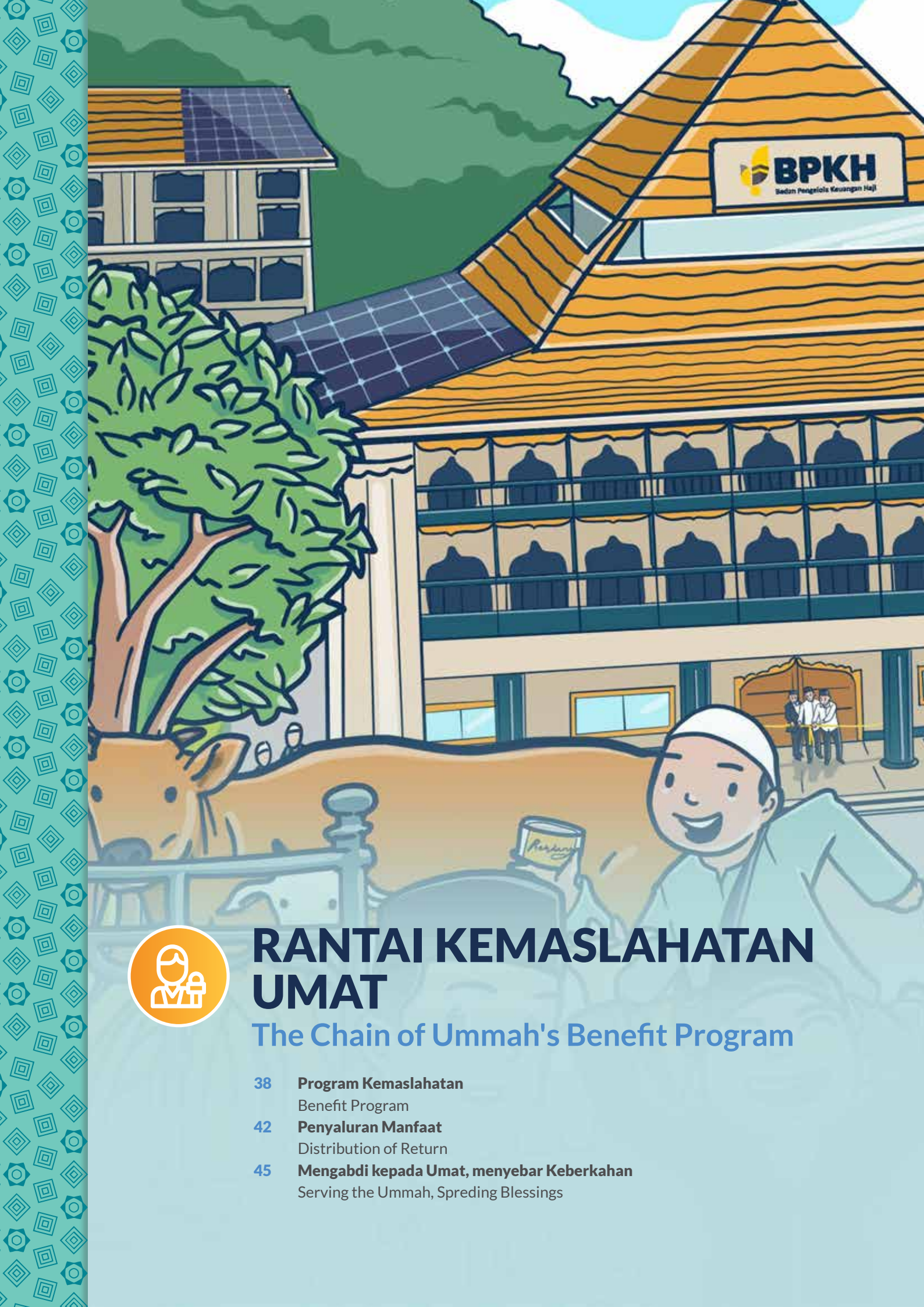
Sistem Manajemen Mutu Standar ISO 9001:2015 juga telah diterapkan pada Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan. Sistem ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari penerimaan proposal hingga penyelesaian Kegiatan Kemaslahatan. Penerapan sistem manajemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyaluran nilai manfaat dilakukan secara konsisten. Setiap proposal yang diterima diperlakukan secara setara sesuai dengan prosedur yang berlaku dan kriteria yang ditetapkan. Meskipun begitu, pada tahun 2023, Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemaslahatan masih dalam proses pemutakhiran dan ditargetkan pada tahun 2024 dapat mulai diimplementasikan.

SIM tentu telah membantu meningkatkan efisiensi dalam proses registrasi dan analisis proposal, dan mampu mencapai tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama periode pelaporan, Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan menyetujui 9% lebih banyak proposal dibandingkan tahun 2022.

The Corporate Secretariat and Benefit Program Division has also implemented the ISO 9001:2015 Standard of Quality Management System. This system covers all stages, from proposal submission to completion of Benefit Program Activities. This management system is in place to ensure that the process of distributing return is carried out consistently. Every proposal is processed equally in accordance with the applicable procedures and established criteria. However, the Benefit Program Management Information System (SIM) is currently being updated and is scheduled to be implemented in 2023.

The SIM has certainly helped improve efficiency in the process of proposals registration and analysis, and was able to achieve a better level compared to previous years. During the reporting period, the Corporate Secretariat and Benefit Program Division approved 9% more proposals than in 2022.

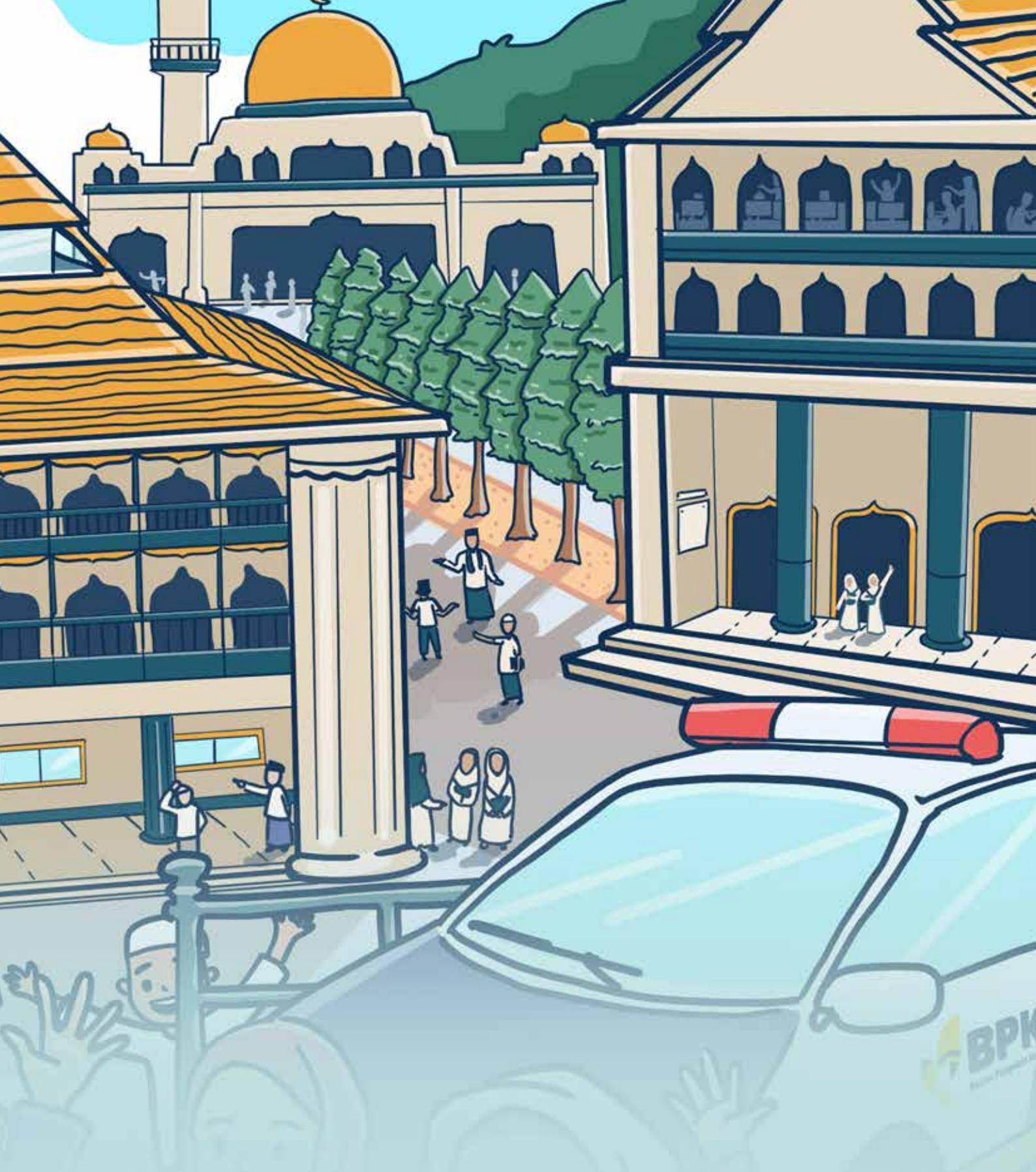




RANTAI KEMASLAHATAN UMAT

The Chain of Ummah's Benefit Program

- 38 **Program Kemaslahatan**
Benefit Program
- 42 **Penyaluran Manfaat**
Distribution of Return
- 45 **Mengabdikan kepada Umat, menyebarkan Keberkahan**
Serving the Ummah, Spreading Blessings



- 48 Sinergi Kemaslahatan dan tujuan pembangunan Berkelanjutan**
Synergy of Benefit Program and Sustainable Development Goals
- 79 Tanggap Bencana**
Disaster Relief

- 82 Dampak Ekonomi Tidak Langsung Program Kemaslahatan**
Indirect Economic Impact of Benefit Program
- 84 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi**
Monitoring and Evaluation Activities



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Program Kemaslahatan

The Benefit Program

Program Kemaslahatan, yang diluncurkan sejak akhir tahun 2018, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BPKH dalam mengimplementasikan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Bidang Kemaslahatan berada di bawah pengawasan Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut. Bidang ini bertugas menjalankan tugas BPKH dalam menyalurkan nilai manfaat dari pengelolaan DAU sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Pada tahun 2023, BPKH berupaya memperluas cakupan penyaluran nilai manfaat dengan menambahkan satu asnaf terbaru, yaitu tanggap bencana. Program Kemaslahatan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak bencana alam dan/atau bencana non-alam yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Melalui kegiatan tanggap bencana ini, BPKH berkomitmen untuk memberikan bantuan yang tepat dan efektif dalam mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana, baik alam maupun non-alam.

The Benefit Program, which was launched in late 2018, is part of BPKH's ongoing efforts to implement Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management. The Deputy of Corporate Secretary and Benefit Program is in charge of overseeing the Benefit Program Division and implementing its programs. This Benefit Program Division is responsible for carrying out BPKH's duties in distributing the return value of DAU management as a step to improve the welfare of Muslims.

By adding disaster relief as the new asnaf in 2023, BPKH strives to expand the coverage of return value distribution. This Benefit Program aims to prevent and overcome the impact of natural disasters and/or non-natural disasters declared by the Central Government and/or Local Government. Through this disaster relief activity, BPKH is committed to providing appropriate and effective assistance in overcoming the various impacts caused by both natural and non-natural disasters.



PILAR PROGRAM KEMASLAHATAN SESUAI DENGAN MAQASHID SYARIAH:

PILLARS OF THE BENEFIT PROGRAM BASED ON MAQASHID SHARIA:



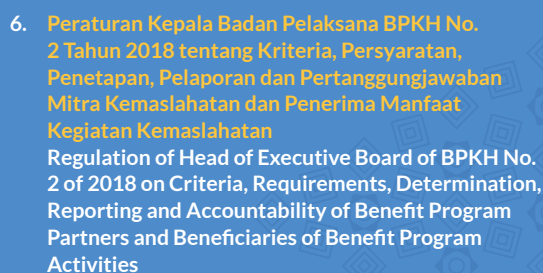
Dalam pelaksanaan Program Kemaslahatan, penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang didukung memperhatikan dasar hukum yang berlaku agar kegiatan Kemaslahatan tidak berpotensi melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku, serta yang paling utama, tidak melanggar asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas.

In implementing the Benefit Program, it is critical to ensure that all supported activities adhere to applicable law and regulation, therefore Benefit Program activities do not potentially violate the law or conflict with applicable regulations, and most importantly, do not violate the principles of sharia, prudence, benefits, non-profit, transparency, and accountability.



The Chain of Ummah's Benefit Program

LEGAL BASIS OF BPKH'S BENEFIT PROGRAM:



8. **Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan**
Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 17 of 2020 on Amendment to Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 3 of 2020 on Technical Guidelines for Benefit Program Activities

9. **Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan**
Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 18 of 2020 on the Second Amendment to Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 3 of 2020 on Technical Guidelines for Benefit Program Activities

11. **Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan**
Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 34 of 2020 on the Fourth Amendment to Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 3 of 2020 on Technical Guidelines for Benefit Program Activities

10. **Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan**
Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 29 of 2020 on the Third Amendment to Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 3 of 2020 on Technical Guidelines for Benefit Program Activities

12. **Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan**
Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 11 of 2021 on the Fifth Amendment to Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 3 of 2020 on Technical Guidelines for Benefit Program Activities

13. **Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan Dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat**
Hajj Fund Management Agency Regulation Number 3 of 2023 on the Prioritization of Benefit Program Activities and Use of the Return Value from Ummah Trust Fund

14. **Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan Dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat**
Regulation of the Head of the Hajj Fund Management Agency Number 8 of 2023 on the Implementation of the Hajj Fund Management Agency Regulation Number 3 of 2023 on the Prioritization of Benefit Program Activities and Use of the Return Value from Ummah Trust Fund



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Penyaluran Manfaat [GRI 3-3]

Distribution of Return Value

SEBARAN PENYALUR NILAI MANFAAT

No	Provinsi Province	Jiwa	Nilai Alokasi Allocation Value
1	Aceh	265.331	Rp5.733.447.948
2	Bali	7.133	Rp1.253.387.751
3	Banten	65.887	Rp7.286.386.653
4	Bengkulu	7.615	Rp1.267.568.967
5	D.I. Yogyakarta Special Region of Yogyakarta	24.717	Rp5.171.628.974
6	Daerah Khusus Jakarta Special Region of Jakarta	48.547	Rp9.732.408.223
7	Gorontalo	6.396	Rp6.544.599.412
8	Jambi	7.601	Rp1.193.928.921
9	Jawa Barat West Java	117.614	Rp37.867.698.996

SEBARAN PENYALUR NILAI MANFAAT

No	Provinsi Province	Jiwa	Nilai Alokasi Allocation Value
10	Jawa Tengah Central Java	156.102	Rp23.166.678.831
11	Jawa Timur East Java	117.446	Rp25.302.684.867
12	Kalimantan Barat West Kalimantan	2.689	Rp1.049.916.635
13	Kalimantan Selatan South Kalimantan	40.920	Rp2.837.438.314
14	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	973	Rp98.496.603
15	Kalimantan Timur East Kalimantan	1.961	Rp282.782.572
16	Kalimantan Utara North Kalimantan	4.887	Rp493.992.556



No	Provinsi Province	Jiwa	Nilai Alokasi Allocation Value
17	Kep. Bangka Belitung Bangka Belitung Islands	1.501	Rp337.367.843
18	Kep. Riau Riau Islands	3.626	Rp539.796.900
19	Lampung	15.691	Rp2.864.775.963
20	Maluku	801	Rp101.794.336
21	Maluku Utara North Maluku	669	Rp70.712.283
22	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	13.362	Rp6.544.599.412
23	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	4.120	Rp681.874.917
24	Papua	3.026	Rp605.397.504
25	Papua Barat West Papua	2.154	Rp275.851.359
26	Papua Barat Daya Southwest Papua	2.257	Rp867.086.883
27	Papua Tengah Central Papua	900	Rp109.874.600

No	Provinsi Province	Jiwa	Nilai Alokasi Allocation Value
28	Papua Selatan South Papua	1.029	Rp150.061.483
29	Riau	18.399	Rp2.693.720.020
30	Sulawesi Barat West Sulawesi	1.339	Rp1.977.941.575
31	Sulawesi Selatan South Sulawesi	71.140	Rp6.942.864.644
32	Sulawesi Tengah Central Sulawesi	4.635	Rp3.338.749.581
33	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	5.347	Rp296.195.958
34	Sulawesi Utara North Sulawesi	929	Rp117.542.500
35	Sumatra Barat West Sulawesi	73.510	Rp11.252.999.984
36	Sumatra Selatan South Sulawesi	3.544	Rp564.498.496
37	Sumatra Utara North Sulawesi	35.306	21.483.014.853





Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Periode 2023, Program Kemaslahatan telah meluas hingga mencakup 37 Provinsi di Indonesia, dengan pendistribusiannya dilakukan secara proporsional, mempertimbangkan jumlah Jemaah haji di setiap wilayah. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan wilayah dengan persentase terbesar jumlah Jemaah haji yang masih menunggu keberangkatan, sehingga mereka memperoleh nilai manfaat yang signifikan dari program ini.

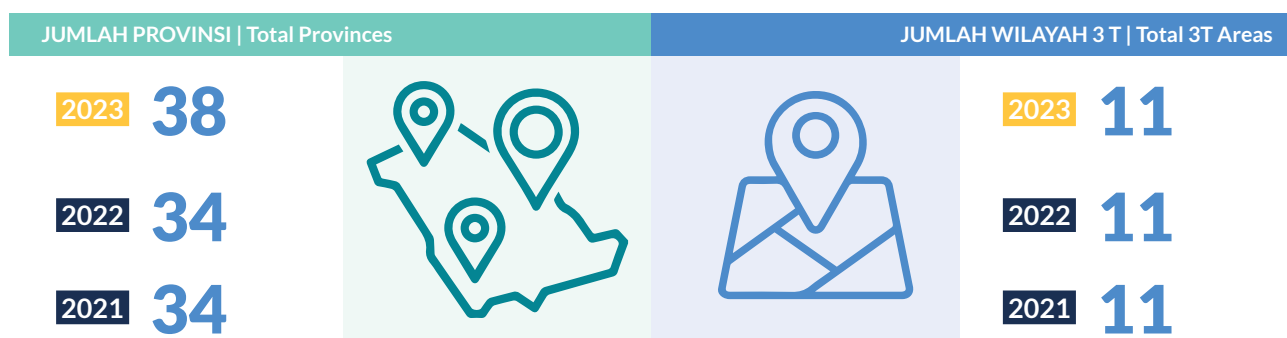
Sumber pendanaan Program Kemaslahatan berasal dari nilai manfaat DAU, yang merupakan bagian dari dana haji. Program ini didesain khusus untuk memberikan manfaat kepada umat Islam Indonesia. Namun, prinsip syariah yang menjadi landasan pengelolaannya memungkinkan nilai manfaat DAU juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat umat Islam di Indonesia.

Sesuai dengan arahan yang tertera dalam *Roadmap* Program Kemaslahatan, sejak tahun 2021, fokus utama dalam penyaluran nilai manfaat yaitu pada daerah terjauh, tertinggal, dan terluar (3T). Pendekatan ini mencerminkan upaya BPKH untuk memberikan peluang yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan mempertimbangkan proporsi masing-masing, dalam merasakan manfaat dari DAU. Pada tahun 2023, Program Kemaslahatan telah mencapai enam daerah 3T, dengan total nilai manfaat yang disalurkan mencapai Rp228,6 miliar.

By 2023, the Benefit Program has expanded to cover 37 Indonesian Provinces. The distribution is done proportionally based on the number of Hajj pilgrims in each region. Because West Java, Central Java, and East Java provinces have the largest percentage of Hajj pilgrims who are still waiting to depart, they receive significant return value from this program.

The Benefit Program is funded from the return value of DAU, which is part of the Hajj fund. This program is specifically designed to provide benefits to Indonesian Muslims. However, the sharia principles as the basis of its management allow the return value of DAU to also benefit the entire Muslim community in Indonesia.

Since 2021, in accordance with the directions stated in the *Roadmap* of Benefit Program, the farthest, underdeveloped, and outermost areas (3T) have been the main focus in return value distribution. This approach reflects BPKH's efforts to provide equal opportunities for all Indonesian people, by taking into account their respective proportions, to benefit from the DAU. In 2023, the Benefit Program has reached six 3T areas, with the total distributed return value reaching Rp228.6 billion.



* Referensi Wilayah berdasarkan Perpres Nomor 105 Tahun 2021
Reference Regions based on Presidential Regulation No. 105 of 2021

Mengabdikan kepada Umat, Menyebarkan Keberkahan [GRI 2-22, SEOJK F.1]

Serving the Ummah, Spreading Blessings



Sebagai bagian dari komitmen BPKH dalam mendukung visi dan misinya, program Kemaslahatan menjadi salah satu upaya nyata untuk memperbaiki kondisi masyarakat, terutama dalam pencapaian misi kelima, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat. Program ini didedikasikan untuk memastikan bahwa pemanfaatan DAU dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun ini, pelaksanaan Program Kemaslahatan telah mencapai tingkat keberhasilan yang lebih baik dan lebih intensif berkat implementasi sejumlah program strategis. Salah satu contohnya adalah penyempurnaan tata kelola kelembagaan melalui operasional penuh Divisi Registrasi dan Analisis Kemaslahatan serta Divisi Pelaksanaan dan Monitoring Kemaslahatan. Kehadiran unit-unit ini telah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proposal kegiatan Kemaslahatan serta meningkatkan kualitas implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sejalan dengan semangat program Melayani Umat, Mendekatkan Manfaat.

As part of BPKH's commitment in supporting its vision and mission, the Benefit Program is one of the real efforts to improve the community's condition, especially in achieving its fifth mission, to increase the welfare of ummah. This program is dedicated to ensuring that the DAU is utilized effectively, efficiently, and in compliance with applicable regulations.

This year, due to the implementation of numerous strategic programs, the Benefit Program implementation has achieved a higher and more intensive level of success. One example, by fully operating the Registration and Analysis of Benefit Program Division and the Implementation and Monitoring of the Benefit Program Division, institutional governance has been improved. These units have successfully increased efficiency in the management of Benefit Program activity proposals and improved the quality of good governance principles implementation, all in accordance with the spirit of Serving the Ummah, Spreading Blessings.



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program



Per 2021, BPKH telah mengembangkan *Roadmap* Program Kemaslahatan 2021-2025, yang telah tercantum dalam Buku BPKH Bermaslahat. Program Kemaslahatan bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam *Roadmap* tersebut, sejalan dengan semangat program Melayani Umat, Mendekatkan Manfaat. Sasaran strategis utamanya adalah meningkatkan keragaman dan kualitas kegiatan Kemaslahatan serta memperluas cakupan layanan ke wilayah-wilayah 3T. Dengan komitmen kami untuk mencapai tujuan ini, kami memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil membawa dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Selama periode pelaporan, dalam semangat program Melayani Umat, Mendekatkan Manfaat, kami telah meneguhkan komitmen kami untuk memaksimalkan dampak positif dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, dengan tujuan memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

Program Kemaslahatan terus berusaha untuk mengimplementasikan inisiatif-inisiatif sesuai dengan panduan yang tercantum dalam *roadmap*, terutama dalam berbagai ruang lingkup kegiatan. Meskipun demikian, mayoritas kegiatan yang telah dilaksanakan masih berfokus pada upaya penguatan infrastruktur Kemaslahatan yang

As of 2021, BPKH has developed the 2021-2025 Roadmap of Benefit Program, which has been included in the BPKH Benefit Program Book. The Benefit Program aims to achieve the Roadmap's set targets, in accordance with the spirit of Serving the Ummah, Spreading Blessings. The Roadmap's main strategic goal is to increase the diversity and quality of Benefit Program activities and expand service coverage to 3T areas. We ensure that each step we take brings significant impact in improving the overall welfare of the ummah, as achieving these goals have become our commitment.

During the reporting period, in the spirit of Serving the Ummah, Spreading Blessings program, we have affirmed our commitment to maximize the positive impact of each implemented activity to provide optimal benefits to the community.

The Benefit Program continues to strive to implement initiatives in accordance with the roadmap's guidelines, especially in various scopes of activities. However, the majority of activities that have been implemented still focus on efforts to strengthen the infrastructure that has been planned since 2021. Even then, significant progress

telah direncanakan sejak tahun 2021. Namun, terdapat kemajuan yang signifikan dalam sebagian kecil ruang lingkup yang telah berhasil melaksanakan kegiatan pada tahap optimasi Kemaslahatan periode 2022-2023.

Pada tahun 2023, BPKH memperkenalkan langkah inovatif untuk mempermudah akses bagi calon jamaah haji dalam memantau laporan penggunaan dana haji secara online, langsung dari kenyamanan rumah mereka. Nilai manfaat dari dana haji digunakan untuk merasionalisasi biaya perjalanan, menjadikannya lebih terjangkau bagi jamaah. Selain itu, jamaah haji menerima distribusi nilai manfaat setiap tahunnya, yang dapat dipantau melalui aplikasi BPKH VA. Aplikasi ini tersedia di Play Store dan App Store, memungkinkan jamaah untuk memeriksa detail manfaat dan laporan keuangan secara transparan dan efisien.

Langkah inovatif lainnya dari Program Kemaslahatan yaitu mencakup pembuatan buku saku bagi Penerima Manfaat dan Mitra Kemaslahatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola kegiatan Kemaslahatan dan memperkuat hubungan mitra. Selain itu, kami juga melaksanakan berbagai kegiatan Kemaslahatan, seperti melanjutkan pembangunan masjid di pedalaman Papua Barat.

Pada tahun 2023, Bidang Kemaslahatan terus memperluas cakupan Penerima Manfaat kegiatan dengan pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang sering terpinggirkan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang merata dan inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan semangat program Melayani Umat, Mendekatkan Manfaat. Selain itu, Program Kemaslahatan juga terus memperkuat jangkauan kegiatan ke daerah-daerah 3T, memastikan bahwa manfaat dari program ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah operasional BPKH.

Dalam upaya memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif bagi Penerima Manfaat, kegiatan Kemaslahatan diarahkan dengan teliti. Kami menerapkan mekanisme evaluasi yang komprehensif mulai dari tahap awal penerimaan proposal hingga pelaksanaan dan pasca pelaksanaan program. Seluruh kegiatan selama periode pelaporan telah evaluasi berupa laporan yang diserahkan oleh mitra kemaslahatan. Selain itu meskipun belum semua, beberapa program juga telah dilakukan analisa *Social Return on Investment* (SROI), dan kami memastikan bahwa tidak ada kasus dampak negatif yang terjadi pada masyarakat Penerima Manfaat. [413-2]

has been made in a small number of scopes that have successfully implemented activities in the Benefit Program's optimization stage for the 2022-2023 period.

In 2023, BPKH introduced an innovative measure to ease access for prospective hajj pilgrims to monitor reports on the use of Hajj funds online, right from the comfort of their homes. The journey cost is being rationalized using the return value of the Hajj fund to make it more affordable for pilgrims. In addition, hajj pilgrims receive an annual distribution of the return value, which can be monitored through the BPKH VA application. The app, available on the Play Store and App Store, allows hajj pilgrims to check benefit details and financial reports transparently and efficiently.

Another innovative step of the Benefit Program includes the creation of a handbook for Benefit Program's Beneficiaries and Partners to improve the governance of Benefit Program activities and strengthen partner relationships. We also implement various Benefit Program activities, such as continuing the construction of mosques in the remote area of West Papua.

In 2023, the Benefit Program Division continued to expand the coverage of activities' Beneficiaries with a more inclusive approach, involving community groups that are often marginalized. In accordance with the spirit of Serving the Ummah, Spreading Blessings program, we are committed to providing equal and inclusive services to all community levels. Furthermore, the Benefit Program also continued to strengthen its activities' reach to the 3T areas, ensuring that the program's benefits could reach all people in need throughout BPKH's operational areas.

We carefully direct our Benefit Program activities in order to make a positive impact and reduce negative impacts for our beneficiaries. We implement a comprehensive evaluation mechanism, starting from the initial stage of receiving proposals to the implementation and post-implementation of the program. All activities during the reporting period have been evaluated through reports submitted by our welfare partners. In addition, although not all programs have been analyzed yet, several have undergone Social Return on Investment (SROI) analysis. We ensure that there have been no negative impacts on the beneficiary communities. [413-2]



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Sinergi Kemaslahatan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [GRI 3-3, SEOJK F.28]

Synergy of Benefit Program and Sustainable Development Goals



Kegiatan Kemaslahatan yang diselenggarakan oleh Program Kemaslahatan BPKH difokuskan pada dukungan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan komitmen untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menghadapi perubahan iklim, kami bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Setiap tahun, kami terus meningkatkan keselarasan antara kegiatan Kemaslahatan dengan tujuan SDGs, menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang kami layani, sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan.

Komitmen ini tercermin dalam pelaksanaan Program Kemaslahatan yang kami rancang untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan, sejalan dengan ke-17 Tujuan dan 169 Target SDGs yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2030. Dengan fokus yang tajam, Program Kemaslahatan bertujuan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Indonesia terutama umat Islam. Seluruh program kemaslahatan (100%) yang digagas BPKH dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, hasil dari pemetaan sosial yang mendalam. Dengan demikian, setiap program dipastikan memberikan manfaat positif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. [GRI 413-1]

BPKH's Benefit Program organizes Benefit Program Activities that are focused on supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). We aim to holistically improve people's welfare by committing to end poverty, reduce social inequality, and address climate change. Each year, we continue to improve the alignment between the Benefit program activities and SDGs goals, creating a significant positive impact on the communities we serve in the spirit of sustainable development.

This commitment is reflected in the implementation of our Benefit Program, which is designed to create sustainable impact, aligning with the SDGs' 17 Goals and 169 Targets that are set to be achieved by 2030. With a sharp focus, the Benefit Program aims to deliver a significant positive impact on the Indonesian community, particularly Muslims. All BPKH welfare programs are specifically designed to meet the needs of local communities, based on in-depth social mapping. As a result, each program is guaranteed to provide positive benefits and has no negative impact on the community. [GRI 413-1]



Dalam upaya menciptakan dampak yang berkelanjutan, kami menjalankan berbagai kegiatan Kemaslahatan yang berpusat pada tujuh ruang lingkup yang telah ditetapkan. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan keterampilan, serta kegiatan filantropi di sektor kesehatan, pendidikan, dan dakwah.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Program Kemaslahatan diperkuat oleh kerjasama dengan Mitra Kemaslahatan. Pada tahun 2023, melalui implementasi ketujuh ruang lingkup kegiatan Kemaslahatan, program berhasil meningkatkan dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan cakupan yang mencapai 37 provinsi di Indonesia, kami memberikan dukungan yang diperlukan di seluruh negeri, khususnya di kawasan 3T. Setiap tahun, Bidang Kemaslahatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Mitra Kemaslahatan, untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan tujuan yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, Program Kemaslahatan berhasil meningkatkan dukungan terhadap program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui implementasi keenam ruang lingkup kegiatan Kemaslahatan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana kami hanya mendukung 12 dari 17 tujuan SDGs, dan untuk tahun 2023, kami berhasil memperluas dukungan kami menjadi 14 tujuan SDGs. Dukungan ini mencakup tujuan SDGs yang luas, seperti Penghapusan Kemiskinan, Pengentasan Kelaparan, Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan, Pendidikan Berkualitas, Akses Air Bersih dan Sanitasi, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur, Industri, dan Inovasi, Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, Perdamaian, Keadilan, dan Kekuatan Institusi, serta Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Seperti yang diuraikan dalam bagian Menyalurkan Nilai Manfaat, sebanyak 37 provinsi di Indonesia telah merasakan dampak positif dari beragam kegiatan yang kami jalankan pada tahun 2023. Kegiatan tersebut meliputi layanan haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, peningkatan sarana dan prasarana ibadah, serta tanggap bencana. Melalui upaya ini, kami berhasil meningkatkan kenyamanan beribadah umat, mendukung peningkatan pendidikan, meningkatkan akses kesehatan, dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

In an effort to create a sustainable impact, we carry out various Benefit Program activities focused on six defined scopes. These include job creation, local economic empowerment, skills development, as well as philanthropic activities in the health, education and da'wah sectors.

Collaboration with Benefit Program Partners strengthens the implementation of the Benefit Program activities. In 2023, through the implementation of the seven scopes of Benefit Program activities, the program succeeded in increasing support for the Sustainable Development Goals (SDGs) and delivering significant positive impacts. With coverage in 37 Indonesian provinces, we provide the necessary support across the country, particularly in the 3T areas. Every year, the Benefit Program Division conducts a thorough evaluation on implementation of the Benefit Program Partner activities to ensure effectiveness and alignment with set goals.

In 2023, the Benefit Program succeeded in increasing support for the Sustainable Development Goals (SDGs) program through the implementation of the six scopes of benefit program activities. Compared to the previous year, where we only supported 12 out of 17 SDGs goals, we successfully expanded our support to 14 SDGs goals in 2023. This support covers a broad range of SDGs goals, including No Poverty, Zero Hunger, Good Health and Well-being, Quality Education, Access to Clean Water and Sanitation, Decent Work and Economic Growth, Industry, Innovation and Infrastructure, Sustainable Cities and Communities, Peace, Justice, and Strong Institutions, as well as Partnerships for the Goals.

As outlined in the Distribution of Return Value section, various activities we conducted in 2023 have positively impacted 37 Indonesian provinces. These activities include Hajj services, education and da'wah, health, socio-religious matters, ummah's economy, and improvement of praying facilities and infrastructure, as well as disaster relief. Through these efforts, we have successfully improved the comfort of praying for ummah, supported the improvement of education, increased access to healthcare, and helped improve the overall welfare of the community.



Rantai Kemaslahatan Umat

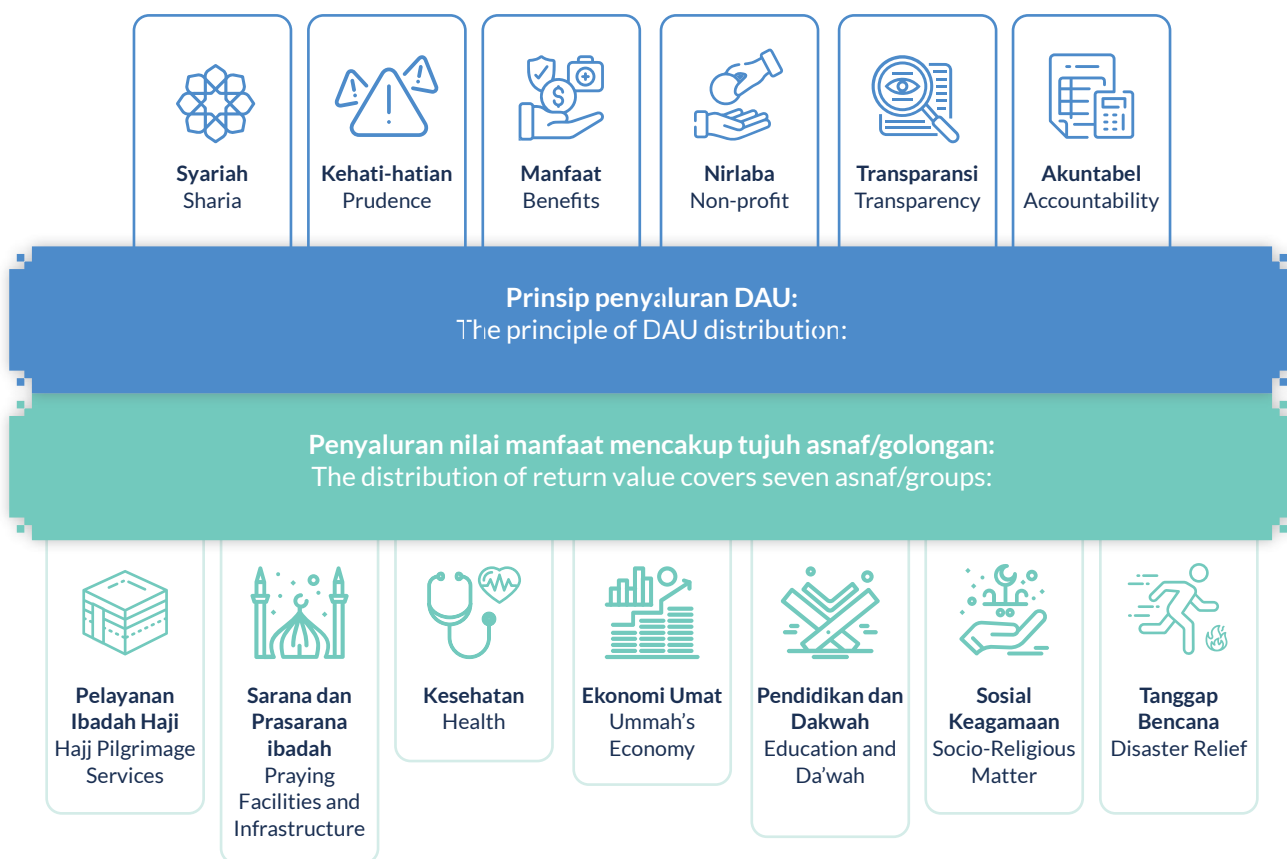
The Chain of Ummah's Benefit Program

Sementara kami berupaya maksimal dalam memberikan dampak positif, kami juga memperhatikan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan, terutama terkait keselamatan dan kesehatan masyarakat. Potensi dampak ini dapat terjadi, misalnya, jika infrastruktur yang dibangun tidak memenuhi standar keamanan, atau bantuan makanan yang disalurkan tidak memenuhi syarat kesehatan. Untuk mengantisipasi hal ini, Bidang Kemaslahatan telah mengambil tindakan pencegahan dengan mewajibkan mitra Kemaslahatan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mendukung keselamatan dan keamanan penerima manfaat.

Dukungan yang semakin meningkat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah Penerima Manfaat Program Kemaslahatan di masyarakat. Mereka berasal dari berbagai latar belakang usia, gender, dan demografi, menciptakan keberagaman yang menginspirasi dalam mencapai tujuan SDGs.

While we do our best to deliver positive impacts from the implementation of Benefit Program activities, we are also aware of the potential negative impacts that may arise, particularly related to public safety and health. This potential negative impact can occur, for example, if the built infrastructure does not meet safety standards, or if the distributed food aid does not meet health requirements. To address this, the Benefit Program Division has taken precautionary measures by requiring Benefit Program Partners to ensure that every implemented activity supports the beneficiaries' safety and security.

The increasing support for the Sustainable Development Goals (SDGs) is also mirrored by a growth in the number of Benefit Program's Beneficiaries in the community who come from different age, gender, and demographic backgrounds, creating an inspiring diversity in achieving the SDGs.





PELAYANAN IBADAH HAJI

BPKH memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023/1444 H dengan mengelola dana sebesar 166,7 triliun rupiah. BPKH berkomitmen untuk memberikan manfaat optimal bagi jamaah haji dengan membantu merasionalisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang terus meningkat. Selain itu, BPKH juga mendukung kuota tambahan sebanyak 8.000 jamaah dari Kerajaan Arab Saudi. Pada tahun 2023, program kemaslahatan pelayanan ibadah haji mencakup berbagai inisiatif:

1. Souvenir Haji 2023

Program Kemaslahatan BPKH mendukung kenyamanan jamaah haji di Tanah Suci dengan menyediakan 50% kebutuhan souvenir ibadah, seperti batik, kain ihram untuk jamaah laki-laki, dan mukena untuk jamaah perempuan, yang disalurkan melalui bank syariah. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga mengenalkan penyaluran nilai manfaat BPKH kepada umat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji.

2. Hibah Kendaraan Operasional

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan sosialisasi program haji dan umrah, Program Kemaslahatan BPKH menyerahkan enam unit kendaraan operasional kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama di Kabupaten Kulon Progo, DKI Jakarta, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Siak, Kabupaten Malang, dan Kota Padang. Kendaraan ini akan digunakan untuk mendukung

HAJJ SERVICES

By managing funds amounting to 166,7 trillion rupiah, BPKH provides full support for the implementation of the Hajj pilgrimage in 2023/1444 H. BPKH is committed to delivering optimal benefits for hajj pilgrims by helping to rationalize the ever-increasing Hajj Pilgrimage Operational Cost (BPIH). BPKH also received support from the Kingdom of Saudi Arabia with an additional quota of 8,000 pilgrims. In 2023, the Hajj service benefit program includes these various initiatives:

1. Hajj Souvenir 2023

The BPKH Benefit Program supports the comfort of hajj pilgrims in the Holy Land by providing 50% needs of the praying souvenir, which is distributed through sharia banks. These needs include batik, ihram cloth for male pilgrims, and mukena for female pilgrims. This initiative not only increases comfort, but also introduces the distribution of BPKH's return values to the ummah, while strengthening public trust in Hajj funds management.

2. Operational Vehicle Donation

To improve services and socialization of the Hajj and Umrah programs, the BPKH Benefit Program donated six units of operational vehicles to the Regional Offices of the Ministry of Religious Affairs in Kulon Progo Regency, DKI Jakarta, Cilacap Regency, Siak Regency, Malang Regency, and Padang City. These vehicles will be used to facilitate the transportation of prospective



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

transportasi calon dan jamaah haji, serta menjangkau hingga pelosok wilayah untuk pendaftaran dan sosialisasi program secara lebih efektif.

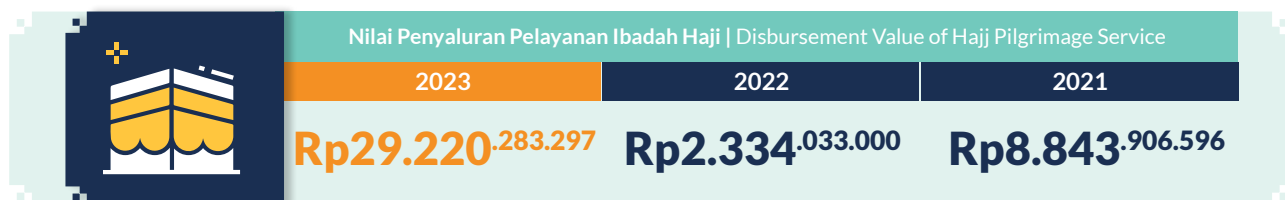
3. Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Aceh

BPKH berupaya memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Provinsi Aceh. Diharapkan gedung ini dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan bagi para jamaah khususnya dalam proses birokrasi.

haji pilgrims and hajj pilgrims, as well as to better reach out remote areas for effective registration and program socialization.

3. Construction of Integrated Hajj and Umrah Service Center (PLHUT) in Aceh

Umrah Service Center (PLHUT) in Aceh
BPKH strives to provide better services to the community through the construction of an Integrated Hajj and Umrah Service Center (PLHUT) in Aceh Province in order to accelerate and facilitate services for pilgrims, especially in the bureaucratic process.



Kegiatan Ruang Lingkup Pelayanan Ibadah Haji

Activities of Hajj Pilgrimage Service Scope

Kegiatan Activities	Jumlah Penerima Manfaat Number of Beneficiaries	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Suvenir Haji 2023 2023 Hajj Souvenirs	101.396 Jamaah haji 101,396 Hajj Pilgrims	101.396 Jamaah haji 101,396 Hajj Pilgrims	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Hibah Kendaraan Operasional Operational Vehicle Donation	6 (enam) unit kendaraan operasional kepada 6 Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) di Kabupaten Kulon Progo, DKI Jakarta, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Siak, Kabupaten Malang, dan kota Padang. 6 (six) units of operational vehicles to 6 Regional Offices of the Ministry of Religious Affairs (Kanwil Kemenag) in Kulon Progo Regency, DKI Jakarta, Cilacap Regency, Siak Regency, Malang Regency, and Padang city.	14.550 Jiwa 14,550 People	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Aceh Construction of Integrated Hajj and Umrah Service Center (PLHUT) in Aceh	1 Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) di Acehs 1 Regional Office of the Ministry of Religious Affairs (Kanwil Kemenag) in Aceh	257.635 Jiwa 257,635 People	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

Suvenir Haji Hajj Souvenirs



Pada tahun 2023, Kementerian Agama RI sukses memberangkatkan sekitar 229.000 jamaah Haji, yang terdiri dari 221.000 kuota Haji Reguler dan 8.000 kuota Haji Tambahan. Untuk mendukung jamaah Haji Indonesia tahun ini, BPKH bermitra dengan BSI Maslahat, yang ditunjuk sebagai Mitra Kemaslahatan dalam pengadaan souvenir Haji. Dengan alokasi dana sebesar Rp23 Miliar, BPKH menyediakan perlengkapan Haji berupa kain ihram, mukena, dan pakaian batik bagi para peserta Haji.

Approximately 229,000 Hajj pilgrims, consisting of 221,000 Regular Hajj quotas and 8,000 Additional Hajj quotas have been successfully departed by the Indonesian Ministry of Religious Affairs in 2023. To support this year's Indonesian Hajj pilgrims, BPKH partnered with BSI Maslahat, which was appointed as a Benefit Program Partner in the procurement of Hajj souvenirs. BPKH provides Hajj pilgrims with equipment in the form of ihram clothing, mukena, and batik clothes with Rp23 billion of total fund allocation.



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Jumlah penerima manfaat

Number of Beneficiaries

		2023	2022	2021
Jenis Kelamin Gender	Laki-Laki Men	182.936 Jiwa 182,936 People	4.642 Jiwa 4,642 People	Belum dilakukan perhitungan penerima manfaat The beneficiary impact assessment has not yet been conducted.
	Perempuan Women	190.645 Jiwa 190,645 People	4.546 Jiwa 4,546 People	
Jumlah Total		37.358 Jiwa 37,358 people	9.188 Jiwa 9,188 People	
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old	136.103 Jiwa 136,103 People	4.456 Jiwa 4,456 People	
	30-50 Tahun 30-50 Years old	136.618 Jiwa 136,618 People	2.740 Jiwa 2,740 People	
	>50 tahun >50 years old	100.860 Jiwa 100,860 People	1.992 Jiwa 1,992 Jiwa	
Jumlah Total		373.581 Jiwa 373,581 People	9.188 Jiwa 9,188 People	
Daerah 3T 3T Areas	3T	0 Jiwa 0 People	0 Jiwa 0 People	
	Non-3T	373.581 Jiwa 373,581 People	9.188 Jiwa 9,188 People	

ROADMAP RUANG LINGKUP PELAYANAN IBADAH HAJI

Dalam konteks pelayanan ibadah haji, Program Kemaslahatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji di seluruh tahapan, mulai dari persiapan sebelum keberangkatan hingga setelah kembali dari ibadah. Ini mencakup dukungan penuh untuk pelayanan haji di dalam dan di luar negeri, termasuk penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan penyediaan sarana-prasarana ibadah yang memadai.

Pada tahun 2023, kegiatan Program Kemaslahatan yang terfokus pada ruang lingkup Pelayanan Haji masih menitikberatkan pada upaya penguatan infrastruktur, terutama dalam meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Setiap tahun, Bidang Kemaslahatan menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Agama untuk menetapkan program prioritas yang sesuai. Pada tahun tersebut, salah satu program prioritas yang diidentifikasi adalah mendukung upaya digitalisasi dalam proses pendaftaran haji yang dikelola oleh Pemerintah.

ROADMAP OF HAJJ PILGRIMAGE SERVICE SCOPE

In the context of Hajj services, the Benefit Program aims to improve the quality of services for hajj pilgrims at all stages, from pre-departure preparation to post-pilgrimage. This includes full support for Hajj services in the country and abroad, including organizing Hajj Manasik and providing decent praying facilities.

In 2023, the Benefit Program activities focused on the Hajj Services scope still prioritize efforts to strengthen infrastructure, particularly in improving services for Indonesian hajj pilgrims. Annually, the Benefit Program Division works in close coordination with the Ministry of Religious Affairs to establish appropriate priority programs. During the year, one of the identified priority programs was to support digitalization efforts in the Government-managed Hajj registration process.

 Sasaran Primer Primary Objective	 Sasaran Sekunder Secondary Objective	 Sasaran Tersier Tertiary Objective
Mengurangi indirect cost dalam pelayanan haji. Reducing indirect costs in Hajj services.	Meningkatkan kualitas haji jangka panjang, Improving the quality of Hajj in the long-term	Kemaslahatan umat secara umum. The welfare of the ummah in general.

PENDIDIKAN DAN DAKWAH

Pada tahun 2023, program Kemaslahatan BPKH dalam bidang Pendidikan dan Dakwah bertujuan untuk memperkuat kualitas pendidikan dan dakwah bagi umat di Indonesia. Dukungan yang diberikan meliputi bantuan sarana prasarana pendidikan serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pengelola masjid. Selain itu, program ini juga mencakup biaya perjalanan ibadah bagi para aktivis dakwah dan marbot masjid. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Upaya kegiatan kemaslahatan pada ruang lingkup pendidikan dan dakwah pada tahun 2023 mencakup:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam upaya berkelanjutan untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, Program Kemaslahatan BPKH secara rutin menyediakan bantuan hibah untuk mendukung pembangunan fisik lembaga pendidikan. Setiap tahun, kegiatan pembangunan fisik tetap menjadi fokus utama, mengingat skala dan kompleksitasnya yang membutuhkan investasi finansial yang signifikan.

Pada tahun ini, Program Kemaslahatan berhasil meraih capaian signifikan dengan menyelenggarakan total 64 inisiatif pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia. Inisiatif tersebut secara khusus menitikberatkan pada pembangunan ruang kelas untuk pondok pesantren, sekolah dasar, sekolah diniyah, dan lembaga pendidikan lainnya di sejumlah provinsi.

Selain itu, upaya pembangunan fisik juga meliputi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta peningkatan fasilitas di pondok pesantren, termasuk asrama, gedung serbaguna, ruang kelas, dan aula. Tidak

EDUCATION AND DA'WAH

In 2023, BPKH's Benefit program aims to strengthen the quality of education and da'wah for the Indonesian ummah in the field of Education and Da'wah. The provided support includes assistance for educational infrastructure as well as increasing the competency of educators and mosque caretakers. In addition, this program also covers the cost of pilgrimage trips for da'wah activists and mosque caretakers. The efforts of benefit program activities in the scope of education and da'wah in 2023 include:

1. Construction of Educational Facilities and Infrastructure

The BPKH Benefit Program routinely offers donation assistance to support the physical development of educational institutions as part of a sustainable effort to strengthen educational infrastructure. Physical development activities remain as the main focus for each year, given their scale and complexity that require significant financial investment.

This year, the Benefit Program successfully made significant achievements by organizing a total of 64 initiatives to build educational facilities and infrastructure in Indonesia's various regions. Building classrooms for Islamic boarding schools, elementary schools, diniyah schools, and other educational institutions in multiple regions was the specific focus of the initiatives.

Furthermore, physical development efforts also include the development of Early Childhood Education (ECE) as well as improving facilities at Islamic boarding schools, such as dormitories, multipurpose buildings, classrooms,



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

hanya itu, kami juga memberikan bantuan pembangunan sumur bor untuk mendukung keberlanjutan pendidikan di satu madrasah diniyah dan dua pondok pesantren di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

2. Bantuan Sarana Pendidikan

Dalam kemitraan yang erat dengan berbagai mitra kemaslahatan, BPKH telah berperan aktif dalam menyediakan fasilitas baru yang mendukung kegiatan santri di sejumlah pondok pesantren, meliputi ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, dan ruang masjid. Upaya ini tidak hanya memperkuat infrastruktur pendidikan, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen BPKH dalam menyebarkan nilai-nilai Islam melalui pendidikan dan dakwah. Melalui program pembangunan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pribadi santri dan santriwati, khususnya di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlul, untuk menjadi individu Muslim yang berdaya, yang mampu mengembangkan potensi rohani dan jasmaninya.

3. Beasiswa

Program Kemaslahatan juga melanjutkan inisiatif beasiswa untuk mendukung mahasiswa berprestasi namun kurang mampu, yang tersebar di tiga lokasi berbeda, yakni Provinsi Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Penyaluran beasiswa ini dilakukan melalui program Beasiswa Santri Provinsi Sumatera Utara, yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa hambatan finansial yang signifikan.

4. Renovasi Sarana Pendidikan

Penting untuk mencatat bahwa kondisi belajar-mengajar di berbagai lembaga pendidikan di tanah air masih memerlukan perhatian serius. Program Kemaslahatan dengan tekun memberikan dukungan melalui bantuan renovasi sarana dan prasarana pendidikan. Langkah-langkah ini mencakup berbagai proyek renovasi, seperti pembaharuan fasilitas pondok pesantren, ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah, serta peremajaan ruang perpustakaan di SMP Muhammadiyah. Dengan upaya ini, kami berharap dapat memperbaiki kondisi belajar-mengajar, menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif.

and halls. In order to maintain the sustainability of education in one madrasah diniyah and two Islamic boarding schools in Cianjur Regency, West Java, we also helped with the construction of borewells.

2. Educational Facilities Assistance

BPKH is actively building new classrooms, libraries, teacher offices, and mosques to support students' activities at several Islamic boarding schools. This work is being done in close partnership with other benefit program partners. This effort not only strengthens educational infrastructure, but is also part of BPKH's commitment to spreading Islamic values through education and da'wah. We hope that this development program will significantly contribute to students' personal growth, especially at Fadhlul Fadhlul Islamic Boarding School, allowing them to become empowered Muslim individuals who are able to develop their spiritual and physical potential.

3. Scholarship

The Benefit program continues the scholarship initiative to support outstanding but underprivileged students from three different locations, East Java Province, West Sumatra, and North Sumatra. These scholarships are awarded under the North Sumatra Province Santri Scholarship program, which gives students access to higher education without significant financial limitations.

4. Renovation of Educational Facilities

It is important to highlight that there is still much work to be done to improve the teaching and learning conditions in the nation's various educational institutions. The Benefit program diligently offers support through assistance in renovating educational facilities and infrastructure. These measures include various renovation projects, such as remodeling Islamic boarding school facilities, Madrasah Ibtidaiyah classrooms, as well as library space at Muhammadiyah Junior High School. We hope these efforts will improve teaching and learning conditions, creating a more conducive learning environment.

5. Hibah Kendaraan Operasional

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat layanan pendidikan dan dakwah di berbagai wilayah, Program Kemaslahatan aktif memberikan bantuan hibah kendaraan operasional. Ini termasuk pengadaan satu bus sekolah untuk Yayasan Al Mu Miftahul Ulum di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, serta tujuh mobil operasional untuk mendukung kegiatan dakwah dan layanan pondok di Pondok Pesantren yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

5. Operational Vehicle Donation

The Benefit Program actively offers operational vehicle donation as part of ongoing efforts to strengthen education and da'wah services in various regions. This includes the procurement of one school bus for Al Mu Miftahul Ulum Foundation in Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province, as well as seven operational cars to support da'wah activities and dormitories services at Islamic Boarding Schools located in West Java Province, Jakarta Special Region, Gorontalo, Central Java, and East Java.



Kegiatan Ruang Lingkup Pendidikan dan Dakwah

Activities of Education and Da'wah Scope

Bentuk Kegiatan Form of Activity	Jumlah Bantuan Amount of Assistance	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Construction of Educational Facilities and Infrastructure	61 Lembaga pendidikan 61 Educational institutions	13.701 Peserta didik 13,701 Students	4 QUALITY EDUCATION 6 CLEAN WATER AND SANITATION
Bantuan Sarana Pendidikan Educational Facilities Assistance	26 Lembaga pendidikan 26 Educational institutions	14.496 Peserta didik 14,496 Students	4 QUALITY EDUCATION
Beasiswa Scholarship	Sebesar Rp853.614.500 Amounted to Rp853,614,500	633 Peserta didik 633 Students	4 QUALITY EDUCATION
Renovasi Sarana Pendidikan Renovation of Educational Facilities	12 Lembaga pendidikan 12 Educational institutions	3.832 Peserta didik 3,832 Students	4 QUALITY EDUCATION
Hibah Kendaraan Operasional Operational Vehicle Donation	9 Unit kendaraan 9 Vehicle units	4.416 Jiwa 4,416 People	4 QUALITY EDUCATION



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Bersama BPKH Wujudkan Peningkatan Syiar Islam melalui Pembangunan Sarana Pendidikan

BPKH Realizes the Improvement of Islamic Preaching through the Construction of Educational Facilities



BPKH melalui kemitraan dengan Baitulmal Muamalat (BMM). Dalam sebuah acara simbolis, Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N Nazaroedin, secara resmi menyerahkan bantuan di Ponpes Fadhlul Fadhlhan, Semarang, Jawa Tengah, kepada penerima manfaat. Melalui program ini, BPKH berkontribusi pada pembangunan gedung sekolah MI Almusyaffa di Ponpes Fadhlul Fadhlhan, Kota Semarang.

Firmansyah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana pendidikan adalah wujud nyata syiar agama Islam. Dengan adanya program pembangunan ini, diharapkan dapat membantu Santri dan Santriwati khususnya pada pondok pesantren Fadhlul Fadhlhan agar dapat menjadi sarana dalam membentuk kepribadian Muslim yang mampu mengembangkan potensi rohani dan jasmani mereka sehingga tercipta sumber daya manusia unggul untuk penerus bangsa Indonesia.

Partnering with Baitulmal Muamalat (BMM), the Chairman of the BPKH Supervisory Board, Firmansyah N Nazaroedin, officially handed over the assistance to the beneficiaries at Fadhlul Fadhlhan Islamic Boarding School, Semarang, Central Java through a symbolic event. Through this program, BPKH contributed to the construction of MI Almusyaffa School building in Fadhlul Fadhlhan Islamic Boarding School, Semarang City.

In his remarks, Firmansyah said that assistance through educational infrastructure procurement is a tangible manifestation of Islamic preaching. This development program is expected to help Students, especially those at the Fadhlul Fadhlhan Islamic boarding school, to develop themselves as Muslim individuals who are capable of reaching their full spiritual and physical potential, thus creating superior human resources for Indonesia's future.

Jumlah penerima manfaat

Number of Beneficiaries

		2023	2022	2021
Jenis Kelamin Gender	Laki-Laki Men	22.110 Jiwa 22,110 People	25.967 Jiwa 25,967 People	Belum dilakukan perhitungan penerima manfaat The beneficiary impact assessment has not yet been conducted.
	Perempuan Women	18.334 Jiwa 18,334 People	25.364 Jiwa 25,364 People	
	Jumlah Total	40.444 Jiwa 40,444 People	51.331 Jiwa 51,331 People	
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old	36.386 Jiwa 36,386 People	32.151 Jiwa 32,151 People	
	30-50 Tahun 30-50 Years old	3.260 Jiwa 3,260 People	12.289 Jiwa 12,289 People	
	>50 tahun >50 years old	798 Jiwa 798 People	6.891 Jiwa 6,891 People	
	Jumlah Total	40.444 Jiwa 40,444 People	51.331 Jiwa 51,331 People	
Daerah 3T 3T Areas	3T	50 Jiwa 50 People	0 Jiwa	
	Non-3T	40.394 Jiwa 40,394 People	51.331 Jiwa 51,331 People	

ROADMAP RUANG LINGKUP PENDIDIKAN DAN DAKWAH

Ruang Lingkup Pendidikan dan Dakwah bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan umat Islam serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk dukungan untuk kegiatan yang berkaitan dengan syiar agama Islam dan pengadaan fasilitas dakwah. Pada tahun 2023, kegiatan Kemaslahatan dalam lingkup Pendidikan dan Dakwah telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam *roadmap*. Fokusnya sudah mulai bergeser ke sasaran sekunder, meskipun belum sepenuhnya. Tahun ini juga BPKH melanjutkan kebermanfaatannya dalam upaya menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dunia pendidikan Islam, dengan distribusi kegiatan hingga wilayah 3T.

ROADMAP OF EDUCATION AND DA'WAH SCOPE

The Scope of Education and Da'wah aims to develop and empower Muslims and provide educational facilities and infrastructure, including support for activities related to Islam's growth and the provision of da'wah facilities. In 2023, Benefit Program activities within the Education and Da'wah scope have been implemented in accordance with the roadmap's agenda, and the focus has begun to shift to secondary targets, although not yet fully implemented. This year, BPKH also continues its benefits in an effort to provide facilities and infrastructure that support the world of Islamic education by distributing activities to reach the 3T area.



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

 Sasaran Primer Primary Objective	 Sasaran Sekunder Secondary Objective	 Sasaran Tersier Tertiary Objective
Membangun karakter umat, khususnya pada pendidikan level anak usia dini untuk membangun sikap mental dan budi pekerti (akhlakul karimah). Building the ummah's character, especially at the early childhood education level to build noble mental attitudes and character (akhlakul karimah).	Membangun karakter masyarakat yang tangguh dan mandiri sesuai dengan karakter yang diamanahkan Islam. Building community characters that are resilient and independent that align with Islamic teaching.	Membangun program dakwah di daerah terluar dan terpencil serta daerah rawan akidah. Building da'wah programs in outermost and remote areas and areas with low aqeedah.

KESEHATAN

Dalam ruang lingkup kesehatan, Program Kemaslahatan BPKH terus mengembangkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Ini mencakup strategi pencegahan dan pengobatan penyakit, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga medis, serta program pemenuhan gizi. Selain itu, program ini juga fokus pada promosi gaya hidup sehat dan seimbang di kalangan masyarakat, dan hal lainnya yang seperti:

1. Hibah Kendaraan Ambulans

Melalui Program Kemaslahatan, BPKH telah memberikan sumbangan berupa mobil ambulans di sebelas provinsi, tersebar melalui berbagai lembaga seperti puskesmas, pemerintah daerah, klinik, poliklinik, universitas, masjid, pondok pesantren, yayasan, dan institusi lainnya yang menyelenggarakan layanan kesehatan di berbagai pelosok Nusantara. Dukungan ini bertujuan untuk memperluas aksesibilitas, meratakan distribusi layanan kesehatan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Program Operasi Katarak

Program Operasi Katarak Massal Gratis di Jawa Barat adalah bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan akses yang mudah bagi mereka yang menderita katarak namun tidak mampu untuk berobat. Melalui program ini, kami berharap dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan operasi katarak.

HEALTH

In the scope of health, BPKH's Benefit Program continues to develop various activities to improve the overall quality of public health. This includes disease prevention and treatment strategies, procuring adequate medical facilities and infrastructure, improving the quality of medical personnel, as well as nutrition fulfillment programs. The program also focuses on promoting a healthy and balanced lifestyle among the community in addition to other things, such as:

1. Ambulance Vehicle Donation

BPKH has donated ambulance vehicles in eleven provinces through the Benefit Program. This donation is distributed to various institutions that provide health services throughout the archipelago such as health centers, local governments, clinics, polyclinics, universities, mosques, Islamic boarding schools, foundations, and others. This support aims to expand accessibility, equalize the distribution of health services, and increase service's effectiveness for all levels of society.

2. Cataract Operation Program

The Free Mass Cataract Surgery Program in West Java is part of our commitment to improve the community's health by providing easy access to those who suffer from cataracts but cannot afford treatment. This program is expected to provide easy access for people who need cataract surgery.

3. Pembangunan Kampung Haji BPKH, Sukabumi

Bekerja sama dengan DT Peduli, BPKH membangun Kampung “Haji” di Sukabumi sebanyak 129 rumah. Kampung ini diperuntukan untuk para penyintas bencana tanah bergerak di Sukabumi. Selain hunian, kampung ini akan dilengkapi dengan masjid dan taman BPKH yang meliputi miniatur ka'bah, hijr ismail, maqam Ibarahim, dan trek safa-marwah. Pembangunan ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkembang di bidang pariwisata serta ekonomi.

4. Pembangunan Klinik

Pada tahun 2023, Program Kemaslahatan meresmikan pembangunan Klinik Gratis bagi Dhuafa Yayasan Adiguna Bakti Nusantara di Kabupaten Boyolali serta Gedung Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit Islam Arafah YKM NU Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Langkah ini diharapkan akan membuka akses yang lebih luas terhadap fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat, memastikan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas dapat dijangkau oleh semua kalangan.

5. Hibah Alat Kesehatan

BPKH melalui Program Kemaslahatan berperan aktif dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu upaya nyata adalah melalui kerjasama dengan Lazismu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, yang telah menerima bantuan alat kesehatan untuk ruang operasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan (RSMBS).

3. BPKH Hajj Village Development in Sukabumi

BPKH collaborates with DT Peduli to build a 129-house in the “Hajj” Village in Sukabumi. This village will have houses as well as a mosque and a BPKH park which includes a miniature ka'bah, hijr ismail, maqam Ibarahim, and safa-marwah track. This development is expected to benefit while also developing tourism and the economy.

4. Clinic Construction

In 2023, the Benefit Program inaugurated the construction of the Adiguna Bakti Nusantara Foundation Free Clinic for Dhuafa in Boyolali Regency as well as the Outpatient Polyclinic Building of the Arafat Islamic Hospital YKM NU Rembang, Central Java Province. This move is expected to ensure that the entire community has greater access to medical facilities and quality health services.

5. Medical Equipment Donation

BPKH actively improves the accessibility and quality of health services in Indonesia through the Benefit Program. One of the concrete efforts is through cooperation with Lazismu of the Muhammadiyah Central Leadership (PP), which has received medical equipment assistance for the operating room at the South Bandung Muhammadiyah Hospital (RSMBS).





Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program



Kegiatan Ruang Lingkup Kesehatan

Activities of Health Scope

Bentuk Kegiatan Form of Activity	Jumlah Bantuan Amount of Assistance	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Pengadaan ambulans Form of Activity	20 Unit mobil ambulans 20 ambulance units	226.500 Jiwa 226,500 People	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
Program Operasi Katarak Cataract Surgery Program	100 Jiwa 100 people	100 Jiwa 100 People	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
Pembangunan Kampung Haji BPKH, Sukabumi BPKH Hajj Village Development in Sukabumi	129 Keluarga 129 Families	645 Keluarga 645 Families	1 NO POVERTY
Pembangunan klinik Clinic construction	Pembangunan 2 klinik di Jawa Tengah Construction of 2 clinics in Central Java	30.105 Jiwa 30,105 People	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
Hibah Alat Kesehatan Medical Equipment Donation	Hibah alat kesehatan senilai Rp2.214.580.000 di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan Medical equipment donation worth Rp2,214,580,000 at South Bandung Muhammadiyah Hospital	2.500 Jiwa 2,500 People	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
Seluruh Kegiatan di ruang lingkup ini All activities within this scope			17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

BPKH Gelar Operasi Katarak Gratis Untuk Masyarakat Jawa Barat BPKH Organized Cataract Surgery for the People of West Java



Bersama dengan mitra kemaslahatan, Baitulmaal Muamalat (BMM), BPKH telah mempersembahkan Program Kemaslahatan yang luar biasa dengan menyediakan layanan operasi katarak gratis. Melalui Program Operasi Katarak Massal Gratis di Jawa Barat. Dengan program ini, BPKH tidak hanya memberikan akses yang lebih mudah bagi mereka yang membutuhkan operasi, tetapi juga membawa harapan baru untuk kesehatan yang lebih baik.

Program Operasi Katarak Massal Gratis melibatkan serangkaian pemeriksaan dan screening. Tahapan operasi dimulai dengan pemeriksaan oleh dokter mata untuk mengidentifikasi adanya kondisi katarak pada pasien. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan tensi darah dan Gula Darah Sewaktu (GDS) untuk mengevaluasi kondisi kesehatan secara menyeluruh. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung proses operasi itu sendiri, tetapi juga berpengaruh pada penyembuhan pasca operasi

BPKH and Baitulmaal Muamalat (BMM), a benefit program partner, have launched a remarkable benefit program by delivering free cataract surgical procedures. Not only did BPKH provide easier access for those who need surgery through West Java's Free Mass Cataract Surgery Program, but we also gave them new hope.

The Free Mass Cataract Surgery Program involves several examinations and screenings. The first step in the surgical process is an ophthalmologist's examination to identify whether the patient has cataract problems. Next, blood pressure and blood sugar (GDS) tests are conducted to evaluate the overall patient's health condition. These steps not only support the surgery process itself, but also have an effect on post-operative healing.



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Jumlah penerima manfaat

Number of Beneficiaries

		2023	2022	2021
Jenis Kelamin Gender	Laki-Laki Men	119.977 Jiwa 119,977 People	227.497 Jiwa 227,497 People	
	Perempuan Women	149.776 Jiwa 149,776 People	222.968 Jiwa 222,968 People	
Jumlah Total		269.753 Jiwa 269,753 People	450.465 Jiwa 450,465 People	
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old	53.776 Jiwa 53,776 People	-	Belum dilakukan perhitungan penerima manfaat The beneficiary impact assessment has not yet been conducted.
	30-50 Tahun 30-50 Years old	86.280 Jiwa 86,280 People	-	
	>50 tahun >50 years old	129.697 Jiwa 129,697 People	-	
	Jumlah Total	269.753 Jiwa 296,753 People	450.465 Jiwa	
Daerah 3T 3T Areas	3T	0 Jiwa 0 People	-	
	Non-3T	269.753 Jiwa 296,753 People	-	

ROADMAP RUANG LINGKUP KESEHATAN

Ruang lingkup kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia. Program ini tidak hanya mencakup kegiatan reaktif tetapi juga proaktif, seperti dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana sanitasi serta pengadaan sumber air bersih.

Selama periode pelaporan, kegiatan Kemaslahatan dalam ruang lingkup kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan agenda *roadmap*. Fokus utama telah mulai diarahkan pada sasaran sekunder, dengan pencapaian yang signifikan. Salah satu upaya utama adalah peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit, klinik, dan poliklinik di berbagai wilayah Indonesia.

ROADMAP OF HEALTH SCOPE

The scope of health aims to improve the quality of public health, particularly for Indonesian Muslims. Both reactive and proactive activities, such as assistance in providing sanitation facilities and infrastructure as well as procuring clean water sources, are included in this program.

The Benefit Program's health-related activities have been implemented during the reporting period in accordance with the roadmap agenda. With notable success, the main focus has begun to be directed at secondary targets. One of the main efforts is to improve the quality of services in hospitals, clinics and polyclinics in various Indonesian regions.

 Sasaran Primer Primary Objective	 Sasaran Sekunder Secondary Objective	 Sasaran Tersier Tertiary Objective
Menjaga dan meningkatkan kesehatan calon jemaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji, melalui program preventif. Maintaining and improving the health of prospective hajj pilgrims before performing the Hajj pilgrimage through preventive programs.	Mendukung lembaga kesehatan untuk dapat melengkapi berbagai peralatan kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat luas. Supporting health institutions in their ability to equip various health equipment to improve health services to the wider community.	Mendukung peningkatan layanan kesehatan yang dibutuhkan komunitas masyarakat tertentu. Supporting the improvement of health services needed by certain communities.

SOSIAL KEAGAMAAN

Pada tahun 2023, program kemaslahatan BPKH dalam ruang lingkup sosial keagamaan menunjukkan fokus yang kuat dalam mendukung kegiatan sosial serta pelestarian lingkungan. Salah satu inisiatif utama adalah penanaman mangrove, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

1. Program Sedekah Kurban

BPKH menjalankan program kemaslahatan Sedekah Kurban 1444 H / 2023 M dengan menyalurkan sebanyak 1000 ekor sapi dan 1000 ekor kambing/domba di seluruh Indonesia. Untuk distribusi hewan kurban, BPKH menjalin kerja sama dengan sepuluh mitra kemaslahatan BPKH.

Sedekah Kurban 1444 H adalah inisiatif program BPKH yang memadukan konsep penyelenggaraan ibadah qurban dengan pemberdayaan ekonomi umat melalui sektor peternakan sapi, domba, dan kambing. Program ini telah menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BPKH sejak tahun 2020 hingga saat ini

Program Sedekah Kurban 1444 H diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi umat, dengan transformasi daging kurban menjadi berbagai produk olahan siap saji. Langkah ini bukan hanya sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat

SOCIO-RELIGIOUS MATTER

In the scope of socio-religious matters, BPKH's benefit programs in 2023 showed a strong focus on supporting social activities and environmental preservation. Mangrove planting is one of the main initiatives which provides benefits to both Muslims and the entire society.

1. Qurban Donation Program

For the year 1444 H / 2023 AD, BPKH organized a Qurban donation program, distributing 1000 cows and 1000 goats / sheep around Indonesia. Ten BPKH benefit program partners collaborate with BPKH to distribute Qurban animals.

Sedekah Kurban 1444 H is a BPKH program initiative that combines the concept of organizing qurban with the economic empowerment of the ummah through the cow, sheep and goat farming sector. From 2020 until now, this program has been part of BPKH's sustainable efforts.

By transforming qurban meat into various ready-to-eat processed products, the Sedekah Kurban 1444 H Program is expected to provide broad benefits for the ummah. In addition to being an effort to support the food security of the Indonesian people, particularly



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Indonesia, terutama di wilayah terpencil, terluar, tertinggal, dan terdampak bencana, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian BPKH dalam menyebarkan berkah kurban kepada seluruh masyarakat di Indonesia.

2. Program Safari Ramadhan 1444H

Pada bulan Ramadhan 1444 H, NU Care-LAZISNU dan BPKH menjalankan program distribusi bantuan yang merangkul masyarakat dari Sumatera hingga Papua. Sebanyak 6.000 mushaf Al-Qur'an, 1.500 peralatan shalat, dan 1.500 paket sembako telah disalurkan sebagai bentuk dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

Dengan total nilai bantuan mencapai Rp15.873.124.750 bersama 11 mitra kemaslahatan, termasuk NU Care-LAZISNU, program ini telah memberikan sumbangan yang signifikan. Bantuan tersebut disalurkan ke berbagai wilayah provinsi di Indonesia, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari jamaah masjid, majelis taklim, hingga kaum lansia dan anak-anak dengan kebutuhan khusus, serta mustahiq lainnya di daerah minoritas Muslim.

3. Program Balik Kerja

Dalam kerjasama dengan Mitra Kemaslahatan BPKH, Baitul Maal Muamalat (BMM), dan Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli), BPKH meluncurkan Program Balik Kerja Bareng BPKH 2023. Program ini memberikan kesempatan kepada pemudik balik untuk kembali bekerja dengan nyaman setelah menunaikan ibadah haji, dengan total kuota peserta sebanyak 2.650 orang. BPKH menyelenggarakan program ini dengan menyediakan moda transportasi, yakni 60 Bus Executive secara gratis, yang berangkat dari 3 titik keberangkatan utama, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

4. Program Khitan Massal

BPKH bersama mitra Kemaslahatan BMM menyelenggarakan program khitanan massal gratis untuk 1200 anak di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Khitanan massal kali ini dilakukan menggunakan metode sunat modern, yaitu super smartklamp tanpa jahitan dan perban. Selain itu, para peserta juga mendapatkan obat-obatan, sertifikat sunat, celana sunat, bingkisan, edukasi, dan kontrol pasca sunat.

in remote, outermost, underdeveloped, and disaster-affected areas, this step is also a tangible manifestation of BPKH's concern in spreading the blessings of qurban to all Indonesian people.

2. Ramadan Safari Program 1444H

Communities from Sumatra to Papua were included in an assistance distribution program that NU Care-LAZISNU and BPKH conducted during the month of Ramadan 1444 H. In order to help those in need, 6,000 Quran copies, 1,500 prayer kits, and 1,500 food packages were distributed.

This program has made a significant contribution, with the total value of assistance reaching Rp15,873,124,750 from 11 benefit program partners, including NU Care-LAZISNU. The assistance was distributed to various Indonesian provinces, benefitting all levels of society, from mosques pilgrims, taklim assemblies, to the elderly and children with special needs, as well as other mustahiq in Muslim minority areas.

3. Program Balik Kerja

The Balik Kerja Bareng BPKH 2023 Program was launched by BPKH in collaboration with its Benefit Program Partners, Baitul Maal Muamalat (BMM) and Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli). This program offers an opportunity for returning pilgrims, with a total 2,650 participants quota, to return to work comfortably following their Hajj pilgrimage. BPKH organizes this program by providing free transportation modes, namely 60 Executive Buses that depart from 3 main departure points, Central Java, East Java, and Yogyakarta.

4. Mass Circumcision Program

BPKH and Baitulmaal Muamalat (BMM), a benefit program Partner, organized a free mass circumcision program for 1200 children in Bandung and West Bandung Regencies. Super Smartklamp, a modern circumcision technique that requires no stitches and bandages, was used in this mass circumcision. In addition, the participants also received medicines, circumcision certificates, circumcision pants, gifts, education, and post-circumcision health control.

5. Hibah kendaraan operasional

Program Kemaslahatan berupaya memberikan dukungan kepada sejumlah organisasi sosial, termasuk lembaga amal zakat dan yayasan, dengan menyediakan hibah kendaraan operasional. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kinerja mereka dalam melayani umat.

6. Program Berbagi di Hari Santri

BPKH dan Baznas bekerja sama dalam meluncurkan program “Berbagi Bingkisan Hari Santri tahun 1445 H bersama BPKH”. Program ini tersebar di 14 Kota/Kabupaten dari 11 Provinsi. Tujuan dari program ini adalah sebagai bagian dari upaya syi’ar Program Kemaslahatan BPKH, dengan memberikan bingkisan yang tidak hanya membantu memenuhi gizi, tetapi juga menebarkan manfaat kepada para penerima manfaat.

7. Mobil Rescue

Sebagai inisiatif yang sangat penting, Program Kemaslahatan memberikan hibah kendaraan rescue dalam upaya untuk memberikan pertolongan pertama dalam menghadapi bencana atau musibah lainnya bagi masyarakat. Kendaraan ini menjadi sarana yang krusial dalam mempercepat respons dan bantuan kepada mereka yang terdampak.

8. Hibah Kendaraan Jenazah

Program Kemaslahatan turut mendukung pengadaan kendaraan jenazah untuk sejumlah organisasi, mengakui pentingnya fasilitas ini yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam segala situasi. Kendaraan tersebut bukan hanya menjadi sarana penting dalam proses pemulasaraan jenazah, tetapi juga sebagai sarana dan prasarana penting ketika terjadi bencana.

9. Pembangunan Gedung dan Penyediaan Fasilitas Gedung

Program Kemaslahatan memberikan dukungan pada aktivitas sosial masyarakat dengan melakukan pembangunan sejumlah gedung, seperti gedung Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) dan kantor sertifikasi halal. Selain melibatkan pembangunan fisik, program ini juga memberikan dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana kantor, serta sound system, yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan.

5. Operational vehicle donation

Through operational vehicle donation, the Benefit Program strives to support several social organizations, including amal zakat institutions and foundations. This step aims to strengthen their performance in serving the ummah.

6. Sharing Program on Santri Day

The “Berbagi Bingkisan Hari Santri tahun 1445 H bersama BPKH” program was launched in partnership between BPKH and Baznas. 14 cities/regencies from 11 provinces are involved in this program. This program’s goal is to support the BPKH Benefit Program’s effort. Among them is by providing gifts that not only benefit the beneficiaries, but also meeting their nutritional needs.

7. Car Rescue

As a very important initiative, the Benefit Program provides donations for rescue vehicles, allowing the community to receive first aid in the event of a disaster or other calamities. This vehicle is a crucial facility in accelerating response and providing aid to those affected.

8. Ambulance Donation

The Benefit program also supported the procurement of ambulances for several organizations since this facility is greatly needed by the community in all situations. Not only as important facilities in the funeral process, but ambulances are also an important infrastructure in the event of a disaster.

9. Construction and Provision of Building Facilities

The Benefit program provides support to the community’s social activities by constructing several buildings, including the Nahdlatul Ulama Deputy Branch Council (MWCNU) building and the halal certification office. Aside from involving physical construction, the program also provides support in the provision of office facilities and infrastructure, as well as sound systems, all of which are critical to improving the effectiveness and quality of services.



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program



Kegiatan Ruang Lingkup Sosial Keagamaan

Activities of Socio-Religious Matter Scope

Bentuk Kegiatan Form of Activity	Jumlah Bantuan Amount of Assistance	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Penanaman Mangrove Mangrove Planting	300 Pohon mangrove 300 mangrove trees	180 Jiwa 180 People	14 LIFE BELOW WATER
Program sedekah kurban Mangrove Planting	1.031 ekor sapi dan 808 ekor domba di 808 provinsi 1,031 cattle and 808 sheep in 36 provinces	40.933 Kepala Keluarga 40,933 Family Heads	2 ZERO HUNGER
Program Safari Ramadhan 1444H Qurban donation program	6.000 Mushaf Al-Qur'an, 1.500 peralatan shalat, dan 1.500 paket sembako. 6,000 copies of the Qur'an, 1,500 prayer kits, and 1,500 food packages.	104.208 Jiwa 104,208 People	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Program Balik Kerja Ramadan Safari Program 1444H	2.799 Jiwa 2,799 People	2.799 Jiwa 2,799 People	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Program Khitan Massal Balik Kerja Program	Senilai Rp909.406.541 Worth Rp909,406,541	1200 Anak 1200 Children	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
Hibah Kendaraan operasional Mass Circumcision Program	6 Kendaraan operasional untuk 6 lembaga 6 operational vehicles for 6 institutions	10.754 Jiwa 10,754 People	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
Program berbagi di hari santri Sharing program on santri day	40.000 Paket bingkisan hari santri 40,000 gift packages for santri day	40.000 Jiwa 40,000 People	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Mobil rescue Rescue cars	2 Mobil rescue untuk 2 lembaga 2 rescue cars for 2 institutions	3.450 Jiwa 3,450 People	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
Hibah Kendaraan Jenazah Ambulance Donation	7 Kendaraan jenazah untuk 7 lembaga 7 ambulances for 7 institutions	11.040 Jiwa 11,040 People	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Kegiatan Ruang Lingkup Sosial Keagamaan

Activities of Socio-Religious Matter Scope

Bentuk Kegiatan Form of Activity	Jumlah Bantuan Amount of Assistance	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Pembangunan Gedung dan penyediaan fasilitas gedung Building Construction and providing building facilities	Pembangunan dan renovasi gedung di 5 lokasi Construction and renovation of buildings in 5 locations	1.470 Jiwa 1,470 People	4 QUALITY EDUCATION 

BPKH Sediakan Ribuan Kuota Arus Balik 2023 pada Program Balik Kerja Bareng BPKH BPKH provides thousands of quotas for the 2023 return flow in the Balik Kerja Bareng BPKH program



Melalui program Balik Kerja Bareng BPKH 2023, BPKH memberikan akses gratis kepada pemudik dengan menyediakan 60 Bus Executive dari tiga titik keberangkatan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta pada tanggal 29 dan 30 April 2023.

Through the Balik Kerja Bareng BPKH 2023 program, BPKH provides free access to pilgrims by providing 60 Executive Buses from three departure points in Central Java, East Java, and Yogyakarta on 29 and 30 April 2023.

Program Balik Kerja Bareng BPKH 2023 menyediakan kuota untuk 2.650 pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Kolaborasi dengan Mitra Kemaslahatan BPKH, seperti Baitul Maal Muamalat (BMM) dan Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli), memperkuat pelaksanaan program ini. Selain sebagai wujud kepedulian BPKH terhadap para pemudik, program ini juga menjadi sarana syiar dan edukasi tentang BPKH serta perhajian. Program Balik Kerja Bareng BPKH 2023 mengoperasikan tiga titik keberangkatan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, dengan 60 Bus Executive yang dapat mengangkut total 2.650 orang, terbagi menjadi 1.450 pada hari pertama dan 1.200 pada hari kedua. Peserta akan menerima kaos dan souvenir saat keberangkatan, serta mendapatkan snack dan satu kali makanan. Tidak hanya itu, peserta juga dilengkapi dengan asuransi perjalanan, memastikan kenyamanan dan keamanan selama perjalanan.

The Balik Kerja Bareng BPKH 2023 program provides a quota for 2,650 pilgrims who will return to Jakarta. Collaboration with BPKH's Benefit Program Partners, such as Baitul Maal Muamalat (BMM) and Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli), strengthens the implementation of this program. Apart from being a form of BPKH's concern for pilgrims, this program is also a means of shiar and education about BPKH and pilgrimage. The Balik Kerja Bareng BPKH 2023 program operates three departure points in Central Java, East Java, and Yogyakarta, with 60 Executive Buses that can carry a total of 2,650 people, divided into 1,450 on the first day and 1,200 on the second day. Participants will receive t-shirts and souvenirs upon departure, as well as snacks and one meal. Not only that, participants are also equipped with travel insurance, ensuring comfort and safety during the trip.



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Jumlah penerima manfaat

Number of Beneficiaries

		2023	2022	2021
Jenis Kelamin Gender	Laki-Laki Men	211.347 Jiwa 211,347 People	96.222 Jiwa 96,222 People	
	Perempuan Women	215.325 Jiwa 215,325 People	94.259 Jiwa 94,259 People	
	Jumlah Total	190.481 Jiwa 190,481 People	190.481 Jiwa 190,481 People	
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old	106.414 Jiwa 106,414 People	90.298 Jiwa 90,298 People	Belum dilakukan perhitungan penerima manfaat The beneficiary impact assessment has not been conducted
	30-50 Tahun 30-50 Years old	181.896 Jiwa 181,896 People	56.812 Jiwa 56,812 People	
	>50 tahun >50 years old	138.362 Jiwa 138,362 Jiwa	43.292 Jiwa 43,292 People	
	Jumlah Total	426.672 Jiwa 426,672 People	190.481 Jiwa 190,481 People	
Daerah 3T 3T Areas	3T	1.314 Jiwa 1,314 People	9.700 Jiwa 9,700 Jiwa	
	Non-3T	425.358 Jiwa 425,358 People	180.781 Jiwa 180,781 People	

ROADMAP RUANG LINGKUP SOSIAL KEAGAMAAN

Kegiatan Kemaslahatan dalam ruang lingkup Sosial Keagamaan bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai Kemaslahatan umat, dengan fokus pada dukungan aktivitas masyarakat dan pemberdayaan umat Islam. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang signifikan, terutama bagi umat Islam di Indonesia.

Pada tahun 2023, kegiatan Kemaslahatan di ruang lingkup sosial keagamaan masih terfokus pada tahap awal, yaitu fase 1 atau sasaran primer yang mencakup penguatan infrastruktur Kemaslahatan. Program Kemaslahatan tetap mengutamakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, mengingat Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam. Selama tahun 2023, terjadi beberapa kejadian bencana yang memerlukan respons tanggap darurat, sehingga mendesaknya peran serta dan dukungan dalam menghadapi situasi darurat tersebut.

ROADMAP OF SOCIO-RELIGIOUS MATTER SCOPE

Benefit Program activities under the scope of Socio-Religious Matter, with a focus on supporting community activities and empowering Muslims, aims to increase community participation in achieving the welfare of the ummah. Additionally, this activity is also designed to provide significant benefits, especially for Indonesian Muslims.

In 2023, Benefit Program activities under the scope of socio-religious matter remain focused on the initial stage, namely phase 1 or primary objective which include strengthening infrastructure. Given Indonesia's vulnerability to natural disasters, the Benefit Program still prioritizes activities aimed at increasing preparation for disasters. Several disasters that required emergency response occurred in 2023, making it critical to participate and provide support in dealing with these emergency situations.

EKONOMI UMAT

Sejak diperkenalkan pada tahun 2020, program Kemaslahatan BPKH ruang lingkup Ekonomi Umat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan umat Islam. program ini terus melangkah maju dengan memperluas aksinya dalam mendorong kemandirian ekonomi umat. Melalui penyediaan sarana, prasarana, dan peralatan usaha yang dibutuhkan

1. Bantuan Alat Usaha

Program Kemaslahatan mendukung kelompok petani, peternak, nelayan, dan UMKM di berbagai daerah dengan menyediakan alat usaha yang vital seperti traktor, perahu nelayan, kandang ayam, dan alat produksi tekstil. Dengan bantuan ini, diharapkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kemajuan usaha.

2. Bantuan Modal Usaha

Pada tahun 2023, Program Kemaslahatan memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok masyarakat melalui pengadaan ternak ayam, kambing, sapi, serta modal usaha untuk UMKM. Program ini juga menyasar pondok pesantren sebagai Penerima Manfaat. Bantuan sarana prasarana dan peralatan usaha yang diberikan oleh Program Kemaslahatan diharapkan dapat menguatkan ekosistem ekonomi umat di pondok pesantren dan masjid. Dengan dukungan ini, institusi-institusi tersebut dapat lebih efektif menjalankan perannya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi. Mayoritas pondok pesantren mengembangkan usaha peternakan, yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi

3. Program Pemberdayaan Peternak Tangguh

BPKH melalui Program Pemberdayaan Peternak Tangguh memberikan dukungan kepada Kelompok Tani Flamboyan Pondok Pesantren Al Munir di Kabupaten Magelang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas kelompok tani serta pesantren, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak dan berfungsi sebagai *revenue center* bagi pesantren.

UMMAH'S ECONOMY

Since its introduction in 2020, BPKH's Benefit program under the scope of Ummah's Economy aims to reduce economic disparities among Muslims. By expanding its actions to support Ummah's economic independence through the provision of necessary business facilities, infrastructure, and equipment, this program keeps moving forward.

1. Business Equipment Assistance

The Benefit program supports groups of farmers, breeders, fishermen, and MSMEs in various regions by providing vital business tools such as tractors, fishing boats, chicken cages, and textile production tools. This assistance is expected to increase productivity and business progress.

2. Business capital assistance

Through the purchase of chickens, goats, cows, and business capital for MSMEs, the Benefit Program offered business capital support to community groups in 2023. This program also targets Islamic boarding schools as beneficiaries. It is expected that the Benefit Program's assistance for business infrastructure and equipment will strengthen the ummah's economic ecosystem in Islamic boarding schools and mosques. This support will allow these institutions to carry out their role as centers of community empowerment more effectively, especially in the economic sector. One of the efforts to increase economic independence by the majority of Islamic boarding schools is to develop livestock business.

3 Resilient Breeder Empowerment Program

BPKH's Resilient Farmers Empowerment Program offers support to the Flamboyant Farmers Group of Al Munir Islamic Boarding School in Magelang Regency. In order to boost farmer income and serve as a revenue source for Islamic boarding schools, this program strives to improve the capacity and productivity of farmer groups and Islamic boarding schools.



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

4. Pelatihan UMKM

BPKH berkolaborasi dengan Yayasan Mulia Kreasi Bangsa di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk menghadirkan Program Pelatihan UMKM 2023. Program ini dihadiri oleh 135 peserta pelatihan UMKM dengan berbagai jenis usaha. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta dapat meningkatkan kapasitas diri dan mengembangkan usahanya.

4. MSME Training

The 2023 MSME Training Program was launched by BPKH in collaboration with Mulia Kreasi Bangsa Foundation in Central Jakarta, DKI Jakarta Province. 135 MSME training participants from various business backgrounds who attended this program are expected to increase their capacity and develop their business.



Kegiatan Ruang Lingkup Ekonomi Umat

Activities of People's Economy Scope

Bentuk Kegiatan Form of Activity	Jumlah Bantuan Amount of Assistance	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Bantuan alat usaha Business equipment assistance	Bantuan alat usaha di 5 lokasi Business equipment assistance in 5 locations	1.224 Orang 1,224 People	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
Bantuan modal usaha Business capital assistance	Bantuan modal usaha di 5 lokasi Business capital assistance in 5 locations	1.202 Orang 1,202 People	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
Program Pemberdayaan Peternak Tangguh Resilient Breeder Empowerment Program	4.994 Jiwa 4,994 People	4.994 Jiwa 4,994 People	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
Pelatihan UMKM MSMEs Training	2 UMKM 2 MSMEs	1.305 Jiwa 1,305 People	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

Inovasi Ekonomi Pesantren: Pembukaan Kios Haji Mart di Aceh Bersama BPKH dan NU Care-LAZISNU

Economic Innovation of Islamic boarding schools: Hajj Mart Kiosk Opening in Aceh with BPKH and NU Care-LAZISNU



Program Kemaslahatan NU Care-LAZISNU dan BPKH kembali menyalurkan bantuan berupa pengadaan kios Haji Mart untuk pondok pesantren. Setelah sebelumnya bantuan diberikan kepada Dayah atau Pesantren Raudhatul Sakinah di Aceh Besar, kali ini bantuan kios Haji Mart disalurkan kepada Yayasan Ar-Rabwah An-Najiyah di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

“Program Kemaslahatan kerja sama BPKH dan NU Care-LAZISNU PBNU akan terus meningkatkan peran dalam mendukung potensi sumber daya manusia yang ada, seperti para santri dan pengajar di dayah. Lewat bantuan dan kerja sama ini kami berharap kondisi perekonomian di pondok pesantren semakin berkembang dan maju,” kata H Muhammad Iqbal Lutfi, Kepala Unit Kerja Program Kemaslahatan NU Care-LAZISNU PBNU.

Once again, NU Care-LAZISNU and BPKH's Benefit program distributed assistance in the form of procurement of Hajj Mart kiosks for Islamic boarding schools. Thistime, Hajj Mart kiosk assistance was directed to the Ar-Rabwah An-Najiyah Foundation in Aceh Besar Regency, Aceh Province. Previously, the assistance was provided to Dayah or Raudhatul Sakinah Islamic Boarding School in Aceh Besar.

“The Benefit program, a collaboration between BPKH and NU Care-LAZISNU PBNU, will continue to increase its role in supporting the potential of current human resources, including students and teachers in dayah. We hope that the economic conditions in Islamic boarding schools will develop and advance through this assistance and collaboration” said H Muhammad Iqbal Lutfi, Head of the NU Care-LAZISNU PBNU Benefit Program Work Unit.



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Jumlah penerima manfaat

Number of Beneficiaries

		2023	2022	2021
Jenis Kelamin Gender	Laki-Laki Men	5.154 Jiwa 5,154 People	4.011 Jiwa 4,011 People	Belum dilakukan perhitungan penerima manfaat The beneficiary impact assessment has not been conducted
	Perempuan Women	3.571 Jiwa 3,571 People	3.909 Jiwa 3,909 People	
Jumlah Total		8.725 Jiwa 8,725 People	7.920 Jiwa 7,920 People	
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old	4.067 Jiwa 4,067 People	3.868 Jiwa 3,868 People	
	30-50 Tahun 30-50 Years old	3.802 Jiwa 3,802 People	2.348 Jiwa 2,348 People	
	>50 tahun >50 years old	856 Jiwa 856 People	1.704 Jiwa 1,704 People	
Jumlah Total		8.725 Jiwa 8,725 People	7.980 Jiwa 7,980 People	
Daerah 3T 3T Areas	3T	0 Jiwa 0 People	0 Jiwa 0 People	
	Non-3T	8.725 Jiwa 8,725 People	7.920 Jiwa 7,920 People	

ROADMAP RUANG LINGKUP EKONOMI UMAT

Ruang lingkup Ekonomi Umat dalam Program Kemaslahatan bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi.

Pada tahun 2023, kegiatan Kemaslahatan yang diselenggarakan dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan masih berfokus pada fase 1 atau sasaran primer sebagaimana ditetapkan dalam *roadmap*. Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan infrastruktur Kemaslahatan, dengan prioritas utama pada program-program yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan industri kecil

ROADMAP OF PEOPLE'S ECONOMY SCOPE

The scope of the Ummah's Economy in the Benefit Program aims to reduce poverty and unemployment through various economic empowerment programs.

In 2023, organized Benefit Program activities in the scope of socio-community continue to focus on phase 1 or primary objective as outlined in the roadmap. This activity focuses on strengthening infrastructure by prioritizing programs to boost the small industries' growth and income.

 Sasaran Primer Primary Objective	 Sasaran Sekunder Secondary Objective	 Sasaran Tersier Tertiary Objective
Meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan industri kecil yang berkaitan dengan haji. Increasing the growth and income of small Hajj-related industries.	Pembiayaan bergulir, cash collateral, jaminan agunan atau blended fund melalui kerjasama dengan perbankan syariah. People's Credit, cash collateral, loan or blended funds through cooperation with sharia banking.	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas umat Islam untuk mendukung kemandirian ekonomi. Increasing the Muslims' capacity and capability to boost economic independence.

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH

Dalam upaya meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat fungsi sosial masjid dan musholla sebagai pusat kegiatan umat, Program Kemaslahatan BPKH terus berperan aktif dalam pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan sarana serta prasarana. Tahun 2023 menjadi momentum penting di mana BPKH menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas sarana ibadah, memastikan masyarakat dapat beribadah dengan kenyamanan, serta meningkatkan kesejahteraan umat untuk memperkuat nilai-nilai dakwah dan pendidikan Islam di Indonesia.

1. Pembangunan Masjid dan Musholla

Program Kemaslahatan terus memberikan dukungan yang berarti dalam pembangunan masjid dan musholla di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, cakupan pembangunan masjid telah meluas ke 10 Provinsi, termasuk wilayah pedalaman yang terpencil seperti di Sorong Selatan, Papua Barat. Program ini menunjukkan komitmen BPKH dalam menjangkau daerah-daerah 3T.

2. Penyediaan Fasilitas Masjid

Program Kemaslahatan memberikan dukungan yang penting dalam penyediaan peralatan operasional untuk masjid dan musholla di seluruh Indonesia. Hibah yang disediakan mencakup peralatan *sound system* dan berbagai sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan.

3. Pemasangan Set Panel Surya

BPKH, bersama mitra kemaslahatan Lazismu, turut serta dalam upaya keberlanjutan energi bersih dengan pemasangan Set Panel Surya di Masjid dan Musholla

PRAYING FACILITIES AND INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

BPKH Benefit Program continues to actively participate in construction, rehabilitation, and provision of facilities and infrastructure in order to improve the quality of prayer and strengthen the social function of mosques and musallahs as centers of community activities. 2023 marks as the key momentum for BPKH, as we emphasize our commitment to support the improvement of the quality of praying facilities, ensuring that people can pray in comfort, and improving the welfare of the ummah to strengthen the values of Indonesian da'wah and Islamic education.

1. Mosque and Musallah Construction

Throughout Indonesia, mosques and musallahs continue to benefit greatly from the Benefit program. This year, the scope of mosque construction has expanded to 10 provinces, including remote areas such as South Sorong, West Papua. This program demonstrates BPKH's commitment in reaching 3T areas.

2. Provision of Mosque Facilities

The Benefit program offers important support in the provision of operational equipment for mosques and musallahs throughout Indonesia. Sound system equipment and various other necessary facilities and infrastructure are included in the donation.

3. Installation of Solar Panel Sets

Installing solar panel sets in mosques and musallahs in Elar District and Sambu Rampas District, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara (NTT), was one of BPKH



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

di Kecamatan Elar dan Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah ini dipilih sebagai proyek karena memiliki rasio elektrifikasi yang rendah.

and its partner Lazismu's clean energy sustainable efforts. Due to its low electrification ratio, this area was selected for the project.

4. Renovasi Masjid

Program Kemaslahatan memberikan bantuan renovasi masjid di berbagai wilayah di tanah air melalui hibah bahan material bangunan dan dana. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas masjid, sehingga memungkinkan umat untuk menjalankan ibadah dengan lebih nyaman.

4. Mosque Renovation

The Benefit program offers assistance for mosque renovations in various regions in the country through donation of building materials and funds. This assistance allows people to pray more comfortably by improving the mosque's quality and facilities.

5. Revitalisasi Mushola Terminal

BPKH bersama mitra Kemaslahatan Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengalokasikan bantuan Revitalisasi untuk 21 titik Masjid/Musholla terminal se-Jabodetabek dengan total program senilai Rp1.6 M. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui DMI sebagai mitra Kemaslahatan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas masjid dan musholla di wilayah Jabodetabek.

5. Revitalization of Terminal Mosque

With a total program value of Rp1.6 billion, BPKH and Benefit Program partners, the Indonesian Mosque Council (DMI) provided revitalization support for 21 terminal mosques/musallahs located around Jabodetabek. As a Benefit Program partner, DMI distributes this assistance that aims to improve the quality of the mosque and musallah facilities in the Jabodetabek area.

Oleh karena itu, Kemaslahatan BPKH tidak hanya memperhatikan pembangunan dan renovasi masjid/musholla, tetapi juga menyediakan sarana dan prasarana agar aktivitas ibadah dan kegiatan lainnya dapat berjalan dengan lancar. Dalam upaya tersebut, tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemberian bantuan kendaraan ambulans di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

As a result, the BPKH Benefit Program not only focuses on the construction and renovation of mosques / mushollas, but it also offers facilities and infrastructure to ensure that worship and other activities run smoothly. This effort does not only stop at physical development, but it also provides ambulance vehicle assistance in Gowa Regency, South Sulawesi.



Kegiatan Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana Ibadah

Activities in Praying Facilities and Infrastructure Scope

Bentuk Kegiatan Form of Activity	Jumlah Bantuan Amount of Assistance	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Pembangunan Masjid dan Musholla Mosque and Musallah Construction	Pembangunan 21 masjid di 11 provinsi Construction of 21 mosques in 11 provinces	11.534 Jamaah 11,534 Pilgrims	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
Penyediaan Fasilitas Masjid Provision of Mosque Facilities	Penyediaan fasilitas masjid di 151 masjid/musholla di 9 provinsi Provision of mosque facilities in 151 mosques/mushollas across 9 provinces	73.911 Jamaah 73.911 Pilgrim,	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

Pemasangan Set Panel Surya Installation of Solar Panel Seta	16 panel surya dengan daya listrik dihasilkan sebesar 16.000 watt per hari 16 solar panels generate a total of 16,000 watts of electricity per day	160 Jiwa 160 People	7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 
Renovasi Masjid Mosque Renovation	Renovasi terhadap 10 masjid di 7 provinsi Renovation of 10 mosques in 7 provinces	7.703 Jamaah 7,703 Pilgrims	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE 
Revitalisasi Musholla Terminal Revitalization of Terminal Mosque	21 Mesjid dan musholla 21 Mosques and musallahs	2.000 Jamaah 2,000 Pilgrims	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE 

NU Care-LAZISNU dan BPKH Bantu Pembangunan Masjid Agung Darul Ulum Keyen di Sorong Selatan NU Care-LAZISNU and BPKH Support the Construction of Darul Ulum Keyen Grand Mosque in South Sorong



NU Care-LAZISNU PBNU bekerja sama dengan BPKH melalui Program Kemaslahatan kembali menyalurkan bantuan di bidang keagamaan, yakni penyelesaian pembangunan Masjid Agung Darul Ulum Keyen di Kabupaten Sorong Selatan. Bantuan penyelesaian pembangunan masjid tersebut dapat memberikan fasilitas ibadah yang layak dan berstandar bagi seluruh jamaah Masjid Agung Darul Ulum Keyen Sorong Selatan.

“Kami NU Care-LAZISNU mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada BPKH yang telah mempercayai kami dalam proses penyelesaian pembangunan Masjid Agung Darul Ulum Keyen ini. Kami sebagai lembaga filantropi diamanahkan membantu BPKH dalam menyalurkan nilai manfaat dari dana abadi umat terutama untuk lima ashnaf, salah satunya yaitu pembangunan sarana prasana peribadatan,” ungkap Muhammad Iqbal Lutfi - Kepala Unit Kerja Program Kemaslahatan NU Care-LAZISNU PBNU.

Through the Benefit Program, NU Care-LAZISNU PBNU and BPKH collaborated to provide assistance in the religious field, namely the completion of the construction of the Darul Ulum Keyen Great Mosque in South Sorong Regency. The assistance to complete the mosque's construction allows all pilgrims of the Darul Ulum Keyen Great Mosque in South Sorong to have decent and standardized praying facilities.

“NU Care-LAZISNU would like to thank BPKH for trusting us in the process of completing the construction of the Darul Ulum Keyen Grand Mosque. Our responsibility as philanthropic institution is to assist BPKH in distributing the return value of the ummah trust funds, particularly for the five ashnaf, one of which is the construction of praying facilities,” said Muhammad Iqbal Lutfi - Head of the NU Care-LAZISNU PBNU Benefit Program Work Unit.



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Jumlah penerima manfaat

Number of Beneficiaries

		2023	2022	2021
Jenis Kelamin Gender	Laki-Laki Men	73.655 Jiwa 73,655 People	147.668 Jiwa 147,668 People	Belum dilakukan perhitungan penerima manfaat The beneficiary impact assessment has not yet been conducted
	Perempuan Women	21.653 Jiwa 21,653 People	144.696 Jiwa 144,696 People	
Jumlah Total		95.308 Jiwa 95,308 People	292.264 Jiwa 292,264 People	
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old	27.305 Jiwa 27,305 People	141.609 Jiwa 141,609 People	
	30-50 Tahun 30-50 Years old	41.961 Jiwa 41,961 People	87.230 Jiwa 87,230 People	
	>50 tahun >50 years old	26.042 Jiwa 26,042 People	63.447 Jiwa 63,447 People	
Jumlah Total		95.308 Jiwa 95,308 People	292.364 Jiwa 292,364 People	
Daerah 3T 3T Areas	3T	0 Jiwa 0 People	12.229 Jiwa 12,229 People	
	Non-3T	95.308 Jiwa 95,308 People	279.135 Jiwa 279,135 People	

ROADMAP RUANG LINGKUP SARANA DAN PRASARANA IBADAH

Ruang lingkup sarana dan prasarana ibadah bertujuan untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan ibadah umat Muslim. Upaya ini mencakup pemeliharaan, pengembangan, dan pembangunan berbagai fasilitas seperti masjid, mushalla, dan tempat ibadah lainnya.

Pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan di bidang sarana dan prasarana ibadah telah mencapai tahap 2 sesuai dengan agenda *roadmap* yang telah ditetapkan. Fase ini menitikberatkan pada sasaran sekunder dalam upaya meningkatkan layanan yang lebih baik kepada umat Muslim. Dari 4 agenda yang terdapat dalam tahap kedua, kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan mencakup donasi Al-Qur'an. Hal ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah dalam menjalankan ibadah serta mendukung dakwah yang lebih baik di tengah masyarakat.

ROADMAP OF PRAYING FACILITIES AND INFRASTRUCTURE SCOPE

The scope of praying facilities and infrastructure aims to ensure the availability of necessary facilities to support Muslim for praying. Maintenance, development, and construction of various praying facilities, such as mosques, musallahs, and others are included in this effort.

According to the established roadmap agenda, the implementation of Benefit Program activities in the field of praying facilities and infrastructure has reached phase 2 in 2023. This phase focused on the secondary objective in an effort to improve better services to Muslims. The Qur'an donation was one of the 4 agendas contained in the second phase that were put into practice during the reporting period as it is a critical step in improving the quality of services to pilgrims in praying and supporting better da'wah in the community.

 Sasaran Primer Primary Objective	 Sasaran Sekunder Secondary Objective	 Sasaran Tersier Tertiary Objective
Membantu pembangunan dan rehabilitasi masjid/ musholla, termasuk prasarana yang dibutuhkan, terutama di daerah rawan akidah, daerah terluar dan daerah tertinggal. Assisting in the construction and rehabilitation of mosques/ musallahs, including the necessary infrastructure, especially in areas with low faith, outermost areas and underdeveloped areas.	Merevitalisasi masjid/ musholla sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada jemaah untuk peribadahan dan mendukung dakwah. Revitalizing mosques/musallahs, allowing better services to the pilgrims in praying and supporting da'wah.	Menguatkan peran masjid/ musholla dalam peradaban Islam. Strengthening the role of mosques/musallahs in Islamic culture.

Tanggap Bencana

Disaster Relief

Program Kemaslahatan, melalui ruang lingkup Tanggap Bencana yang diselenggarakan oleh BPKH adalah tonggak penting dalam penggunaan dana haji untuk kemaslahatan umat, terutama saat menghadapi bencana alam atau krisis lainnya. Tujuan program ini adalah memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku.

Kegiatan Kemaslahatan tanggap bencana dapat dilaksanakan dalam situasi darurat ketika instansi yang berwenang, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, telah menetapkan status keadaan darurat akibat bencana alam atau non-alam.

The Benefit Program, through the scope of BPKH's Disaster Relief, is a key milestone in the use of Hajj funds for the welfare of the ummah, particularly during natural disasters or other crises. By upholding sharia principles and compliance with applicable regulations, this program aims to provide aid and support to affected communities.

The Benefit Program activity of disaster relief can be implemented in emergency situations when the authorized agency, be it the central or local government, has declared a state of emergency caused by a natural or non-natural disaster.



Rantai Kemaslahatan Umat

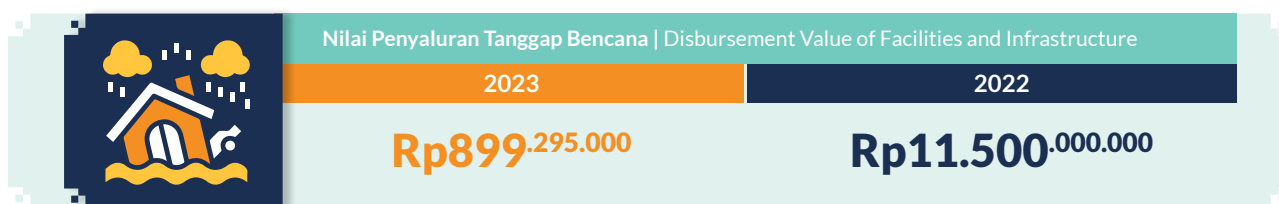
The Chain of Ummah's Benefit Program

Sepanjang tahun 2023, kegiatan Kemaslahatan dalam bidang tanggap bencana melibatkan empat wilayah yang tersebar di empat provinsi, yakni Papua, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Sumatra Barat. Dalam cakupan ini, pada saat terjadinya gempa bumi dengan kekuatan 5,4 SR di Kota Jayapura, BPKH turut memberikan bantuan kepada 375 Kepala Keluarga yang terdampak. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp373 juta.

Dalam satu momen lainnya, program Kemaslahatan BPKH ruang lingkup tanggap bencana turut bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan kepada korban terdampak bencana alam, seperti banjir dan longsor di Wilayah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dengan memberikan pengadaan bantuan berupa makanan siap saji, sembako, suplemen gizi serta layanan dukungan psikososial untuk warga terdampak.

Four provinces, Papua, Riau Islands, West Java and West Sumatra are four areas that are involved in the Benefit Program's activities in the field of disaster relief throughout 2023. In this scope, when an earthquake with a 5.4 Mw magnitude struck Jayapura City, BPKH has also provided aid to 375 affected families with total distributed assistance reaching Rp373 million.

In another moment, the BPKH's benefit program for the scope of disaster response also moved quickly to distribute aid to victims affected by natural disasters, such as floods and landslides in the Natuna Regency area of the Riau Islands Province by providing assistance in the form of ready-to-eat food, basic necessities, nutritional supplements and psychosocial support services for affected residents.



Kegiatan Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana Ibadah

Activities in Praying Facilities and Infrastructure Scope

Bentuk Kegiatan Form of Activity	Jumlah Bantuan Amount of Assistance	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Bantuan Korban Bencana Disaster Victim Assistance	Empat kegiatan bantuan korban bencana di 4 wilayah meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Four Disasters victim assistance activities in 4 areas including Jayapura City, Natuna Regency of Riau Islands Province, West Bandung Regency of West Java Province, and Tanah Datar Regency of West Sumatra Province.	6.050 Jiwa 6,050 People	1 NO POVERTY

Bantuan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kota Jayapura Bantuan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kota Jayapura



Untuk mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, penting untuk mengambil tindakan darurat yang cepat, tepat, dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan tanggap darurat. BPKH, bekerja sama dengan mitra kemaslahatan Rumah Zakat, memberikan bantuan kepada warga yang terdampak gempa bumi dengan magnitudo 5,4 SR di kota Jayapura pada 9 Januari 2023. Bantuan tersebut mencakup makanan siap saji, sembako, dan selimut senilai Rp373 Juta.

To anticipate the wider impact of disasters, it is critical to adopt quick, accurate, and integrated emergency actions in accordance with the standards and procedures for handling emergency response. BPKH, in collaboration with its partner Rumah Zakat, assisted residents who were affected by the 5.4 magnitude earthquake in Jayapura city on January 9, 2023. This assistance included ready-to-eat food, basic food packages, and blankets worth IDR 373 million.

Jumlah penerima manfaat

		2023
Jenis Kelamin Gender	Laki-Laki Men	2.475 Jiwa 2,475 People
	Perempuan Women	3.575 Jiwa 3,575 People
	Jumlah Total	6.050 Jiwa 6,050 People
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old	2.100 Jiwa 2,100 People
	30-50 Tahun 30-50 Years old	3.200 Jiwa 3,200 People
	>50 tahun >50 years old	750 Jiwa 750 People
	Jumlah Total	6.050 Jiwa 6,050 People
Daerah 3T 3T Areas	3T	0 Jiwa 0 People
	Non-3T	6.050 Jiwa 6,050 People



Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Dampak Ekonomi Tidak Langsung Program Kemaslahatan [GRI 3-3, SEOJK F.23]

Indirect Economic Impact of Benefit Program

Donasi Investasi Infrastruktur dan Dukungan Layanan BPKH [GRI 203-1]

BPKH'S Infrastructure Investments Donation and Services Support

Jenis Infrastruktur dan Layanan yang Didukung Types of Supported Infrastructure and Services	Dampak yang Dihasilkan Resulting Impact
Program Kemaslahatan berupa pembangunan fisik sarana dan prasarana ibadah (masjid/musholla), pembangunan sarana pendidikan (asrama ponpes, ruang kelas ponpes). The Benefit program is in the form of construction of praying facilities and infrastructure (mosques/musallahs), construction of educational facilities (boarding school dormitories, boarding school classrooms).	Terciptanya dampak ekonomi tidak langsung bagi masyarakat diantaranya bagi para pekerja (tukang), santri, usaha di sekitar lokasi yang mendapatkan dampak dari kegiatan Kemaslahatan tersebut. Workers (craftsmen), students, and local businesses were the communities who benefited from the indirect economic impacts of Benefit Program activities.
Program pemberdayaan ekonomi umat (peternakan, wirausaha marbot mart) Ummah's economic empowerment program (animal husbandry, Marbot Mart entrepreneurship)	Peningkatan kesejahteraan bagi peternak, santri, pengasuh pondok, marbot masjid dan masyarakat sekitar di lokasi penyelenggaraan Kegiatan Kemaslahatan. Improved welfare for breeders, students, boarding school caretaker, mosque caretakers and the local community at the location of Benefit Program activities.

Salah satu fokus utama Program Kemaslahatan BPKH adalah pada aspek ekonomi umat, yang menekankan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di dalam ruang lingkup ini, kegiatan-kegiatan dirancang dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas secara mandiri. Hal ini dilakukan melalui pemberian modal dan penyediaan peralatan yang diperlukan untuk mendukung usaha mereka.

Kegiatan-kegiatan Kemaslahatan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga berperan dalam memberdayakan penerima manfaat dengan menciptakan sumber pendapatan baru. Sebagai contoh, melalui Program Pemberdayaan Kelompok Ternak Ngudi Raharjo Salatiga dimana Bidang Kemaslahatan BPKH memberikan modal kepada para peternak untuk mengembangkan wirausaha mereka. Langkah ini tidak hanya memberikan kesempatan mengembangkan ekonomi lokal, tetapi juga turut membantu program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga untuk meningkatkan produksi daging.

Inisiatif Program Pemberdayaan Kelompok Ternak Ngudi Raharjo Salatiga ini sejalan dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG-1 (Tanpa Kemiskinan) dengan mengurangi kemiskinan melalui penciptaan sumber pendapatan baru, SDG-2 (Bebas Kelaparan) dengan meningkatkan ketahanan pangan dan produksi makanan lokal, dan SDG-8 (Pekerjaan Layak dan

The economic aspect of the ummah is one of the main focuses of BPKH's Benefit Program that emphasizes support for local economic growth. Activities under this scope are designed to provide opportunities for the communities to increase productivity independently by providing capital and necessary equipment to support their businesses.

These welfare activities not only provide financial assistance but also empower beneficiaries by creating new income sources. For instance, through the Ngudi Raharjo Salatiga Livestock Farmers Empowerment Program, the BPKH Welfare Division provides capital to farmers to develop their enterprises. This initiative not only offers opportunities to develop the local economy but also supports the Salatiga City Agriculture and Food Security Agency's program to increase meat production.

The Ngudi Raharjo Salatiga Livestock Farmers Empowerment Program aligns with several Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 1 (No Poverty) by reducing poverty through the creation of new income sources, SDG 2 (Zero Hunger) by enhancing food security and local food production, and SDG 8 (Decent Work and Economic Growth). Through a SROI analysis, the program

Pertumbuhan Ekonomi). Melalui analisis SROI, Program Pemberdayaan Kelompok Ternak Ngudi Raharjo Salatiga menunjukkan indeks 1,23 yang artinya setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam program ini dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp1,23.

Meskipun program Kemaslahatan BPKH telah memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satu risiko yang mungkin muncul adalah ketergantungan penerima manfaat pada bantuan yang diberikan. Jika tidak dikelola dengan baik, penerima manfaat mungkin kurang termotivasi untuk mencari sumber pendapatan lain yang lebih berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, BPKH merancang program pelatihan dan pendampingan agar penerima manfaat memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya secara mandiri. [GRI 203-2]

demonstrated an index of 1.23, meaning that every Rp1 invested in the program generates Rp1.23 in returns.

Despite the benefits of the BPKH's Programs, there are several potential negative impacts that need to be considered. One risk is the possibility of beneficiaries becoming dependent on the assistance provided. If not managed properly, beneficiaries may be less motivated to seek other, more sustainable sources of income. To address this, BPKH designs more intensive training and mentoring programs, so that beneficiaries have the skills needed to develop their businesses independently. [GRI 203-2]





Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi [GRI 3-3, SEOJK F.27]

Monitoring and Evaluation Activities



Untuk memastikan bahwa kegiatan Program Kemaslahatan berjalan sesuai dengan tujuan dan mencapai dampak yang diharapkan, Divisi Pelaksanaan dan Monitoring (Monev) Kemaslahatan melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap semua kegiatan Kemaslahatan. Evaluasi ini dilakukan melalui pelaporan berkala serta kunjungan dan observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif ditetapkan untuk setiap kegiatan guna menilai pencapaian tujuan dengan komprehensif secara kualitatif dan kuantitatif.

Program Kemaslahatan bertujuan untuk menciptakan dampak positif dan mengurangi dampak negatif bagi para penerima manfaat. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan juga mencakup penilaian terhadap dampak kesehatan dan

The Implementation and Monev of Benefit Program Division regularly monitors and evaluates all Benefit Program activities to ensure that they meet the objectives and achieve the expected impact. This evaluation is carried out through regular reporting as well as visits and direct observation on the activities' implementation. Performance indicators, which include qualitative and quantitative aspects, are set for each activity to assess their objective achievement in a comprehensive qualitative and quantitative manner.

The Benefit Program aims to create positive impacts and reduce negative impacts for the beneficiaries. Therefore, an assessment of the beneficiaries' health and safety impact on the assistance they receive becomes part of the evaluation.

keselamatan para penerima manfaat atas bantuan yang mereka terima. Selama periode pelaporan, seluruh kegiatan (100%) telah melalui evaluasi terkait aspek ini, dan tidak ada insiden terkait keselamatan dan kesehatan yang terjadi pada para penerima manfaat.

Hasil pengukuran dan pemantauan selanjutnya dianalisis dan dievaluasi dengan tujuan untuk:

1. Memastikan bahwa sasaran program terpenuhi
2. Mengetahui kendala dan sumber risiko yang relevan;
3. Mengetahui peluang yang relevan;
4. Membantu penanggungjawab program dalam mengelola sumber daya dan mengendalikan;
5. Memastikan bahwa program yang dilaksanakan mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan; dan
6. Memastikan bahwa program yang dilaksanakan tetap berpegang kepada asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel

Pertimbangan untuk perbaikan dilandaskan pada hasil pemantauan dan evaluasi yang penting dalam menjalankan kegiatan Kemaslahatan selanjutnya, termasuk menyampaikannya kepada Mitra Kemaslahatan. Tindakan ini mencerminkan tanggung jawab yang diemban oleh Bidang Kemaslahatan dalam menjalankan amanah umat dengan baik.

During the reporting period, all activities (100%) were evaluated in relation to this aspect, and no health and safety related incidents occurred to the beneficiaries.

The measurement and monitoring results are then analyzed and evaluated with the goal of:

1. Ensuring that program objectives are met
2. Identifying relevant problems and sources of risk;
3. Identifying relevant opportunities;
4. Assisting the person in charge of the program in managing and controlling resources;
5. Ensuring that the implemented program complies with the applicable of laws and regulations; and
6. Ensuring that the implemented program adheres to the principles of sharia, prudence, benefits, non-profit, transparency, and accountability.

Monitoring and evaluation results that are considered vital became the basis of considerations for improvement in the next Benefit Program activities, which include communicating them to Benefit Program Partners. This action reflects the Benefit Program Division's responsibility in carrying out the ummah's mandate effectively.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEMASLAHATAN

	RELEVAN, OBSERVABLE, UNDERSTANDABLE, SPESIFIK, MENCAKUP SATU PERIODE
	Jumlah Dana Fund Amount
	Indeks Kinerja Jadwal Schedule Performance Index
	Keluaran Output
	Dampak Impact

PERFORMANCE INDICATORS OF THE BENEFIT PROGRAM



INISIATIF HIJAU BPKH

BPKH' Green Initiative

- 88** Komite Operasional Ramah Lingkungan
Commitment to Environmentally Friendly Operations
- 92** Aksi Bagi Lingkungan dan Masyarakat
Actions for the Environment and Society





Inisiatif Hijau BPKH
BPKH' Green Initiative

Komitmen Operasional Ramah Lingkungan

Commitment to Environmentally Friendly Operations



BPKH menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup meskipun aktivitas dan nilai rantai kerjanya tidak memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral serta menjalankan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Komitmen BPKH terhadap pengelolaan lingkungan hidup diwujudkan melalui berbagai upaya internal yang berfokus pada penghematan sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan.

Even though BPKH's activities and value chain do not have a significant impact on the environment, we still realize that preserving the environment is important. Aside as a form of social and moral responsibility, preserving the environment also fulfilling human duties as khalifah on earth, as stated in the Quran. BPKH's commitment to environmental management is realized through various internal efforts that focus on saving resources and reducing environmental impacts.

**“Menjaga Bumi, Mewujudkan
Amanah Khalifah di Era Modern”**

**“Preserving the Earth, Becoming Trustworthy
Khalifah in a Modern Era”**

PENGHEMATAN AIR [SEOJK F.8]

BPKH mendorong praktik penghematan air di kalangan pegawai dan seluruh kegiatan operasionalnya. Langkah ini tidak hanya mengurangi pemborosan air tetapi juga memastikan bahwa sumber daya air yang tersedia digunakan secara efisien dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya, serta menekankan pentingnya menjaga anugerah yang telah diberikan Allah SWT.

PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK

Sejauh ini upaya pengelolaan sampah yang dilakukan BPKH adalah mengurangi jumlah sampah domestik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Saat ini BPKH belum melakukan pengukuran secara spesifik terhadap jumlah sampah domestik yang dihasilkan dan pengelolaannya dibantu oleh pihak kebersihan gedung.

PENGURANGAN PENGGUNAAN KERTAS

Selain sampah domestik, sumber limbah utama BPKH juga bersumber dari administrasi perkantoran. Dengan mendorong digitalisasi dokumen dan komunikasi, BPKH dapat mengurangi konsumsi kertas secara signifikan. Segala urusan administrasi perkantoran BPKH telah dikonversi dalam bentuk *e-office* dan kegiatan administrasi keuangan dilakukan menggunakan *Cash Management System (CMS)*.

SAVING WATER [SEOJK F.8]

BPKH promotes water-saving practices among its employees and throughout its operations. This not simply to reduce excessive use of water, but also to ensure that available water resources are used efficiently and responsibly. This is aligned with Islamic principles of using resources wisely while also emphasizing the importance of preserving the gifts that Allah SWT has given.

DOMESTIC WASTE TREATMENT

To date, BPKH's waste treatment efforts have successfully reduced the amount of domestic waste that ended up in landfills. There are still no specific measurements of the amount of generated domestic waste in BPKH, and its management is still assisted by the building's janitor.

SAVING PAPER

In addition to home garbage, office administration has become one of BPKH's main sources of waste. By encouraging document and communication digitalization, BPKH can significantly reduce its paper consumption. All matters related to BPKH office administration have been converted to *e-office* form, while financial administration activities are carried out using the *Cash Management System (CMS)*.



Aside from using e-office and CMS, BPKH is also collaborating with an archive management provider to help convert all important archives to an online system. This step successfully reduces the need for physical storage space and paper consumption, as well as improving data security and accessibility.

PENGELOLAAN ENERGI DAN EMISI [SEOJK F.7; F.12]

- **Konsep *co-working* dan *open space***
BPKH mengadopsi konsep ini pada area kantor untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang dan mengurangi konsumsi energi;
- **Pilihan transportasi**
BPKH mendorong penggunaan transportasi publik dan *carpooling whenever possible* untuk keperluan dinas luar guna mengurangi jejak karbon dan emisi;
- **Kampanye hemat energi di kantor**
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya penghematan energi dalam aktivitas sehari-hari dan dilakukan dalam bentuk himbauan kepada seluruh pegawai;
- **Inventarisasi emisi**
Dengan melakukan inventarisasi emisi secara berkala, BPKH dapat mengidentifikasi sumber emisi utama dan merumuskan strategi yang tepat untuk pengurangan jejak karbon institusi.

ENERGY AND EMISSION MANAGEMENT [SEOJK F.7; F.12]

- **Co-working and open space concept**
BPKH's office area adopts this concept to improve space usage efficiency and reduce energy consumption;
- **Transportation Transportation option**
BPKH encourages the use of public transportation and carpooling whenever possible for external business purposes to reduce carbon footprint and emissions;
- **Energy-saving campaign in the office**
This campaign aims to raise employee awareness on the importance of energy-saving in daily activities and is conducted through suggestion to all employees;
- **Emission inventory**
By conducting regular emission inventories, BPKH can identify key emission sources and formulate appropriate strategies to reduce the institution's carbon footprint.

Konsumsi Energi BPKH (GJ) [SEOJK F.6]

BPKH Energy Consumption (GJ)

Jenis Energi Energy Type	2023	2022	2021
BBM Fuel	1.280,24	1.515,16	N/A
Listrik Electricity	1.606,85	155,59	152,30

Emisi yang Dihasilkan BPKH (Ton CO₂) [SEOJK F.11]

BPKH Generated Emission (Ton CO₂)

Jenis Emisi Emission Type	Sumber Source	2023	2022	2021
Emisi GRK lingkup 1 (langsung) Scope 1 GHG emissions (direct)	BBM yang digunakan untuk operasional Fuel used for operations	76,44	90,46	-
Emisi GRK lingkup 2 (tidak langsung) Scope 2 GHG emissions (indirect)	Listrik yang diperoleh dari PLN Electricity obtained from PLN	379,39	1.515,16	35,97
Emisi GRK tidak langsung lainnya (lingkup 3) Other indirect (Scope 3) GHG emissions	Penggunaan energi oleh Mitra Kemaslahatan Energy use by Benefit Program Partners	83,02	-	-



Inisiatif Hijau BPKH
BPKH' Green Initiative

Aksi Bagi Lingkungan dan Masyarakat [SEOJK F.25]

Actions for the Environment and Society

KEGIATAN PENANAMAN MANGROVE

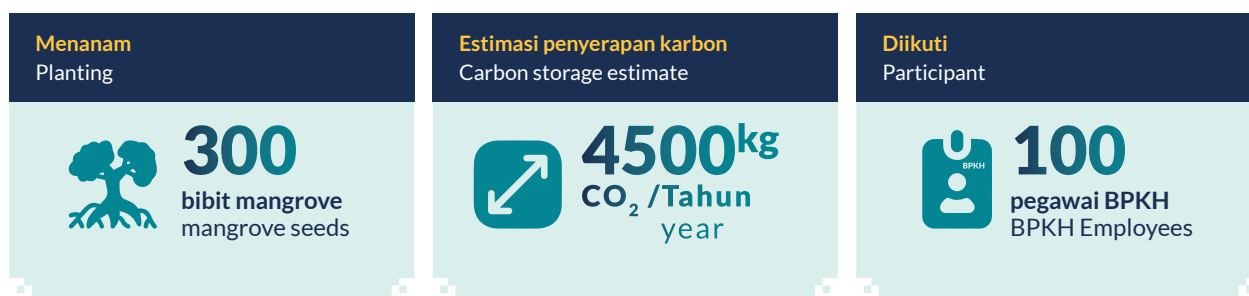
BPKH melakukan aksi penanaman mangrove di kawasan ekowisata mangrove PIK dalam rangka peringatan *milad*/hari jadi BPKH ke-6 sekaligus memperingati Hari Pohon Sedunia. Mangrove dipilih BPKH karena dapat melindungi garis pantai dari abrasi dan dampak badai. Selain itu, mangrove menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut yang berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir. Sebagai bagian dari program kepedulian lingkungan, aksi penanaman mangrove ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Lebih dari sekadar pelestarian alam, aksi penanaman mangrove BPKH sejalan dengan poin 13 SDGs, yaitu "Menangani Perubahan Iklim". Mangrove berperan penting dalam menyerap emisi karbon dioksida, gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Dengan menanam mangrove, BPKH berkontribusi dalam memerangi perubahan iklim dan menjaga kelestarian bumi ciptaan Allah SWT.

MANGROVE PLANTING ACTIVITY

In commemoration of BPKH's 6th anniversary and World Tree Day, BPKH conducted mangrove planting action in PIK mangrove ecotourism area. BPKH chose mangroves because they can protect the coastline from abrasion and the impact of storms. Furthermore, mangroves provide habitat for various marine species, ensuring the sustainability of coastal ecosystems. As part of the environmental awareness program, this mangrove planting action is expected to provide long-term benefits for the community and the surrounding environment.

More than simply conserving nature, BPKH's mangrove planting action also aligned with SDGs point 13, "Combating Climate Change". Mangroves play an important role in absorbing carbon dioxide emissions, a greenhouse gas that is the main cause of global warming. By planting mangroves, BPKH helps to combat climate change and to preserve the earth created by Allah SWT.



PROGRAM BANTUAN PANEL SURYA

Di era modern ini, akses listrik masih menjadi *privilege* bagi sebagian masyarakat di daerah terpencil. Terbatasnya infrastruktur dan mahalnya biaya listrik menjadi hambatan bagi mereka untuk menikmati kenyamanan penerangan dan energi yang memadai. Memahami kondisi ini, BPKH hadir dengan program bantuan panel surya untuk masyarakat terpencil. Salah satu contohnya adalah pengadaan set panel surya untuk masjid dan musholla di Kecamatan Elar dan Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

SOLAR PANEL ASSISTANCE PROGRAM

Even in the modern era, access to electricity remains a privilege for some communities in remote areas. Limited infrastructure and high electricity costs make it difficult for them to enjoy the comfort of adequate lighting and energy. BPKH, understanding of this condition, offers a solar panel assistance program for remote communities. One example is the procurement of solar panel sets for mosques and musallah in Elar District and Sambu Rampas District, East Manggarai Regency.

Program ini bertujuan untuk menyediakan sumber energi berkelanjutan yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat, terutama untuk kegiatan keagamaan dan sosial. Dengan adanya panel surya, diharapkan masyarakat dapat menikmati akses listrik yang stabil dan ramah lingkungan untuk mendukung aktivitas ibadah dan pendidikan di masjid dan musala.

This program aims to provide a sustainable energy source for the local community, especially for religious and social activities. The solar panels are expected to deliver the community with stable and environmentally friendly electricity access to support praying and education activities in mosques and musallah.

16

Unit Panel Surya
Solar Panel Units

Rp231.353.000

Distribusi Nilai Manfaat
Return Value Distribution

3200 Wp

Perkiraan Dukungan Listrik
Estimated Electricity Assistance



Bapak Baharudin - Pengurus Masjid As-salam Desa Golopau

Mr. Baharudin - As-salam Mosque Manager, Golopau Village

Sebelumnya masjid kami gelap dan hanya mengandalkan pelita untuk penerangan, sehingga sangat sulit untuk melaksanakan sholat Isya' berjamaah ataupun menggelar pengajian malam. Tapi, alhamdulillah berkat bantuan set panel surya dari BPKH, kini masjid kami terang benderang. Sekarang semua kegiatan di masjid jadi lebih lancar dan nyaman. Kami bisa sholat berjamaah dengan tenang, mengaji tanpa kendala, dan menggelar pengajian malam tanpa khawatir. Atas nama pengurus dan jemaah Masjid As-Salam Desa Golopau, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada BPKH atas bantuan yang luar biasa ini. Semoga bantuan ini membawa keberkahan dan pahala berlimpah bagi semua pihak yang terlibat. Kami berharap BPKH dan Lazismu terus bisa membantu masjid-masjid lain yang masih kekurangan, seperti masjid kami dulu. Semoga BPKH selalu diberkahi Allah SWT dan senantiasa menjadi lembaga yang amanah dalam mengelola dana umat. Aamiin.

Previously, our mosque's lighting was dark and relied solely on oil lamps, making it very difficult to perform Isha' prayers together or hold night Quran recitations. But, Alhamdulillah our mosque is now brightly lit thanks to BPKH's solar panel sets. All activities at the mosque are now more organized and comfortable. We can pray together in peace, recite the Quran without problems, and hold night Quran recitations without worry. On behalf of the management and pilgrims of As-Salam Mosque, Golopau Village, we would like to express our deepest gratitude to BPKH for this extraordinary assistance. Hopefully, this assistance will bring blessings and abundant rewards to all involved parties. We hope that BPKH and Lazismu can continue to assist other mosques that still need improvement, such as ours. May Allah SWT always bless BPKH and make it a trustworthy institution in managing ummah's funds. Aamiin.



Inisiatif Hijau BPKH

BPKH' Green Initiative

PROGRAM BANTUAN AIR BERSIH

Di tengah musim kemarau yang melanda berbagai wilayah di Indonesia, BPKH melaksanakan program pembuatan sumur bor untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat. Melalui kerja sama dengan berbagai mitra kemaslahatan, BPKH menargetkan pembangunan sumur bor di daerah-daerah yang terdampak oleh musim kemarau. Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar akan air bersih, terutama untuk keperluan minum, memasak, dan sanitasi.

CLEAN WATER ASSISTANCE PROGRAM

BPKH implemented borewells construction program to provide access to clean water for various communities whose regions were affected by the dry season in Indonesia. BPKH, in collaboration with several benefit partners, aims to construct borewells in areas affected by the dry season. This program is expected to help meet the basic needs for clean water, especially for drinking, cooking, and sanitation purposes.

Sebaran Pangadaan Sumur Bor Tahun 2023

Distribution of Borewells in 2023

MDTA NURHIDAYAH ABADI NURHIDAYAH ABADI MDTA	PONDOK PESANTREN AL FAJAR AL FAJAR ISLAMIC BOARDING SCHOOL	PONDOK PESANTREN AL GINAYA AL GINAYA ISLAMIC BOARDING SCHOOL	PONDOK PESANTREN NURUL HIDAYAH NURUL HIDAYAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL	DESA MAJAKSINGI MAJAKSINGI VILLAGE
(Cibinong Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat) (Cibinong, Cianjur Regency, West Java Province)	(Sindangbarang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat) (Sindangbarang, Cianjur Regency, West Java Province)	(Cempakamulya Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat) (Cempakamulya, Cianjur Regency, West Java Province)	(Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan) (Tapin Regency, South Kalimantan Province)	(Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah) (Magelang Regency, Central Java Province)

5

Unit Sumur Bor
Borewell Units

Rp1.107.979.000

Distribusi Nilai Manfaat
Return Value Distribution

13.000 Liter

Perkiraan Dukungan Air Bersih
Estimated Clean Water Assistance

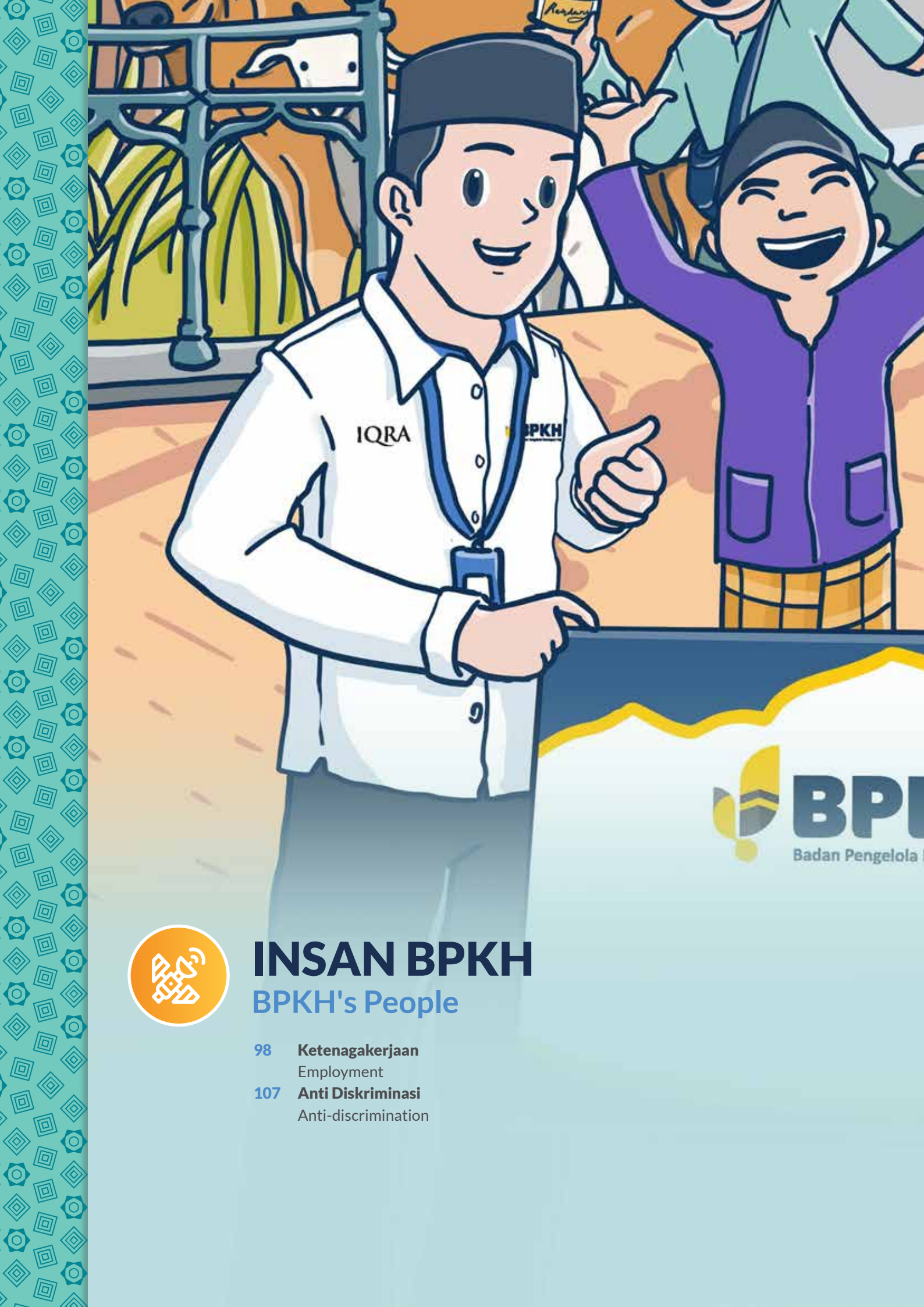


Bapak Sutrisno - Kepala Desa Majaksingi

Mr. Sutrisno - Head of Majaksingi Village

"Terima kasih BPKH. Meskipun saat awal mula kegiatan sempat tidak menemukan titik-titik air karena bertepatan dengan musim kemarau, akhirnya pembuatan sumur bor bisa terealisasi. Dan *output* bantuan ini berupa sumur air dengan kedalaman debit air 103 meter, bak penampungan air, serta tower air. Insya Allah bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Dusun Karanggawang khususnya, dan masyarakat Desa Majaksingi secara umum."

"Thank you BPKH." Although there were no water points at the start of the operation due to the dry season, the borewell was eventually constructed. This assistance resulted in a 103-meter-deep well, a water storage tank, and a water tower. Inshallah, this assistance will be very beneficial for the people of Karanggawang Hamlet in particular, and the people of Majaksingi Village in general."



INSAN BPKH

BPKH's People

- 98 **Ketenagakerjaan**
Employment
- 107 **Anti Diskriminasi**
Anti-discrimination





Insan BPKH
BPKH's People

Ketenagakerjaan [3-3]

Employment



Setiap layanan dan program yang dilaksanakan oleh BPKH bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan umat. Dalam menjalankan setiap layanan dan program tersebut, peran serta dan dukungan dari setiap karyawan yang tergabung dalam tim BPKH sangatlah penting. Oleh karena itu, penting untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap pegawai dan memastikan bahwa setiap orang dapat bekerja dalam lingkungan yang nyaman dan produktif.

Every BPKH' service and program aims to promote the welfare of the ummah. The participation and support of employee, who are BPKH team's members, is critical in conducting every service and program. Therefore, upholding every employee's rights and ensuring that everyone can work in a comfortable and productive environment becomes more important.

BPKH memastikan seluruh program yang dilaksanakan didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, tanpa membedakan gender. Kami selalu menjalankan prinsip manajemen ketenagakerjaan yang adil dan sesuai dengan kemampuan individu. Kami memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang setara dalam meningkatkan kompetensi dan meraih kemajuan karirnya. [SEOJK F.18]

BPKH ensures that all programs implemented are supported by excellent human resources, regardless of gender. We always implement fair labor management principles that align with individual abilities. We ensure that every individual has equal opportunity to improve their competence and advance their career.

[SEOJK F.18]

Di bawah naungan BPKH, komposisi pegawai dihitung berdasarkan jumlah individu yang bekerja hingga akhir periode pelaporan (per 31 Desember 2023). Semua data ini berasal dari *database* resmi pegawai BPKH. [GRI 2-7]

BPKH calculated employee composition is based on the number of individuals who are still working until the end of the reporting period (as of December 31, 2023). All data is collected from the official BPKH employee database.

[GRI 2-7]

Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja

Employee Composition Work Area

Wilayah Kerja	2023		2022		2021		Work Area
	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	
Nasional	142	57	10	2	9	1	National
Jumlah	142	57	10	2	9	1	Total

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

Status Kepegawaian	2023		2022		2021		Employment Status
	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	
Karyawan Tetap	103	48	10	2	9	1	Permanent Employee
Karyawan Kontrak	39	9	-	-	-	-	Contract Employee
Jumlah	142	57	10	2	9	1	Total

Catatan/Notes:

1. Data tahun 2022 dan 2021 hanya mencakup karyawan Divisi Kemaslahatan BPKH.
The data for 2022 and 2021 only includes employees of the BPKH Benefit Division.
2. BPKH merupakan lembaga Nasional, sehingga tidak memiliki pembagian wilayah kerja
BPKH is a national institution, so it does not have a division of work areas.
3. Seluruh karyawan BPKH, baik yang berstatus tetap maupun kontrak, merupakan karyawan penuh waktu yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia (nasional). Dengan demikian, tidak ada kategori karyawan lain selain yang telah disebutkan, dan BPKH tidak memiliki karyawan dengan jam kerja tidak pasti atau pekerja paruh waktu.
BPKH's nationwide scope of work is served by full-time permanent and contract employees. In other words, all BPKH employees work full-time and there are no guaranteed hour or part-time employees



Insan BPKH

BPKH's People

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Employee Composition by Position Level

Jenjang Jabatan	2023		2022		2021		Position Level
	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	
Deputi	9	2	1	0	1	0	Deputy
Kepala Divisi	35	6	1	1	1	1	Head Division
Manajer	42	22	4	0	4	0	Manager
Asisten Manajer	17	18	4	1	3	0	Assistant Manager
Staff	15	9	0	0	0	0	Staff
Driver	24	0	0	0	0	0	Driver
Jumlah	142	57	10	2	9	1	Total

Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Employee Composition by Age

Jenjang Jabatan	2023		2022		2021		Position Level
	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	
≤ 30 tahun	2	4	2	1	2	0	≤ 30 years old
30 - 40 tahun	7	1	6	1	5	1	30 - 40 years old
41 - 50 tahun	2	0	2	0	2	0	41 - 50 years old
> 50 tahun	0	0	0	0	0	0	> 50 years old
Jumlah	142	57	10	2	9	1	Total

Jumlah Perekrutan Karyawan BPKH

Total Employee Recruitment of BPKH

Jenjang Jabatan	2023		2022		2021		Position Level
	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	
Jumlah Tenaga Kerja Baru Berdasarkan Usia							Number of New Employee by Age
≤ 30 tahun	1	3	0	1	2	0	≤ 30 years old
30 - 50 tahun	0	0	1	0	1	0	30 - 50 years old
> 50 tahun	0	0	0	0	0	0	> 50 years old
Jumlah	1	3	1	1	3	0	Total
Persentase Tenaga Kerja Baru Berdasarkan Usia							Rate of New Employee by Age
≤ 30 tahun	25%	75%	0%	50%	66%	0%	≤ 30 years old
30 - 50 tahun	0%	0%	50%	0%	33%	0%	30 - 50 years old
> 50 tahun	0%	0%	0%	0%	0%	0%	> 50 years old

Catatan/Notes:

1. Data tahun 2022 dan 2021 hanya mencakup karyawan Divisi Kemaslahatan BPKH/The data for 2022 and 2021 only includes employees of the BPKH Benefit Division.
2. BPKH merupakan lembaga Nasional, sehingga tidak memiliki pembagian wilayah kerja/BPKH is a national institution, so it does not have a division of work areas.

Tingkat Turnover Karyawan BPKH

Turnover Rate of the BPKH

Turnover	2023		2022		2021		Turnover
	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	
Jumlah Tenaga Kerja Baru Berdasarkan Usia				Number of New Employee by Age			
≤ 30 tahun	0	0	0	0	0	1	≤ 30 years old
30 - 50 tahun	0	0	0	0	0	0	30 - 50 years old
> 50 tahun	0	0	0	0	0	0	> 50 years old
Jumlah	0	0	0	0	0	1	Total
Persentase Tenaga Kerja Baru Berdasarkan Usia				Rate of New Employee by Age			
≤ 30 tahun	0%	0%	0%	0%	0%	100%	≤ 30 years old
30 - 50 tahun	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30 - 50 years old
> 50 tahun	0%	0%	0%	0%	0%	0%	> 50 years old

Catatan/Notes:

1. Data tahun 2022 dan 2021 hanya mencakup karyawan Divisi Kemaslahatan BPKH/The data for 2022 and 2021 only includes employees of the BPKH Benefit Division.
2. BPKH merupakan lembaga Nasional, sehingga tidak memiliki pembagian wilayah kerja/BPKH is a national institution, so it does not have a division of work areas.

REMUNERASI PEGAWAI

Ketentuan mengenai remunerasi pegawai BPKH telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49/LN.2020/No. 85, yang mengatur tentang gaji atau upah hak keuangan bagi anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji (PBPBKH) Nomor 5 Tahun 2020, yang mengatur tata cara pembayaran gaji atau upah serta hak keuangan lainnya bagi anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH. Sementara itu, penetapan remunerasi untuk pegawai dan karyawan secara umum mengacu pada Peraturan Kepegawaian Badan Pelaksana (PKBP) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kepegawaian.

EMPLOYEE REMUNERATION

Provisions regarding the BPKH's employees remuneration have been regulated in Presidential Regulation (Perpres) Number 49/LN.2020/No. 85, which regulates the salaries or wages of financial rights for members of the BPKH Executive Board and Supervisory Board. This regulation is then strengthened by the Regulation of the Hajj Fund Management Agency (PBPBKH) Number 5 of 2020, which regulates the procedures for payment of salaries or wages and other financial rights for members of the BPKH Executive Board and Supervisory Board. Meanwhile, the determination of remuneration for employees and workers are generally refers to the Regulations of Head of Executive Board(PKBP) Number 10 of 2020 concerning the Employment System.

Persentase Remunerasi Pegawai Tetap di Tingkat Terendah Terhadap Upah Minimum Regional [SEOJK F.20]

Percentage of Permanent Employees Remuneration at the Lowest Level to the Regional Minimum Wage

Perbandingan Rata-rata Upah Karyawan Baru Tingkat Terendah vs UMP	2023	2022	2021	Comparison of Average Wages of New Lowest Level Employees vs Regional Minimum Wage
Laki-laki	120%	138,11%	128,61%	Men
Perempuan	118%	133,78%	153,07%	Women



Insan BPKH
BPKH's People

SERIKAT PEGAWAI [GRI 2-30]

Serikat pegawai merupakan lembaga yang berperan sebagai wadah perhimpunan seluruh anggota atau pegawai yang bekerja pada sebuah organisasi atau instansi. Namun saat ini BPKH belum memutuskan untuk membentuk serikat pekerja mengingat total karyawan BPKH hanya berjumlah 199 orang. Dengan jumlah karyawan yang kecil yang berada dalam satu kantor pusat tanpa adanya kantor cabang, memungkinkan komunikasi yang efektif dan efisien, baik dari pimpinan ke bawahan maupun sebaliknya.

Saat ini, umpan balik dari karyawan dapat dipantau dengan mudah melalui berbagai mekanisme formal seperti Rapat Koordinasi, Pertemuan dengan Bidang SDM maupun mekanisme informal misalnya berbagai kegiatan kebersamaan yang diadakan secara rutin. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap pegawai dapat menyuarakan aspirasinya dengan mudah dan memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi. Namun tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya BPKH akan membentuk serikat pekerja apabila dibutuhkan.

PENGEMBANGAN PEGAWAI [GRI 3-3, SEOJK F.22]

Pengembangan kompetensi pegawai merupakan hal yang vital dalam memastikan bahwa SDM yang dimiliki BPKH sesuai dengan kebutuhan organisasi secara keseluruhan, guna mencapai tujuan layanan yang optimal. Sebagai respons terhadap hal ini, BPKH telah menginisiasi sejumlah program pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pegawai kami. Program-program pelatihan ini difokuskan pada pengembangan kompetensi perilaku (*soft skill*), kompetensi teknis (*hard skill*), dan kompetensi kepemimpinan.

Selama periode pelaporan, BPKH secara aktif menyelenggarakan serangkaian pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas karyawan di berbagai level.

Rata-rata Jam Pelatihan [404-1]

Average Training Hours

Jenjang Jabatan	2023		2022		2021		Position Level
	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	
Deputi	32,7	26,7	23,6	28,6	24,5	32	Deputy
Kepala Divisi	32,7	26,8	29,1	26,4	27,6	34	Head Division

EMPLOYEE UNION [GRI 2-30]

An employee union is an organization that serves as a collective body for all employees working within a company or institution. However, BPKH has not yet decided to form a labor union given that the total number of BPKH employees is only 199. With such a small number of employees concentrated in a single headquarters and no branch offices, effective and efficient communication is facilitated, both from management to subordinates and vice versa.

Currently, employee feedback is effectively monitored through various formal mechanisms such as Coordination Meetings and discussions with the HR Department, as well as informal channels like regular social gatherings. This approach aims to foster an inclusive work environment where all employees can freely express their opinions and ensure their rights are protected. While the current system is effective, BPKH remains open to the possibility of forming a labor union in the future if necessary.

EMPLOYEE DEVELOPMENT [GRI 3-3, SEOJK F.22]

Employee competency development is vital to ensure that BPKH's human resources meet the needs of the organization entirely, to achieve optimal service objectives. As a response, BPKH has initiated several training programs to improve our employees' productivity and quality. These training programs are focused on developing behavioral competencies (soft skills), technical competencies (hard skills), and leadership competencies.

During the reporting period, BPKH actively organized several trainings aimed at increasing the capacity of employees at various levels.

Jenjang Jabatan Manajer	2023		2022		2021		Position Level Manager
	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	Laki-Laki Men	Perempuan Women	
Asisten Manajer	24,7	24,5	19	19,6	32,3	26,4	Assistant Manager
Staf	26,4	22,7	14,2	12	24,3	35,2	Staff
Driver	8	0	0	0	0	0	Driver
Jumlah	150,3	135,6	107,2	110,5	141	169,4	Total

Pelatihan/Pendidikan Untuk Pengembangan Potensi Tahun 2023

Training/Education for Potential Development in 2023

No.	Topik Pelatih Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants
1	"Pelatihan Sertifikasi BNSP Pengelola Budaya Kerja BNSP Certification Training on Work Culture Manager"	2
2	"Pelatihan Certified Investment Banking (CIB) Certified Investment Banking (CIB) Training"	7
3	"Pelatihan Analisis Data dengan Power BI Data Analysis with Power BI Training"	8
4	"Pelatihan & Sertifikasi BPMP (Business Process Management Professional Business Process Management Professional Certification and Training"	2
5	Human Capital Masterclass: Rewards Series	2
6	Certified Information Systems Auditor (CISA)	3
7	Sustainable Investing	1
8	CFA Program exam Level 1	1
9	"Sertifikasi CFA Level II Agustus 2023 CFA Level II Certification August 2023"	1
10	"Pelatihan ICA Certificate in KYC and CDD ICA Certificate in KYC and CDD Training"	3
11	"Sertifikasi BNSP-Certified Industrial Relation Manager BNSP Certification-Certified Industrial Relation Manager"	1
12	"Persiapan Ujian Sertifikasi CFE 2023 Preparation for CFE Certification Test 2023"	2
13	"Pelatihan GRI Certified Training Course-Certified Sustainability Reporting Specialist GRI Certified Training Course - Certified Sustainability Reporting Specialist Training"	4
14	"Konsultan Hukum Pasar Modal Dasar 2 Legal Consultant of Basic Capital Market 2"	1
15	Certified Network Defender (CND)	1
16	"Pelatihan Pengelolaan Whistleblowing System Pengaduan Korupsi" Batch 2 Whistleblowing System Management Training on Corruption Complaint Batch 2"	1
17	Assessment Center Assessor Certification (ACAC)	1
18	"Pelatihan Sertifikasi Public Relations Coordinator Batch 1 Public Relations Coordinator Certification Training Batch 1"	3
19	"Pelatihan Sertifikasi Public Relations Coordinator Batch 2 Public Relations Coordinator Certification Training Batch 2"	2
20	Certified General Affairs Management Professional	3



Insan BPKH

BPKH's People

No.	Topik Pelatih Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants
21	Brevet C	1
22	Data Modeling and Visualization with Microsoft Excel (Building Dynamic Reports and Dashboards using Power Query)	11
23	"Pelatihan Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing Training"	3
24	Certified Network Defender (CND)	1
25	"Information Security Management System (ISMS) Lead To Implement ISO 27001 dan Sertifikasi (Pengelolaan Keamanan Informasi & Network Security Auditor) Information Security Management System (ISMS) Lead To Implement ISO 27001 and Certification (Information Security Management & Network Security Auditor)"	1
26	Python Programming for Data Science, Data Analytic with Machine Learning & Big Data Administration with Hadoop	1
27	"Pelatihan Knowledge On Enterprise IT Architecture (TOGAF) dan Exam TOGAF 9 Training of Knowledge on Enterprise IT Architecture (TOGAF) and Exam TOGAF 9"	1
28	Certification Information System Auditor	2
29	"Pelatihan Certified Network Defender (CND) Certified Network Defender (CND) Training"	1
30	Executive Development Program	5
31	"Konferensi Auditor Internal 2023 Internal Auditor Conference 2023"	4
32	"Pelatihan dan Certified Information Systems Auditor (CISA) Training and Certified Information Systems Auditor (CISA)"	1
33	Social Value & SROI Practitioner Training	1
34	"Kegiatan CSR Outlook 2023–CSRS Leadership Forum CSR Outlook 2023–CSRS Leadership Forum Activities"	2
35	"Pelatihan Profesional Secretary Skills Professional Secretary Skills Training"	2
36	"Workshop Analisis Biaya di Bidang Kesehatan Cost Analysis in Healthcare Field Workshop"	1
37	"Program Sertifikasi Kompetensi PR Perhumas Perhumas PR Competency Certification Program"	1
38	"Pelatihan Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 Training"	2
39	"Training dan awareness ISO 27001:2022 (Information Security Management System) Training and awareness of ISO 27001:2022 (Information Security Management System)"	27
40	"Pelatihan Data Science Academy Data Science Academy Training"	1
41	"Pelatihan dan Sertifikasi Office Manager (BNSP) Office Manager (BNSP) Certification and Training"	3
42	GRC Summits 2023	1
43	"Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Certified Chief Compliance Officer (CCCO) Certified Chief Compliance Officer (CCCO) Certification Test and Training"	1
44	"Program Pendidikan dan Sertifikasi Ahli Muda Manajemen Proyek (AMP) IAMPI Junior Expert of Project Management Certification and Education Program of IAMPI"	2
45	"Pelatihan The 7 Habits of Highly Effective People Batch 3 The 7 Habits of Highly Effective People Training Batch 3"	15

No.	Topik Pelatih Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants
46	"Pendidikan dan Certified Financial Planner (CFP) Education and Certified Financial Planner (CFP)"	3
47	Islamic Economics Summer School 2023	11
48	"Pelatihan dan Sertifikasi Lead Implementer ISO 9001:2015 Lead Implementer of ISO 9001:2015 Certification and Training"	14
49	National Anti Fraud Conference 2023	3
50	PSAK Bootcamp 2023 "PSAK Terkini Sesuai Konvergensi IFRS"	1
51	"Pelatihan Sukuk: Product, Market, Dan Investment Strategy Sukuk Training: Product, Market, and Investment Strategy"	22
52	"Bimtek Penyusunan Notula Rapat Secara Efektif Batch IV – JKT Technical Guidance on Preparing Effective Minutes of Meeting Batch IV – JKT"	5
53	"Bimtek Penyusunan Notula Rapat Secara Efektif Batch IV – BDG Technical Guidance on Preparing Effective Minutes of Meeting Batch IV – BDG"	5
54	"Sertifikasi Auditor Hukum Indonesia Batch 120 Indonesia Legal Auditor Certification Batch 120"	1
55	"Bimtek Penyusunan Notula Rapat Secara Efektif Batch V – BDG Technical Guidance on Preparing Effective Minutes of Meeting Batch V – BDG"	6
56	"Pelatihan Cash Flow Management Cash Flow Management Training"	6
57	Safety Driving Training	17
58	"Pelatihan ICA Certificate in KYC and CDD ICA Certificate in KYC and CDD Training"	1
59	Measuring Social Return on Your CSR Investment (SROI)	2
60	Islamic Sustainable Finance & Investment Forum 2023	1
61	"Pendidikan Profesi Lanjutan Wakil Manajer Investasi Advanced Professional Education of Deputy Investment Manager"	1
62	Learning and Development Certificate Program	1
63	Executive Development Program	9
64	"Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Analis Teknikal Utama (CTA) Certified Technical Analyst Competency Certification and Training"	2
65	"Pelatihan dan Certified Procurement Officer (CPOF) Training and Certified Procurement Officer (CPOF)"	8
66	"Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Lanjutan I Advanced Training and Certification Qualified Internal Auditor (QIA) I"	3
67	"Pelatihan Halal Economy Strategy di Jepang Halal Economy Strategy in Japan Training"	2
68	"Outlook & Workshop Anugerah Humas Indonesia Outlook & Workshop of Anugerah Humas Indonesia"	3
69	"Pelatihan PSAK For Executive PSAK For Executive Training"	2
70	Certified Securities Analyst (CSA)	2
71	Financial Modeling and Valuation	4
72	Accounting For Consolidation Reporting	2
73	Training Certified Investment Banking (CIB)	2
74	Project Management Professional (PMP) Examination Training 2023	1
75	"Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Lanjutan II Advanced Training and Certification Qualified Internal Auditor (QIA) II"	3



Insan BPKH

BPKH's People

No.	Topik Pelatih Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants
76	"Eksekutif Digital Disruption: Digital Transformation Strategies Executive Digital Disruption: Digital Transformation Strategies"	8
77	"Pelatihan Bond Market Analysis (BMA) Bond Market Analysis (BMA) Training"	5
78	"Training dan Sertifikasi Kompetensi Nazhir Wakaf Nazhir Wakaf Competency Certification and Training"	5
79	Executive Development Program	12
80	"Workshop COSO-Based Internal Auditing COSO-Based Internal Auditing Workshop"	3
81	"Pelatihan dan Ujian Certified Information Systems Auditor (CISA) Certified Information Systems Auditor (CISA) Testing and Training"	1
82	Workshop Audit Report Writing Effectively	2
83	"Pelatihan Marketing Communication Specialist Marketing Communication Specialist Training"	6
84	"Pelatihan dan Sertifikasi Public Speaking Profesional (CPSP) dan Uji Sertifikasi Kompetensi BNSP Certified Public Speaking Professional (CPSP) Traijning and BNSP Competency Certification testing"	4
85	"Perpanjangan sertifikasi Certified Securities Analyst (CSA) Renewal of Certified Securities Analyst (CSA) Certification"	1
86	"Financial Economic Training di Malaysia Financial Economic Training in Malaysia"	3
87	"Seminar "Navigating The Value-adds of Carbon Emission Management" Seminar on "Navigating The Value-adds of Carbon Emission Management""	1
Total		334

Dalam upaya mengevaluasi dan memastikan keberhasilan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang telah dilaksanakan, BPKH secara berkala melakukan penilaian kinerja pegawai. Penilaian ini dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji (PBBPKH) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Kepegawaian BPKH. Hasil dari evaluasi ini menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan yang telah dilaksanakan dan juga sebagai pedoman untuk merumuskan rencana program peningkatan SDM dimasa yang akan datang.

PEKERJA BUKAN KARYAWAN [GRI 2-8]

Selama tahun 2023, BPKH tidak melibatkan pekerja bukan karyawan dalam operasionalnya.

BPKH regularly conducts employee performance assessments as an effort to evaluate and ensure the success of the implemented human resource development (HR) program. This assessment is conducted twice a year, in accordance with the provisions outlined in the Regulation of the Hajj Fund Management Agency (PBBPKH) Number 10 of 2018 concerning the BPKH Employment System. The evaluation results serve as the basis for evaluating the effectiveness of training programs that have been implemented and also as a guideline for developing future HR improvement program plans.

NON-EMPLOYEE WORKERS [GRI 2-8]

Throughout 2023, no non-employee workers were involved in the operation of BPKH.

Anti Diskriminasi [GRI 2-23, 2-24, 406-1, SEOJK F.18]

Anti-discrimination



Dalam penempatan pegawai, BPKH selalu menekankan penilaian berdasarkan kinerja individu tanpa membedakan gender. Komposisi organ BPKH mencerminkan keberagaman anggotanya dalam hal gender, pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan keahlian. BPKH menegaskan komitmennya untuk tidak mentolerir segala bentuk diskriminasi terhadap seluruh pegawai, sejalan dengan prinsip-prinsip etika kerja dan tata perilaku yang berlaku bagi pejabat dan pegawai.

Selama periode pelaporan, BPKH tidak mencatat adanya insiden diskriminasi yang terjadi.

In the arrangement of Benefit Program's People, BPKH always prioritizes individual performance over gender. BPKH's organ composition have different gender, education, work experience, age, and expertise that reflects our diversity. BPKH affirms its commitment not to tolerate any form of discrimination against all employees, in accordance with the principles of work ethics and behavior that apply to officials and employees.

During the reporting period, BPKH did not record any incidents of discrimination.



Insan BPKH
BPKH's People

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) [GRI 3-3, SEOJK F.21]

Occupational Health and Safety (OHS)



Pegawai merupakan pemangku kepentingan kunci yang memainkan peran vital dalam mewujudkan visi dan misi BPKH. Sebagai Mitra Strategis, BPKH memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keselamatan dan kesehatan pegawai. Kami mengambil langkah-langkah konkret dengan menerapkan kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di seluruh area kerja dan layanan kami.

Employees are key stakeholders who play a vital role in realizing BPKH's vision and mission. As a Strategic Partner, BPKH has a great responsibility in ensuring the safety and health of employees. We take concrete steps by implementing Occupational Health and Safety (OHS) policies throughout our work and service areas.

PRINSIP DAN KOMITMEN PENERAPAN K3 [GRI 2-23]

BPKH selalu mengedepankan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan semua pegawai serta mitra kerja yang terlibat dalam kegiatan layanan. Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, kami mengacu pada prinsip-prinsip keselamatan kerja yang telah disusun, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat (3).

PRINCIPLES AND COMMITMENT TO OHS IMPLEMENTATION [GRI 2-23]

BPKH always prioritize commitment to the safety and health of all employees and partners involved in service activities. To ensure effective implementation, we refer to the work safety principles that have been developed, in line with the provisions contained in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower Article 35 Paragraph (3).

Pasal ini mencakup sebagaimana yang diatur dalam ayat (1), kewajiban memperkerjakan tenaga kerja juga mencakup tanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, yang meliputi aspek kesejahteraan, keselamatan, serta kesehatan, baik secara mental maupun fisik, bagi seluruh tenaga kerja. BPKH dengan tegas berkomitmen untuk mematuhi prinsip ini, dan melaksanakan implementasi kebijakan yang sesuai untuk menjamin perlindungan tersebut bagi semua pihak yang terlibat.

As stated in paragraph (1), the requirement to employ workers entails the responsibility to offer full protection for all workers, which includes aspects of welfare, safety, and health, both mentally and physically. BPKH is firmly committed to adhering to this principle, and implementing appropriate policies to ensure such protection for all parties involved.

PROGRAM KESELAMATAN KERJA

Setiap tugas yang dilakukan oleh pegawai BPKH memiliki potensi bahaya, dan kami memahami betapa pentingnya perilaku yang aman dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera. Pada tahun 2023 BPKH tidak melaksanakan program pelatihan apapun yang terkait dengan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Walaupun demikian, kami selalu mengupayakan setiap pihak yang terlibat telah memahami pentingnya berperilaku aman.

LAYANAN KESEHATAN PEGAWAI

Dalam semangat menghormati hak setiap pegawai dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan kondusif, BPKH menjalankan program layanan kesehatan pegawai yang komprehensif. Kami memprioritaskan kesejahteraan dan keselamatan setiap individu dengan memastikan akses mudah dan terjamin terhadap layanan kesehatan. Sebagai bagian dari upaya ini, BPKH menyediakan fasilitas *Medical Check Up* setiap tahun bagi seluruh pegawai, yang bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan mereka secara berkala. Selain itu, kami juga memberikan fasilitas asuransi kesehatan kepada seluruh pegawai, sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan dan penanganan risiko penyakit yang mungkin timbul akibat pekerjaan.

KESELAMATAN MITRA KEMASLAHATAN

Hingga saat ini, BPKH belum memiliki peraturan khusus terkait K3 dalam kerjasama dengan Mitra Kemaslahatan. Namun, dalam melaksanakan kegiatan Kemaslahatan yang melibatkan Mitra Kemaslahatan, terutama pada kegiatan konstruksi, BPKH mengacu pada aturan dan pedoman yang diterapkan oleh masing-masing Mitra Kemaslahatan.

KOMITE K3

Dalam aspek regulasi dan struktur organisasi, BPKH belum membentuk Komite K3. Meskipun demikian, BPKH telah menetapkan sebuah unit khusus yang bertugas merespons keadaan darurat di lingkungan kantor, yaitu *Crisis Management Team* (CMT).

KASUS KECELAKAAN KERJA [GRI 416-2]

Selama Periode Pelaporan, tidak terdapat kejadian dan insiden apapun terkait pekerjaan ataupun regulasi yang terjadi di lingkungan BPKH maupun pada Mitra Kemaslahatan.

OCCUPATIONAL SAFETY PROGRAM

Each BPKH employee's task might possess potential hazards, which is why we believe that safe behavior is crucial in preventing accidents and injuries. BPKH did not implement any training programs related to Occupational Health and Safety (OHS) in 2023. Nevertheless, we always strive for every involved party to understand the importance of safe behavior.

EMPLOYEE HEALTH SERVICES

BPKH operates a comprehensive employee healthcare program in the spirit of respecting every employees' rights while also ensuring a safe and conducive working environment. We prioritize each individual's well-being and safety by ensuring easy and reliable access to health services. As part of this effort, BPKH provides an annual Medical Check Up facility for all employees that aims to regularly monitor their health conditions. Additionally, we also provide health insurance facilities to all employees, as a form of support for the protection and management of possible work-related disease risks.

PARTNER'S SAFETY

Until recently, BPKH has not developed specific regulations for OHS in cooperation with Benefit Program Partners. However, while conducting Benefit Program activities involving Partners, particularly in construction activities, BPKH refers to the rules and guidelines applied by each Benefit Program Partners.

OHS COMMITTEE

In terms of regulation and organizational structure, BPKH has not yet established an OHS Committee. However, BPKH has established a special unit, the Crisis Management Team (CMT), which is responsible for responding to office-related emergencies..

WORK ACCIDENT CASES [GRI 416-2]

During the Reporting Period, no work-related incidents or events related to work or regulations that occurred within BPKH or Benefit Program Partners sites.



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Managing BPKH's Sustainability

112 TATA KELOLA BPKH

BPKH Governance

115 ORGAN TATA KELOLA BIDANG KEMASLAHATAN

Governance Organs of the Benefit Program Division

123 NILAI DAN INTEGRITAS

Values and Integrity

BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji



131 PENGELOLAAN RISIKO

Risk Management

135 PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Stakeholder Engagement

137 TANTANGAN PENERAPAN ASPEK KEBERLANJUTAN

Challenges in Sustainability Aspects Implementation



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Mengelola Keberlanjutan BPKH

TATA KELOLA BPKH

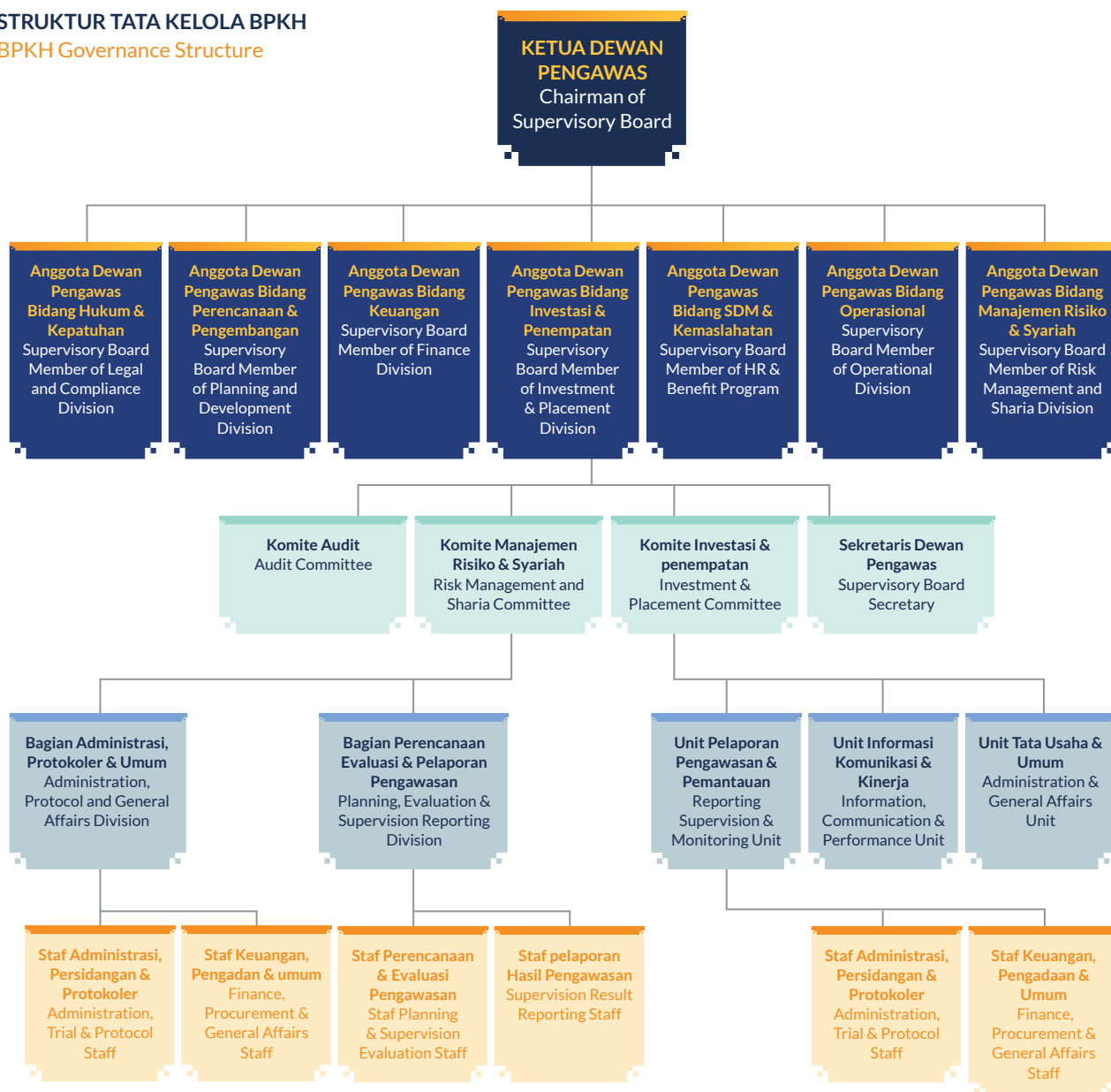
BPKH Governance

Pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan tanggung jawab seluruh jajaran BPKH guna membangun lembaga yang sehat, tangguh, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BPKH senantiasa melakukan proses evaluasi secara berkala terhadap penerapan tata kelola organisasi. Proses evaluasi ini dilakukan oleh Bidang Kepatuhan atau pihak lain sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

BPKH's entire management level is responsible for the implementation of good governance to build an institution that is healthy, resilient, and aligned with sharia principles. BPKH's Compliance Division or other parties continuously conducts a regular evaluation process on the implementation of organizational governance at least once every 1 (one) year.

STRUKTUR TATA KELOLA BPKH

BPKH Governance Structure



Komposisi Dewan Pengawas BPKH [GRI 2-9]

Composition Of The BPKH Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Kompetensi Competence	Unsur Keanggotaan Element of Membership	Masa Jabatan Term of Office
H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak. MSc., CA, Asean CPA.	Ketua Dewan Pengawas Chairman of Supervisory Board	Pria Male	Perencanaan dan Pengkajian Planning and Assessment	Pemerintah Government	2022-2027
H. Heru Muara Sidik, Ak. CMA, CA, MM, QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Pria Male	Investasi Surat Berharga dan Emas, Transformasi dan Teknologi Informasi Securities and Gold Investment, Transformation and Information Technology	Masyarakat Public	2022-2027
Dr. H. Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Pria Male	Keuangan dan Manajemen Risiko, Perencanaan dan Pengkajian Finance and Risk Management, Planning and Assessment	Masyarakat Public	2022-2027
H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., M.H.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Pria Male	Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan, Keuangan Agency Secretariat and Welfare, Finance	Masyarakat Public	2022-2027
Dr. H. Rojikin, S.H., M.Si., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Pria Male	SDM dan Pengadaan Barang dan Jasa, Hukum dan Kepatuhan HR, Procurement of Goods and Services, Law and Compliance	Masyarakat Public	2022-2027
Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., MSi., CPMA, SAS., CA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Pria Male	Keuangan, Penghimpunan, Penempatan, Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Finance, Collection, Placement, Direct Investment and Other Investments Sectors	Masyarakat Public	2022-2027
Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Pria Male	Hukum dan Kepatuhan, Investasi dan Kerja Sama Luar Negeri Law and Compliance, Foreign Cooperation	Masyarakat Public	2022-2027



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Mengelola Keberlanjutan BPKH

Komposisi Badan Pelaksana BPKH [GRI 2-9]

Composition Of The BPKH Executive Board

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Kompetensi Competence	Masa Jabatan Term of Office
Fadlul Imansyah S.E., M.M., CFP, AAK	Kepala Badan Pelaksana merangkap Anggota Chief of Executive Board concurrently Member	Pria Male	Hukum dan Kepatuhan Law and Compliance	2022-2027
Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.	Anggota Badan Pelaksana Executive Board Member	Pria Male	Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management	2022-2027
Dr. Indra Gunawan, S.E., S.IP., M.Sc., CI Arb, CSA., CIB., CPM	Anggota Badan Pelaksana Executive Board Member	Pria Male	Investasi Surat Berharga dan Emas, Transformasi dan Teknologi Informasi Securities and Gold Investment, Transformation and Information Technology	2022-2027
Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.	Anggota Badan Pelaksana Executive Board Member	Pria Male	Penghimpunan, Penempatan, Investasi Langsung, dan Investasi Lainnya Collection, Placement, Direct Investment and Other Investments Sectors	2022-2027
Prof. Dr. H. M. Arief Mufraini Lc., M.Si.	Anggota Badan Pelaksana Executive Board Member	Pria Male	Investasi dan Kerja Sama Luar Negeri Investment and Foreign Cooperation	2022-2027
Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP	Anggota Badan Pelaksana Executive Board Member	Pria Male	Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan Agency Secretariat and Welfare	2022-2027
Dr.(C) Sulistyowati M.E., WMI. CFP	Anggota Badan Pelaksana Executive Board Member	Wanita Female	SDM, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Pengkajian HR, Procurement of Goods and Services, Planning and Assessment	2022-2027

ORGAN TATA KELOLA BIDANG KEMASLAHATAN [GRI 2-9]

Governance Organs of the Benefit Program Division

BPKH berkomitmen untuk menyalurkan nilai manfaat yang berkelanjutan melalui pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan yang selalu memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Oleh karena itu, BPKH membentuk Bidang Kemaslahatan untuk mengelola nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU).

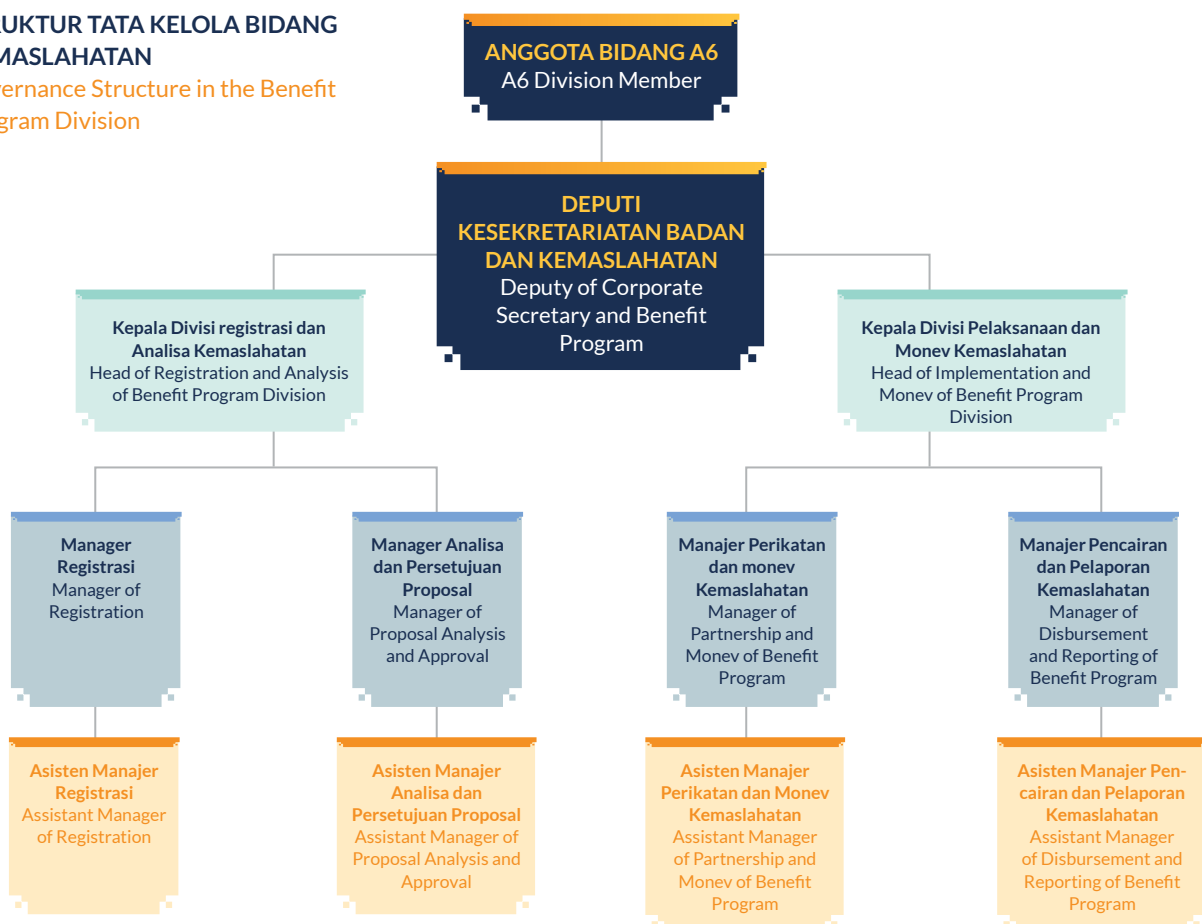
BPKH is committed to distributing returns through the implementation of Benefit Program activities that always take into account the social, environmental and governance aspects. Therefore, BPKH established the Benefit Program Division to manage the return from Ummah Trust Fund (DAU).

Bidang Kemaslahatan BPKH berada di bawah pengawasan Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan dan Kemaslahatan (Anggota Bidang A6) dan dibantu oleh Deputy Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan. Sedangkan pelaksanaan teknis Program Kemaslahatan berada di bawah tanggung jawab Kepala Divisi Registrasi dan Analisis Kemaslahatan serta Kepala Divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan. [GRI 2-11, SEOJK E.1]

Executive Board Members of Corporate Secretary and Benefit Program Division (A6 Division Member), assisted by the Deputy of Corporate Secretary and Benefit Program, oversee BPKH Benefit Program Division. Meanwhile, the Benefit Program's technical implementation is under the responsibility of the Head of the Registration and Analysis of Benefit Program Division and the Head of the Implementation and Monev of the Benefit Program Division. [GRI 2-11, SEOJK E.1]

STRUKTUR TATA KELOLA BIDANG KEMASLAHATAN

Governance Structure in the Benefit Program Division





MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Mengelola Keberlanjutan BPKH

ANGGOTA BADAN PELAKSANA BIDANG KESEKRETARIATAN DAN KEMASLAHATAN (ANGGOTA BIDANG A6)

Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan dan Kemaslahatan (Anggota Bidang A6) merupakan organ tertinggi dalam Bidang Kemaslahatan BPKH yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 29. Pencalonan Anggota Bidang A6 dilakukan oleh Panitia Seleksi dari sejumlah lembaga pemerintah dan berasal dari unsur profesional. Setiap Anggota Bidang A6 terikat ketentuan yang berlaku bagi aparatur sipil negara, sehingga tidak diperbolehkan melakukan rangkap jabatan. Organ ini memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Anggota Bidang A6 bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dukungan administrasi perkantoran, pengkoordinasian hubungan antar lembaga, pengelola kehumasan BPKH, dan mengoordinasikan Kegiatan Kemaslahatan yang meliputi tujuh *asnaf*. Dalam proses penyusunan Laporan Kemaslahatan, Anggota Bidang A6 bertugas memberikan pengesahan topik material, isi, dan standar laporan kemaslahatan (Laporan Keberlanjutan BPKH). [GRI 2-14]

Selain penjaminan Laporan Kemaslahatan, Anggota Bidang A6 juga bertanggung jawab dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan target yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan termasuk dampak ekonomi, lingkungan dan sosial. Untuk memastikan strategi dan kebijakan yang disusun berlangsung sesuai arah, Anggota Bidang A6 juga melakukan pemantauan serta evaluasi. Frekuensi pemantauan dan evaluasi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan hasil tinjauan tersebut akan dijadikan bahan masukan selanjutnya. [GRI 2-12]

DEPUTI KESEKRETARIATAN BADAN DAN KEMASLAHATAN

Deputi Kesekretariatan dan Kemaslahatan bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Anggota Bidang A6 dalam menangani dan mengoordinasikan semua aspek pekerjaan Bidang Kemaslahatan. Bagian ini bertugas dalam koordinasi penyelenggaraan dukungan administrasi perkantoran, pengkoordinasian hubungan antar lembaga,

MEMBERS OF THE EXECUTIVE BOARD IN CHARGE OF CORPORATE SECRETARIAT AND BENEFIT PROGRAM DIVISION (A6 DIVISION MEMBER)

Based on Law Number 34 of 2014 Article 29, the President directly appoints and dismisses Executive Board Members of Corporate Secretary and Benefit Program Division (A6 Division Member) who are the highest organ in the BPKH Benefit Program Division. By considering professional elements, A6 Division Members' nomination is conducted by a Selection Committee from several government agencies. A6 Division Members are bound by the regulations applied to state civil servants that prevent them from holding multiple positions. This organ serves for 5 (five) years and can be proposed to be reappointed for the next 1 (one) term.

A6 Division Members are responsible for organizing office administration support, coordinating inter-institutional relations, managing BPKH public relations, and coordinating Benefit Program activities covering seven *asnaf*. A6 Division Members are also responsible for authorizing the material topics, contents, and standards of the Kemaslahatan Report (BPKH's Sustainability Report) while it is being prepared. [GRI 2-14]

Beyond ensuring the Kemaslahatan Report, members of Division A6 are also responsible for formulating strategies, policies, and targets related to sustainability aspects, including economic, environmental, and social impacts. To ensure that the formulated strategies and policies are on track, Division A6 members also conduct monitoring and evaluation. The frequency of monitoring and evaluation is determined based on needs, and the results of such reviews will serve as input for subsequent actions. [GRI 2-12]

DEPUTY OF CORPORATE SECRETARY AND BENEFIT PROGRAM

Deputy of Corporate Secretariat and Benefit Program is responsible for extending the work of A6 Division Members by handling and organizing all Social Benefit Program Division's work aspects. This division is in charge of coordinating the implementation of office administrative support and inter-institutional relations, managing BPKH

pengelola kehumasan BPKH dan mengkoordinasikan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Deputy Kesekretariatan dan Kemaslahatan juga bertanggung jawab dalam pengawasan manajemen dampak dari program-program kemaslahatan yang dilakukan oleh BPKH, termasuk dampak ekonomi, lingkungan dan sosial. Dalam fungsi ini, Deputy Kesekretariatan dan Kemaslahatan juga telah menandatangani pakta integritas untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan. Deputy Kesekretariatan dan Kemaslahatan serta Anggota Bidang A6 akan melaporkan kembali kinerjanya dalam mengelola dampak organisasi terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan masyarakat, secara berkala kepada Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH. Pelaporan ini dilakukan dalam Rapat Evaluasi yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. [GRI 2-11, 2-13]

DIVISI REGISTRASI DAN ANALISA KEMASLAHATAN

Divisi Registrasi dan Analisis Kemaslahatan terdiri dari Kepala Divisi, Manajer dan Asisten Manajer Registrasi, serta Manajer dan Asisten Manajer Analisa dan Persetujuan Proposal. Divisi ini bertugas melaksanakan registrasi dan analisis seluruh proposal kegiatan yang terkait dengan kegiatan kemaslahatan umat. Seluruh proposal yang diterima akan diproses secara adil dan sama dengan mempertimbangkan: jenis kegiatan, lokasi kegiatan, nominal pengajuan, legalitas Penerima Manfaat, kelayakan teknis dan hal lain yang relevan. Proposal yang lolos akan dibawa ke Rapat Komite Evaluasi Kemaslahatan untuk disetujui. Selanjutnya Manajer dan Asisten Manajer akan menunjuk Mitra Kemaslahatan yang cocok untuk melakukan penilaian terhadap proposal yang dinyatakan lulus tahap seleksi.

public relations, as well as coordinating activities for the prosperity of Muslims. The Deputy of Corporate Secretariat and Benefit Program is responsible for overseeing the management of the impacts of BPKH's benefit programs, including economic, environmental, and social effects. In this role, the Deputy of Corporate Secretariat and Benefit Program has signed an integrity pact to prevent conflicts of interest. The Deputy of Corporate Secretary and Benefit Program, along with the A6 Division Member, will report back periodically to the Supervisory Board and the Executive Board of BPKH on their performance in managing the organization's impact on economic, environmental, and social aspects. This reporting is conducted in an Evaluation Meeting held every three months. [GRI 2-11, 2-13]

REGISTRATION AND ANALYSIS OF BENEFIT PROGRAM DIVISION

The Registration and Analysis of Benefit Program Division consists of the Head of Division, Manager and Assistant Manager of Registration, and Manager and Assistant Manager of Proposal Analysis and Approval. This division is responsible for registering and analyzing all activity proposals related to the benefit of ummah. All proposals will be processed fairly and equally by considering the activity's type and location, proposed amount, Beneficiary's legality, technical feasibility and other relevant matters. Proposals that passed the initial stage will be presented to the Benefit Evaluation Committee Meeting for approval. The Manager and Assistant Manager will then appoint a competent Benefit Program Partner to assess the proposals that pass the selection stage.

Kepala Divisi Registrasi Dan Analisa Kemaslahatan
Head of Registration and Analysis of Benefit Program Division

Melaksanakan registrasi dan analisis seluruh proposal kegiatan yang terkait dengan kegiatan kemaslahatan umat.
Conducting registration and analysis of all activity proposals related to the welfare of ummah.

Manajer dan Asisten Manajer Registrasi
Manager and Assistant Manager of Registration

Memastikan pengelola proposal dari calon Penerima Manfaat yang meliputi proses *screening* dan seleksi proposal.
Ensuring the proposals from prospective Beneficiaries are managed, which includes the proposals screening and selection process.

Manajer dan Asisten Manajer Analisa dan Persetujuan Proposal
Manager and Assistant Manager of Proposal Analysis and Approval

Menganalisa proposal Kegiatan Kemaslahatan yang diajukan Mitra Kemaslahatan untuk merealisasikan proposal dari calon Penerima Manfaat yang telah lulus seleksi dan melakukan *assessment* tahap dua.
Analyzing the proposals for Benefit activities submitted by Partners to realize proposals from prospective Beneficiaries that have passed the selection and conduct second stage assessments.



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

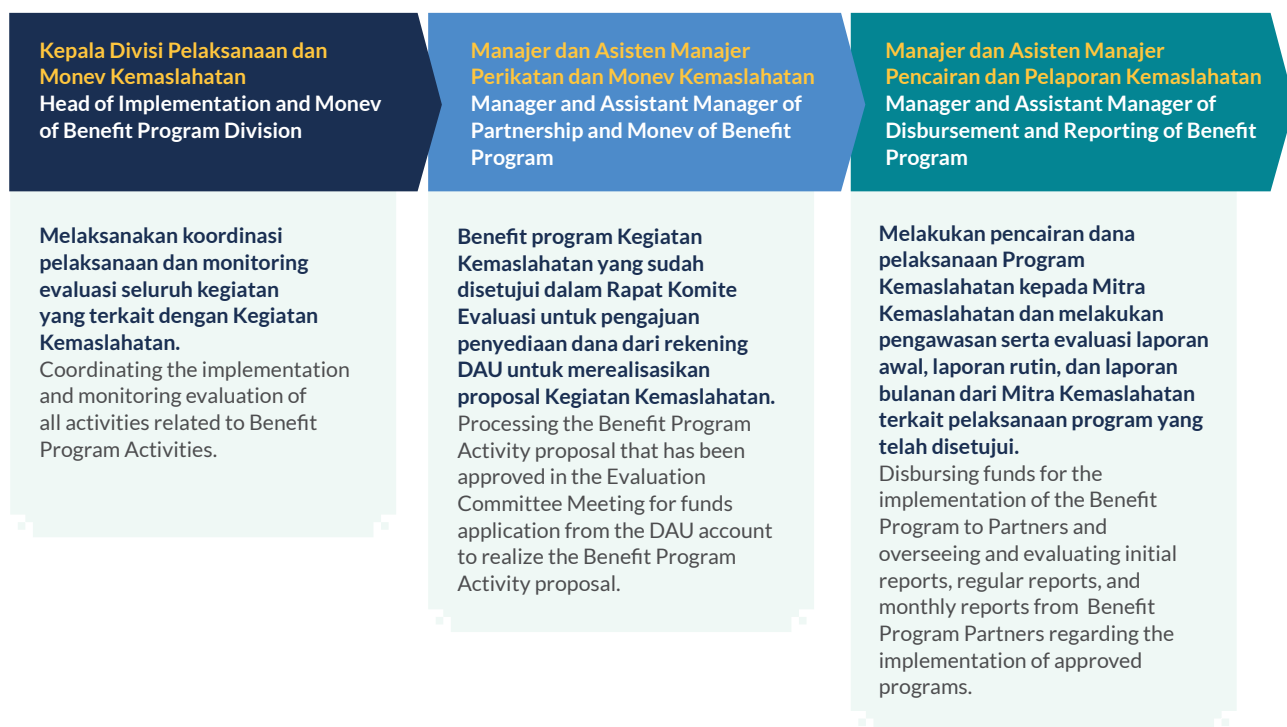
Mengelola Keberlanjutan BPKH

DIVISI PELAKSANAAN DAN MONEV KEMASLAHATAN

Divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan terdiri dari Kepala Divisi, Manajer dan Asisten Manajer Perikatan dan Monev Kemaslahatan, serta Manajer dan Asisten Manajer Pencairan dan Pelaporan Kemaslahatan. Divisi ini merupakan penanggung jawab utama dalam pengusunan Laporan Kemaslahatan, dengan pengawasan langsung dari Anggota Bidang A6. Selain itu, seluruh proses kegiatan yang dilaporkan juga akan tetap diawasi oleh Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

IMPLEMENTATION AND MONEV OF BENEFIT PROGRAM DIVISION

Implementation and Monev of Benefit Program Division consists of the Head of Division, Manager and Assistant Manager of Partnership and Monev of Benefit Program, and Manager and Assistant Manager of Benefit Disbursement and Reporting of Benefit Program. With direct oversight by the A6 Division Members, this division is primarily responsible for preparing the Benefit Program Report. In addition, the Head of the Executive Body and the Supervisory Board will oversee the entire reported activities process.



KOMUNIKASI MASALAH PENTING [GRI 2-16]

Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana menjadi media untuk menyampaikan setiap permasalahan penting yang terjadi kepada Badan Tata Kelola Tertinggi BPKH. Rapat ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali untuk membahas semua masalah yang terjadi dalam lingkup BPKH, termasuk Bidang Kemaslahatan. Sedangkan untuk masalah penting dengan kategori kejadian luar biasa, akan ditindaklanjuti oleh *Crisis Management Team* (CMT) agar dapat segera ditindaklanjuti dan diteruskan pada pimpinan.

COMMUNICATION OF SIGNIFICANT PROBLEMS [GRI 2-16]

Any significant problems that affect BPKH's Highest Governance Body are communicated during the Joint Meeting of the Supervisory Board and the Executive Board. This monthly meeting will discuss any problems that occur within BPKH's scope, including the Benefit Program Division. Any significant problems categorized as extraordinary events will be followed up and then reported to the leaders by the Crisis Management Team (CMT). Significant problems categorized as extraordinary

Masalah penting dengan kategori kejadian luar biasa akan dibahas dalam rapat Badan Pelaksana kemudian segera dilaporkan kepada Dewan Pengawas melalui mekanisme Rapat Gabungan diluar agenda rapat rutin. Selama periode pelaporan, tidak terdapat kejadian luar biasa yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Kemaslahatan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT ASPEK KEBERLANJUTAN [GRI 2-17, SEOJK E.2]

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas praktik-praktik keberlanjutan, perlu dilakukan program-program pengembangan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam inisiatif keberlanjutan Kegiatan Kemaslahatan. Program pengembangan yang diselenggarakan dapat mencakup topik-topik yang terkait dengan aspek keberlanjutan atau berupa kegiatan pelatihan internal serta eksternal ataupun sertifikasi profesi yang difasilitasi BPKH.

Sepanjang tahun 2023, Anggota Bidang A6, Dewan Pengawas, dan Deputy Kesekretariatan dan Kemaslahatan BPKH telah mengikuti dua program pengembangan khusus yang berfokus pada aspek-aspek keberlanjutan. Partisipasi dalam program-program ini menunjukkan komitmen BPKH untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, khususnya dalam Bidang Kemaslahatan, memiliki pemahaman yang mendalam dengan perkembangan terbaru dalam isu-isu keberlanjutan. Dengan demikian, BPKH terus berupaya untuk memperkuat kompetensi keberlanjutan di dalam organisasinya

events will be discussed in the Governing Body meeting and then immediately reported to the Supervisory Board through the Joint Meeting mechanism outside the regular meeting agenda. During the reporting period, there were no extraordinary events related to the Benefit Benefit Program Division's activities.

COMPETENCY DEVELOPMENT RELATED TO SUSTAINABILITY ASPECTS [GRI 2-17, SEOJK E.2]

As an effort to increase the capacity of sustainability practices, development programs must be in place for those directly involved in the sustainability initiative of Benefit Program Activities. Development programs might include topics related to sustainability aspects, or through internal and external training activities as well as or professional certifications facilitated by BPKH.

Throughout 2023, Members of Sector A6, the Supervisory Board, and the Deputy Secretariat and Welfare of BPKH participated in two specialized development programs focused on sustainability aspects. Participation in these programs reflects BPKH's commitment to ensuring that all involved parties, particularly in the Welfare Sector, are well-informed about the latest developments in sustainability issues. Consequently, BPKH continues to strengthen sustainability competencies within its organization.

Pengembangan Kompetensi Terkait Aspek Keberlanjutan

Competency Development Related to Sustainability Aspects

No.	Topik Pelatih	Training Topic
1	Pelatihan Praktisi Nilai Sosial & SROI	Social Value & SROI Practitioner Training
2	Mengukur Pengembalian Sosial atas Investasi CSR Anda (SROI)	Measuring Social Return on Your CSR Investment (SROI)
3	Pelatihan Pembiayaan ESG dengan Obligasi Hijau	ESG Financing with Green Bonds Training
4	Pelatihan Investasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)	Environmental, Social, and governance (ESG) Investing Training

NOMINASI DEWAN PENGAWAS DAN BADAN PELAKSANA [GRI 2-10]

Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dilakukan oleh Presiden,

NOMINATION OF EXECUTIVE BOARD MEMBERS AND THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS [GRI 2-10]

The Nomination and dismissal of members of the Supervisory Board and Executive Board are carried out by



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Mengelola Keberlanjutan BPKH

dengan memastikan pelibatan pemangku kepentingan sesuai UU No. 34/2014 dan Perpres No.10/2017. Presiden akan menunjuk panitia seleksi khusus dengan kompetensi yang sesuai. Panitia seleksi terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintahan dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat.

Panitia seleksi akan menyusun komposisi anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang tidak hanya memiliki kompetensi yang relevan, tetapi juga mencerminkan keberagaman latar belakang, termasuk ras, etnis, gender, dan agama. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta representasi yang seimbang dan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Panitia seleksi akan memilih 7 (tujuh) orang anggota Dewan Pengawas, yang terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur masyarakat dan 2 (dua) orang dari unsur pemerintah. Calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah harus berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang agama dan bidang keuangan. Sedangkan pada nominasi anggota Badan Pelaksana, panitia seleksi paling sedikit akan memilih 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.

REMUNERASI BADAN PELAKSANA [GRI 2-19, 2-20]

Kebijakan remunerasi dan kompensasi total tahunan bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas BPKH diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya Bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa BPKH memiliki wewenang untuk melakukan penundaan pembayaran sebagian atau seluruh tantiem/insentif Kinerja yang ditangguhkan, maupun menarik kembali tantiem dan insentif Kinerja tunai yang telah dibayarkan (*clawback*) kepada Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Kebijakan remunerasi dan kompensasi total tahunan bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas BPKH ditetapkan sesuai dengan tanggung jawab serta profesionalisme dalam menjalankan tugas masing-masing, termasuk dalam mengelola dampak aktivitas BPKH terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Remunerasi dan kompensasi total tahunan ditetapkan

the President, ensuring the involvement of stakeholders as mandated by Law No. 34/2014 and Presidential Regulation No. 10/2017. The President will appoint a special selection committee with the appropriate expertise. The selection committee will consist of 3 members from the government and 6 members from the community.

The selection committee will formulate a composition of members of the Supervisory Board and Executive Board that not only possesses relevant competencies but also reflects diversity in backgrounds, including race, ethnicity, gender, and religion. This is expected to create a balanced representation and more comprehensive decision-making.

The selection committee will select 7 members for the Supervisory Board, comprising 5 members from the community and 2 members from the government. Government representatives must come from ministries overseeing religious and financial affairs. For the nomination of Executive Board members, the selection committee will select at least 5 members from the professional sector, serving a term of 5 years.

REMUNERATION OF EXECUTIVE BOARD MEMBERS [GRI 2-19, 2-20]

The remuneration and total annual compensation policy for BPKH's Executive Board Members and the Supervisory Board Members are regulated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 49 of 2020 concerning Salary or Wages and Other Financial Rights for Executive Board Members and the Supervisory Board Members of the Hajj Fund Management Agency. Based on the prevailing Presidential Regulation, there are no provisions that explicitly state that BPKH has the authority to defer the payment of part or all of the deferred performance bonuses/incentives (*malus*), nor to reclaim performance bonuses and cash incentives that have already been disbursed (*clawback*) to the Supervisory Board and the Executive Body.

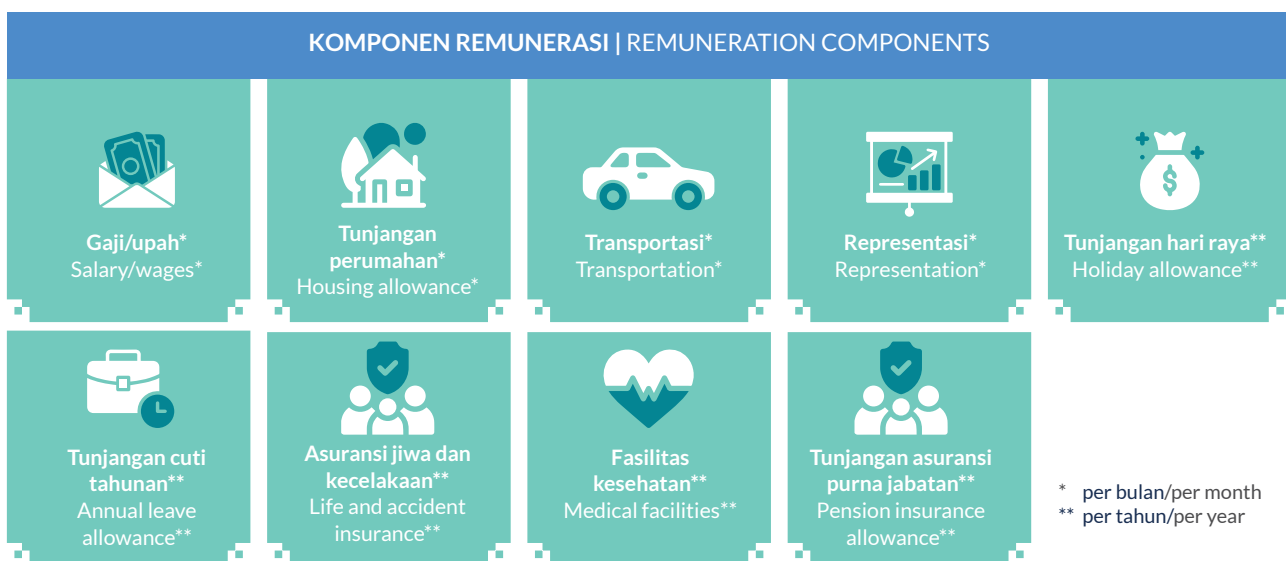
The remuneration policy and annual total compensation for BPKH's Executive Board Members and the Supervisory Board Members are determined based on their responsibilities and professionalism in carrying out their respective duties, including managing the impact of BPKH's activities on economic, environmental, and social aspects. Remuneration and total annual compensation

dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan BPKH, tingkat inflasi, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Meskipun remunerasi Badan Pelaksana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020, namun penilaian kinerja Badan Pelaksana dilakukan oleh Dewan Pengawas secara independen tanpa melibatkan Badan Pelaksana BPKH. Badan Pengawas ini berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari unsur masyarakat, serta unsur Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama yang merupakan para ahli di bidangnya sebagai stakeholder. Proses ini melalui berbagai metode evaluasi, sehingga tidak ada pelibatan konsultan dalam penentuan remunerasi atau dengan metode voting. Berikut adalah cakupan remunerasi Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas hingga 31 Desember 2023.

are determined by considering fund management factors, assets, BPKH's conditions and capabilities, inflation rates, and other relevant factors.

Although the remuneration of the Executive Board has been regulated under Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 49 of 2020, the performance evaluation of the Executive Board is conducted independently by the Supervisory Board without involving the BPKH Executive Board. The Supervisory Board is comprised of representatives from the House of Representatives (DPR), including members of the public, as well as experts from the Ministry of Finance and the Ministry of Religious Affairs as stakeholders. This process involves various evaluation methods, with no involvement of consultants or the use of voting in determining remuneration. Therefore, the following outlines the remuneration scope for the Executive Body and the Supervisory Board as of December 31, 2023.



Rasio Total Kompensasi Tahunan Organ Kemaslahatan Dibandingkan Pimpinan BPKH
[GRI 2-21]

2023	2022	2021
4,64 : 1	4,05 : 1	3,79 : 1

Ratio of Total Annual Compensation of Benefits Organs to BPKH Chairman
[GRI 2-21]

Catatan: Rasio total kompensasi tahunan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas terhadap total kompensasi tahunan rata-rata semua pegawai.

Notes: The ratio of the total annual compensation of Executive Board Members and the Supervisory Board Members to the average total annual compensation of all employees.



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Mengelola Keberlanjutan BPKH

EVALUASI KINERJA DEWAN PENGAWAS DAN BADAN PELAKSANA [GRI 2-12, 2-18]

BPKH memahami bahwa komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang baik akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian kinerja berkelanjutan serta peningkatan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Dewan Pengawas bertugas memastikan pengelolaan BPKH oleh Badan Pelaksana dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus memberikan nasihat strategis untuk mendukung pencapaian tujuan BPKH.

Dewan Pengawas berperan dalam melakukan pengawasan dan memberikan panduan kepada Badan Pelaksana untuk memastikan bahwa aktivitas BPKH sejalan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2023 serta mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG di seluruh unit organisasi. Pengawasan ini juga bertujuan untuk memantau secara berkala pencapaian kinerja sepanjang tahun 2023 sebagai langkah sistem peringatan dini (early warning system) dan memastikan bahwa sistem pengendalian internal mendukung kinerja BPKH.

Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan aktif berbasis risiko, sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya, yang merujuk pada Key Performance Indicator (KPI) termasuk aspek keberlanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas telah memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana terkait penerapan strategi, implementasi kebijakan BPKH, serta memberikan persetujuan tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Rekomendasi ini diimplementasikan oleh Badan Pelaksana sebagaimana diarahkan oleh Dewan Pengawas.

EVALUATION OF EXECUTIVE BOARD MEMBERS AND THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS [GRI 2-12, 2-18]

BPKH recognizes that a strong commitment to implementing sound Good Corporate Governance (GCG) principles will have a positive impact on achieving sustainable performance and enhancing added value for stakeholders. In accordance with Law Number 34 of 2014, the Supervisory Board is responsible for ensuring that the management of BPKH by the Executive Body is conducted in compliance with applicable regulations, while also providing the necessary strategic advice to achieve BPKH's objectives.

The Supervisory Board plays a key role in overseeing and advising the Executive Body to ensure that BPKH's activities align with the 2023 Work Plan and Annual Budget (RKAT) and that GCG principles are applied across all organizational units. This oversight is also intended to monitor performance achievements periodically throughout 2023 as part of an early warning system, and to ensure that internal control systems support BPKH's performance objectives.

The Supervisory Board actively carries out risk-based oversight in line with its responsibilities and authorities, referring to Key Performance Indicators (KPIs) that include sustainability aspects covering economic, environmental, and social dimensions.

Throughout 2023, the Supervisory Board has provided adequate advice and recommendations to the Executive Body, including on strategy implementation, BPKH policy execution, and granting approvals as required under its authority. These recommendations have been implemented by the Executive Body in line with the guidance provided by the Supervisory Board.

NILAI DAN INTEGRITAS [GRI 2-23]

Values and Integrity



BPKH senantiasa berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM dan Deklarasi ILO. Komitmen ini tercermin dalam Code of Conduct BPKH, di mana setiap individu yang berada di bawah naungan BPKH diwajibkan untuk mematuhi aturan dan kode etik yang telah ditetapkan. Code of Conduct bertujuan untuk menciptakan standar perilaku moral dan emosional yang baik dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja, atasan, dan bawahan, sesuai dengan Pasal 24 Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan peraturan terkait lainnya. Dalam upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia di lingkungan kerja, BPKH memastikan penerapan Code of Conduct bagi seluruh pejabat dan pegawai. Peraturan lengkap BPKH dapat diakses melalui tautan berikut: <https://bpkh.go.id/download/salinan-pbpkh-no-3-tahun-2018/>.

Pedoman Etika Kerja berperan sebagai alat untuk membangun budaya kerja yang positif. Pedoman ini memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota BPKH dalam menjalankan aktivitas

BPKH is committed to upholding internationally recognized human rights, including those outlined in the Universal Declaration of Human Rights and the ILO Declaration. This commitment is reflected in BPKH's Code of Conduct, which requires every individual within BPKH to adhere to established rules and ethical guidelines. The Code of Conduct aims to create a standard of moral and emotional behavior in interactions among colleagues, superiors, and subordinates, in accordance with Article 24 of BPKH Regulation Number 3 of 2018, which refers to Law Number 34 of 2012 concerning Hajj Financial Management and other related regulations. In its efforts to prioritize human rights in the workplace, BPKH ensures the implementation of the Code of Conduct for all officials and employees. The full BPKH regulations can be accessed through the following link: <https://bpkh.go.id/download/salinan-pbpkh-no-3-tahun-2018/>.

The Work Ethics Guidelines serve as a tool to build a positive work culture. This guideline provides guidance on the expected behavior of all BPKH members in carrying out their daily activities. The Work Ethics Guidelines also apply



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Mengelola Keberlanjutan BPKH

sehari-hari. Selain itu, Pedoman Etika Kerja ini juga berlaku secara universal untuk semua jenjang jabatan selama menjalankan tugas untuk memastikan terjaganya citra dan kredibilitas lembaga.

Jika terdapat pelaporan di sistem WBS dimana salah seorang atau lebih dari pihak terlapor adalah Kepala Badan Pelaksana, Anggota Badan Pelaksana, Ketua Dewan Pengawas, dan/atau Anggota Dewan Pengawas; maka BPKH akan membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*. Dewan Kehormatan terdiri dari unsur Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas, jika dianggap perlu, Badan Pelaksana juga dapat menunjuk pihak eksternal sebagai anggota Dewan Kehormatan kode etik. [GRI 2-25]

universally to all position levels when carrying out their duties to ensure the institution's image and credibility is maintained.

If one or more of the reported parties in the WBS system identify as the Head of the Executive Board, Executive Board Members, Chairman of the Supervisory Board, and/or Supervisory Board Members; then BPKH will establish an ad hoc Code of Ethics Honorary Council. The Honorary Council consists of elements of the Executive Board and the Supervisory Board, and if deemed necessary, the Executive Board can also appoint external parties as members of Code of Ethics Honorary Council. [GRI 2-25]

	Kode Etik BPKH BPKH Code of Ethics		Tata Perilaku Pejabat dan Pegawai Code of Conduct for Officials and Employees
	1. Penegakan integritas 2. Menjaga kerahasiaan 3. Larangan penyalahgunaan jabatan 4. Kepatuhan penggunaan dokumen 5. Larangan benturan kepentingan 1. Enforcement of integrity 2. Maintain confidentiality 3. Prohibition of abuse of position 4. Document usage compliance 5. Prohibition of conflict of interest		1. Kepatuhan terhadap hukum 2. Benturan kepentingan 3. Pengendalian gratifikasi 4. Anti diskriminasi 5. Integritas laporan keuangan 6. Perlindungan informasi BPKH 7. Informasi orang dalam (<i>insider trading</i>) 8. Perlindungan harta BPKH 9. Kegiatan sosial dan politik 10. Perilaku etis terhadap sesama pegawai 1. Compliance with the law 2. Conflict of interest 3. Gratification control 4. Anti-discrimination 5. Financial report integrity 6. Protection of BPKH information 7. Insider information (<i>insider trading</i>) 8. Protection of BPKH assets 9. Social and political activities 10. Ethical behavior towards fellow employees

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI | PRINCIPLES OF HAJJ FUND MANAGEMENT



Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji telah menentukan beberapa asas sebagai panduan dalam menjalankan pengelolaan keuangan haji. Panduan ini dibuat sebagai komitmen BPKH untuk menjadi Lembaga pengelola keuangan yang terpercaya dan dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip pengelola Keuangan Haji yang dimaksud dalam peraturan tersebut mengacu kepada Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji.

Kode etik dan prinsip pengelola keuangan haji merupakan bentuk komitmen BPKH, untuk menjalankan kegiatannya secara bertanggung jawab. Isi dari kode etik dan prinsip pengelola keuangan haji secara langsung memastikan pelaksanaan *due diligence*, prinsip kehati-hatian, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap penerapan kode etik dan prinsip pengelola keuangan haji ini, BPKH senantiasa menekankan dan menanamkan prinsip pengelola keuangan haji dan kode etik dalam pelaksanaan aktivitas di lingkungan kerja BPKH.

BPKH Regulation Number 3 of 2018 concerning Compliance Policy, Implementation of Good Corporate Governance, Code of Ethics, and Integrity Pact of the Hajj Financial Management Agency has determined several principles as guidelines in carrying out Hajj financial management. This guideline is made as BPKH's commitment to become a trusted financial management institution that can provide benefits for the benefit of the people. The principles of Hajj Financial Management referred to in the regulation refer to Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management.

The code of ethics and principles of Hajj financial management is a form of BPKH's commitment, to carry out its activities responsibly. The contents of the code of ethics and principles of Hajj financial management directly ensure the implementation of due diligence, the precautionary principle, and respect for human rights. To ensure compliance with the implementation of this code of ethics and Hajj fund management principles, BPKH always emphasizes and instills the Hajj fund management principles and code of ethics in activities implementation within BPKH workplace.



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Mengelola Keberlanjutan BPKH

Prinsip-prinsip Pengelola Keuangan Haji	Hajj Fund Management Principles
1. Prinsip Syariah 2. Prinsip Kehati-hatian 3. Asas Manfaat 4. Asas Nirlaba 5. Asas Transparan 6. Asas Akuntabel	1. Sharia Principles 2. Prudence Principle 3. Benefit Principle 4. Non-profit Principle 5. Transparency Principle 6. Accountability Principle

KONFLIK KEPENTINGAN [GRI 2-15]

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab, BPKH berkomitmen untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil merupakan kepentingan umat dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga, BPKH berupaya mencegah terjadinya konflik kepentingan pada badan tata kelola tertinggi, dengan merujuk pada Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 Bagian IV.1 Angka 2 Lampiran I.

Setiap Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas wajib mengisi dan menyerahkan dokumen Formulir Deklarasi tidak merangkap jabatan dan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Mitra – Mitra BPKH. Selain itu, Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas juga harus menulis Surat Pernyataan mengenai hubungan kekeluargaan dengan pegawai BPKH lainnya.

Jika terjadi kasus benturan kepentingan, BPKH akan membentuk Dewan Kehormatan yang bersifat ad-hoc sesuai mekanisme penerapan kode etik. Jika dianggap perlu, Badan Pelaksana juga dapat menunjuk pihak eksternal sebagai anggota Dewan Kehormatan. Kasus tersebut juga akan disampaikan pada pemangku kepentingan terkait menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan. Selama tahun 2023, tidak terdapat kasus/situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan yang terjadi pada Bidang Kemaslahatan BPKH.

ANTI KORUPSI [GRI 3-3]

Sebagai lembaga yang memiliki mandat penting dalam pengelolaan dana haji, BPKH telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang ketat terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam semua aspek operasionalnya. Ini termasuk penetapan aturan yang jelas terkait larangan penerimaan hadiah/gratifikasi dalam bentuk dan keadaan apapun yang tertuang dalam

CONFLICT OF INTERESTS [GRI 2-15]

As a responsible financial institution, BPKH carries out its duties in commitment to ensuring that decisions are made in the interests of the ummah and society as a whole. To maintain public trust in the integrity of the institution, BPKH strives to prevent conflicts of interest in the highest governance body by referring to BPKH Regulation Number 3 of 2018 Section IV.1 Point 2 Appendix I.

Each Member of the Governing Body and Member of the Supervisory Board must fill out and submit a Declaration Form document that does not concurrently hold positions and has no conflict of interest with BPKH Partners. Executive Board Members and Supervisory Board Members must also submit a Statement Letter detailing their family relationships with other BPKH employees.

To address potential conflicts of interest, BPKH can establish an ad-hoc Honorary Board. This board, which may include external members, will operate in accordance with the organization's code of ethics. The case will also be communicated to the relevant stakeholders using the established mechanism. During 2023, there were no cases/situations with possible conflicts of interest that occurred in the BPKH Benefit Program Division.

ANTI KORUPSI [GRI 3-3]

As an institution that has an important mandate in managing Hajj funds, BPKH has established strict policies and procedures related to transparency, accountability, and prevention of corruption in all aspects of its operations. This includes the establishment of clear rules regarding the prohibition of receiving gifts/gratuities in any form and under any circumstances as stipulated in BPKH Regulation



Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, BPKH juga memperkuat mekanisme pengawasan dan pemantauan internal untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi tindakan korupsi melalui Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 8 Tahun 2019.

BPKH berupaya memperkuat budaya integritas dan kepatuhan pada seluruh pegawai. Ini dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan yang teratur tentang etika kerja, anti-korupsi, serta pelaporan pelanggaran. Selain itu, BPKH juga memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, sejak 2020 dan telah tersertifikasi oleh Badan Sertifikasi Nasional. Penerapan SMAP BPKH berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

No. 3/2018. In addition, BPKH also strengthens internal supervision and monitoring mechanisms to identify and prevent potential acts of corruption through the Head of Implementing Agency Regulation Number 8 of 2019.

BPKH strives to instill a culture of integrity and compliance among all employees through regular training and counseling on work ethics, anti-corruption, and whistleblowing. Since 2020, BPKH also ensures the implementation of the ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) and it also has been certified by the National Certification Agency. The implementation of BPKH's SMAP is guided by the Regulation of Head of Executive Board of BPKH Number 10 of 2022 on Guidelines for the Anti-Bribery Management System.

Hal yang dipertimbangkan BPKH dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016

1. Komitmen untuk menjalankan kegiatan pengelola Keuangan Haji sesuai dengan kode etik, ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta tidak melakukan praktik-praktik penyuapan dalam bentuk apapun;
2. Peningkatan kesadaran Sumber Daya Insani terhadap Anti Penyuapan, sehingga tercipta Sumber Daya Insani yang berintegritas, profesional dan beretika sesuai dengan kode etik yang berlaku;
3. Pencegahan, penanganan, pelaporan terjadinya praktik-praktik penyuapan, dan pemutakhiran ketentuan serta peraturan terkait Anti Penyuapan;
4. Pemberian kewenangan kepada Tim Kepatuhan Anti Penyuapan (TKAP) untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Matters that BPKH considers in implementing the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP)

1. Commitment to carry out Hajj Fund management activities in accordance with the code of ethics, applicable provisions and regulations, and not to carry out bribery practices in any form;
2. Increase Human Resources' awareness on Anti-Bribery to develop Human Resources with integrity, professionalism and ethics in accordance with the applicable code of ethics;
3. Prevention, management, reporting of bribery practices, and update on the Anti-Bribery provisions and regulations;
4. Authorizing the Anti-Bribery Compliance Team (TKAP) to ensure the effective implementation of the Anti-Bribery Management System.



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Mengelola Keberlanjutan BPKH

Komunikasi dan Pelatihan Terkait Kebijakan serta Prosedur Anti Korupsi [GRI 205-2]

Communication and Training on Anti-Corruption Policies and Procedures

	2023		2022		2021		
	Jumlah Peserta Number of Participants	%	Jumlah Peserta Number of Participants	%	Jumlah Peserta Number of Participants	%	
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada Badan Tata Kelola	61	35,88	14	100,00	14	100,00	Communication of Anti-Corruption Policies and Procedures to Governance Bodies
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada Pegawai	61	35,88	18	100,00	18	100,00	Communication of Anti-Corruption Policies and Procedures to Employees
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada Mitra	57	77,02	15	100,00	15	100,00	Communication of Anti-Corruption Policies and Procedures to Partners
Pelatihan Anti Korupsi pada Badan Tata Kelola	88	51,76	14	100,00	14	100,00	Anti-corruption Training for Governance Bodies
Pelatihan Anti Korupsi pada Pegawai	0	0	3	16,66	6	33,33	Anti-Corruption Training for Employees

Catatan/Notes:

- Sebagai lembaga yang mengelola keuangan haji secara menyeluruh di Indonesia, BPKH tidak melakukan segmentasi wilayah kerja. Oleh karena itu, data yang disajikan dalam tabel ini mewakili kondisi nasional.
- Data tahun 2022 dan 2021 hanya mencakup Divisi Kemaslahatan. Dan selama tahun pelaporan, tidak ada komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi yang diberikan oleh BPKH kepada pegawai di Divisi Kemaslahatan.
- As an institution responsible for managing Hajj funds throughout Indonesia, BPKH does not segment its operational areas. Therefore, the data presented in this table represents the national condition.
- The data for 2022 and 2021 only covers the Benefit Program Division. During the reporting year, there was no communication and training on anti-corruption policies and procedures provided by BPKH to employees in the Welfare Division.

Dalam penyaluran dana abadi umat melalui melalui serangkaian kegiatan kemaslahatan, setiap pegawai pegawai Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan diwajibkan untuk ikut serta dalam sosialisasi SMAP yang akan dilanjutkan dengan tes pemahaman SMAP sebagai bahan evaluasi. Selain pegawai, BPKH juga menyampaikan dan memastikan setiap Mitra Kemaslahatan memahami dan menerapkan SMAP dengan membuat Pakta Integritas yang menunjukkan komitmen mendukung penerapan SMAP di BPKH. Selama periode pelaporan, tidak terdapat pelaporan dari publik atas insiden pelanggaran yang berkaitan dengan korupsi dan gratifikasi yang menyebabkan pemutusan kontrak dengan mitra bisnis, hingga pemberhentian karyawan. [GRI 2-23, 205-3]

In the distribution of the Ummah Trust Fund through a series of benefit programs, every Corporate Secretary and Benefit Program Division employee must participate in the SMAP socialization which will be followed by an SMAP knowledge test as an evaluation material. Aside from employees, BPKH also conveys and ensures that each Benefit Program Partner understands and applies SMAP by signing an Integrity Pact that shows a commitment to support SMAP's implementation at BPKH. During the reporting period, there were no public reports of incidents involving corruption and gratification that resulted in the termination of contracts with business partners or the dismissal of employees. [GRI 2-23, 205-3]

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN [GRI 2-25, 2-26, 2-27, SEOJK F.24]

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) memungkinkan para pegawai atau pihak eksternal untuk melaporkan secara anonim setiap pelanggaran, penyalahgunaan, atau perilaku yang melanggar kode etik yang terkait dengan aktivitas BPKH. Sistem ini dirancang untuk memberikan saluran yang aman dan terpercaya bagi individu yang memiliki kekhawatiran terkait dengan tindakan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penyelenggaraan sistem WBS mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji yang berlandaskan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelola dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji.

WHISTLEBLOWING SYSTEM [GRI 2-25, 2-26, 2-27, SEOJK F.24]

Through the Whistleblowing System (WBS), employees or external parties are able to anonymously report any violations, abuse, or violates the code of ethics related to BPKH activities. This system is designed to provide a safe and trusted channel for individuals who have concerns related to actions that are inappropriate or do not comply with established standards. The implementation of the WBS system refers to the Regulation of the Head of the Hajj Fund Management Agency Number 8 of 2022 based on the laws and regulations of the Republic of Indonesia on Procedures for Managing and Following Up on Whistleblowing within the Hajj Fund Management Agency.

Kategori Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan Categories of Reportable Violations



**Tindakan Curang
(tidak adil)**
Fraudulent (unfair) Acts



Korupsi
Corruption



Pencurian/penggelapan
Theft/embezzlement



**Pelanggaran kebijakan dan
peraturan**
Violation of policies and
regulations



**Penyalahgunaan jabatan/
kewenangan**
Abuse of power/authority



Benturan kepentingan
Conflict of interest



Penyuapan
Bribery



Penipuan/pemerasan
Fraud/extortion

KOMITMEN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN [GRI 2-27]

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH berkomitmen penuh pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan haji yang baik. BPKH secara tegas menolak segala bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Tindak pelanggaran yang dimaksud termasuk korupsi, fraud, manipulasi, monopoli, dan tindakan pelanggaran lainnya. Selama periode pelaporan, tidak terdapat kasus pelanggaran hukum dan kepatuhan yang terjadi di lingkungan kerja serta sepanjang rantai aktivitas BPKH.

COMMITMENT TO LAWS AND REGULATIONS [GRI 2-27]

As mandated by Law Number 34 of 2014, BPKH is fully committed to the principles of sound Hajj fund management. BPKH firmly rejects all forms of violations and non-compliance with applicable laws and regulations. Such violations include corruption, fraud, manipulation, monopoly, and other illegal acts. During the reporting period, there were no cases of legal violations or non-compliance within the organization or throughout BPKH's activities.



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Mengelola Keberlanjutan BPKH

https://wbs.bpkh.go.id/laporan-pengaduan/create

Saluran Pengaduan | Complaint Channel

Web form online | Web form online
<https://wbs.bpkh.go.id/laporan-pengaduan/create>

SMS dan WhatsApp | SMS dan WhatsApp
+62 853-19000-140 atau +62 853-19000-230

Telepon | Telepon
+62 853-19000-140 atau
+62 853-19000-230

Email
wbs@bpkh.go.id

- Menggunakan *e-mail* pribadi (bukan *e-mail* kantor/resmi) dalam pembuatan laporan
- Memberikan informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan tindakan yang dilaporkan
- MUse personal e-mail (not office/ official e-mail) in making reports
- Provide as much information as possible in connection with the reported action

Dengan format pesan memuat:

- Kronologi kejadian
- Tempat dan waktu kejadian
- Bukti seperti dokumen, foto, audio, video atau yang lainnya

With the message format containing

- Chronology of the incident
- Place and time of the incident
- Evidence such as documents, photos, audio, video or others

- Buka pukul 08.30-17.30 pada hari kerja (senin-jumat)
- Layanan voicemail diluar jam dan hari kerja
- Open at 08.30-17.30 on weekdays (Monday-Friday)
- Voicemail service outside working hours and days



Sistem WBS dikelola secara mandiri oleh BPKH melalui Unit Penanganan Pengaduan dan Unit Penyelesaian Pengaduan serta Tim Pemeriksa. Pemantauan dan pengawasan secara periodik dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk memastikan sistem WBS berjalan dengan baik. Dewan Pengawas akan dibantu oleh Komite Audit untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut laporan yang masuk.

Setiap laporan yang masuk akan diperiksa dengan cermat dan objektif, serta mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. BPKH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan bahwa tidak ada tindakan balasan atau diskriminasi yang ditujukan kepada pihak pelapor pelanggaran. Apabila dari hasil penyelidikan tidak menunjukkan adanya

BPKH manages the WBS system independently through the Complaint Handling Unit and Complaint Resolution Unit as well as the Verification Team. The Supervisory Board conducts periodic monitoring and supervision to ensure that the WBS system is in good working order. The Audit Committee will assist the Supervisory Board in evaluating and following up on incoming reports.

Each incoming report will be examined carefully and objectively, and take the necessary actions in accordance with applicable policies and procedures. BPKH guarantees the confidentiality of the reporter's identity and ensures that there is no retaliation or discrimination directed at the whistleblower. If the results of the investigation do not show

pelanggaran, BPKH bertanggung jawab secara penuh untuk mengembalikan nama baik terlapor beserta dampak negatif yang mungkin timbul. Selama periode pelaporan, Tim Pengelola WBS tidak menerima laporan atau insiden apapun terkait program kemaslahatan yang melanggar regulasi yang terjadi di lingkungan BPKH maupun pada Mitra Kemaslahatan [2-25]

a violation, BPKH is fully responsible for restoring the good name of the reported party along with any negative impacts that may arise. During the reporting period, the WBS Management Team did not receive any reports or incidents related to welfare programs that violated regulations, either within BPKH or involving Welfare Partners. [2-25]

PENGELOLAAN RISIKO [GRI 2-24, 2-25, SEOJK E.3]

Risk Management

Manajemen risiko merupakan bagian dari penerapan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola setiap potensi ancaman atau peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan kinerja BPKH. Untuk itu, BPKH telah menerapkan prinsip kehati-hatian serta pendekatan yang cermat dan terarah dalam pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan dana haji. BPKH membentuk Bidang Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018, yang terdiri dari 2 (dua) divisi, yaitu Divisi Manajemen Risiko Bisnis dan Divisi Manajemen Risiko Korporasi.

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara terintegrasi dengan Penerapan Manajemen Risiko BPKH secara keseluruhan. BPKH terekspos pada sepuluh jenis risiko, yaitu: (1) risiko kredit, (2) risiko pasar, (3) risiko likuiditas, (4) risiko investasi, (5) risiko imbal hasil, (6) risiko operasional, (7) risiko reputasi, (8) risiko strategis, (9) risiko hukum, dan (10) risiko kepatuhan. Informasi lebih lanjut tentang pengelolaan risiko BPKH dapat dilihat dalam Laporan Tahunan BPKH bagian Manajemen Risiko.

Risk management is part of the implementation of *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), aimed at identifying, evaluating, and managing any potential threats or opportunities that may affect the achievement of BPKH's objectives and performance. To that end, BPKH has applied the precautionary principle as well as a careful and targeted approach to risk management as an integral part of the Hajj fund management strategy. BPKH established the Risk Management Division based on BPKH Regulation Number 3 of 2018, which consists of 2 (two) divisions, namely the Business Risk Management Division and the Corporate Risk Management Division.

Risk Management Implementation is carried out in an integrated manner with BPKH's overall Risk Management Implementation. BPKH is exposed to ten types of risks, namely: (1) credit risk, (2) market risk, (3) liquidity risk, (4) investment risk, (5) return risk, (6) operational risk, (7) reputation risk, (8) strategic risk, (9) legal risk, and (10) compliance risk. More information about BPKH's risk management can be seen in the BPKH Annual Report Risk Management section.

PROSES PENGENDALIAN RISIKO BPKH



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Mengelola Keberlanjutan BPKH

1. Melakukan identifikasi risiko secara proaktif pada seluruh produk dan aktivitas BPKH.
2. Melakukan pengukuran risiko sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.
3. Melakukan pemantauan risiko terhadap eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan internal, dan konsistensi pelaksanaan terhadap pedoman.
4. Melakukan pengendalian risiko melalui perlindungan nilai, sekuritisasi aset, serta metode mitigasi lainnya dengan memperhatikan kriteria prioritas risiko.

BPKH memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan risiko melalui program pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan secara berjenjang. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian staf di semua level, serta memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola berbagai jenis risiko yang dihadapi.

BPKH RISK MANAGEMENT PROCESS

1. Proactively identify risks across all BPKH products and activities.
2. Measure risks as a basis for implementing controls.
3. Monitor risks against risk exposure, risk tolerance, internal compliance, and consistency with guidelines.
4. Manage risks through value protection, asset securitization, and other mitigation methods, considering risk priority criteria.

BPKH fulfills the needs of Human Resources (HR) in risk management through training and certification programs that are carried out in stages. The program is designed to improve the competence and expertise of staff at all levels, and ensure they have the required knowledge and skills to manage various types of risks.

Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Tahun 2023

Risk Management Training and Certification in 2023

No.	Topik Pelatih Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants
1	"Pelatihan Investasi, Pengendalian Risiko dan Pemantauan Internal Investment, Risk Control and Internal Monitoring Training"	2
2	"Pelatihan Manajemen Investasi dan Mitigasi Risiko Investment Management and Risk Mitigation Training"	7
3	"Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Level 1 Certification and Training"	8
4	"Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Level 1 Certification and Training"	2
5	"Pelatihan dan Sertifikasi Risiko Bisnis Spesialis (CBRS) Certified Business Risk Specialist (CBRS) Training"	2
6	"Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Level 1 Certification and Training"	3
7	"Sertifikasi Governance Risk and Compliance Profesional (GRCP) dan Governance Risk and Compliance Auditor (GRCA) Governance Risk and Compliance Profesional (GRCP) and Governance Risk and Compliance Auditor (GRCA) Certification"	1
8	"Sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP) Certified Risk Management Professional (CRMP) Training"	1
9	"Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Risk Management Level 2 Certification and Training"	1
10	"Pelatihan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 1 Sharia Banking Risk Management Level 1 Training"	3

No.	Topik Pelatih Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants
11	"Pelatihan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 2 Sharia Banking Risk Management Level 2 Training"	1
12	"Pelatihan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 2 Sharia Banking Risk Management Level 2 Training"	2
13	Pelatihan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 3 Sharia Banking Risk Management Level 3 Training	4
14	"Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 5 Risk Management Level 5 Certification Refreshment"	1
15	"Pelatihan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 3 Sharia Banking Risk Management Level 3 Training"	1
16	"Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 sd. 4 Risk Management Level 2-4 Certification"	1
17	Certified Risk Professional (CRP)	1
18	"Pelatihan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 2 Sharia Banking Risk Management Level 2 Training"	3
19	Certification in Risk Management Assurance (CRMA)	2
20	"Pelatihan Financial Risk Manager (FRM) Financial Risk Manager (FRM) Training"	3
21	Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	1
22	"Sertifikasi Governance Risk and Compliance Profesional (GRCP) dan Governance Risk and Compliance Auditor (GRCA) Governance Risk and Compliance Profesional (GRCP) and Governance Risk and Compliance Auditor (GRCA) Certification"	11
23	"Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Level 1 Certification"	3
24	Exam part 1-Financial Risk Manager (FRM)	1
25	"Konferensi Nasional Professional Manajemen Risiko IX Risk Management Professional National Conference IX"	1
26	"Bimtek 2 Hari-Audit Berbasis Risiko 2 Day-Technical Guidance – Risk-Based Audit"	1
Total		78



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Mengelola Keberlanjutan BPKH

JENIS RISIKO UTAMA [GRI 2-4]

PRIMARY TYPES OF RISK [GRI 2-4]

No	Jenis Risiko Risk Type
1	Risiko Reputasi/Reputation Risk Risiko Reputasi mencakup penurunan tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BPKH. Risiko Reputasi Reputation Risk includes a decrease in the level of trust stemming from negative perceptions of BPKH.
2	Risiko Keberlanjutan/Sustainability Risk Risiko Keberlanjutan mencakup kemampuan penerima bantuan dan/atau mitra kemaslahatan terhadap keberlanjutan pendanaan suatu proyek hingga selesai. Sustainability Risk refers to the ability of beneficiaries and/or benefit program partners to sustain the funding of a project until completion.
3	Risiko Kredit/Credit Risk Risiko Kredit merupakan risiko akibat kegagalan <i>counterparty</i> atau pihak lain sehubungan dengan penempatan dan/atau investasi dalam memenuhi kewajibannya kepada BPKH sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Credit risk is the risk arising from the failure of a counterparty or other party, in relation to placements and/or investments, to fulfill its obligations to the BPKH in accordance with the agreed terms.
4	Risiko Investasi/Investment Risk Risiko Investasi adalah risiko yang timbul akibat BPKH ikut menanggung kerugian atas investasi berbasis bagi hasil yang berasal dari jenis akad yang digunakan, kinerja dan kualitas investasi, arus kas dan pembayaran dari investasi dan/atau <i>underlying asset</i> yang mendasarinya. Investment risk refers to the risk incurred by the BPKH due to sharing in the losses of profit-sharing investments arising from the type of contract used, the performance and quality of the investment, the cash flow and payments from the investment and/or its underlying assets.
5	Risiko Imbal Hasil/Yield Risk Risiko Imbal Hasil timbul akibat realisasi tingkat imbal hasil yang diperoleh BPKH tidak sesuai dengan tingkat ekspektasi imbal hasil yang diharapkan. Risiko Imbal Hasil dapat terjadi sehubungan perubahan imbal hasil dan/atau nilai manfaat yang didapat dari kegiatan penempatan dan investasi yang dilakukan oleh BPKH. Yield risk arises when the actual rate of return realized by the BPKH does not meet the expected rate of return. Return risk can occur in connection with changes in the rate of return and/or the benefits derived from placement and investment activities undertaken by the BPKH.
6	Risiko Pasar/Market Risk Risiko Pasar adalah risiko pada posisi dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset. Risiko kerugian yang diakibatkan perubahan nilai aset yang diperdagangkan (<i>tradable assets</i>). Market risk is the risk to administrative positions and accounts resulting from changes in market prices, including risks arising from changes in the value of assets. It refers to the potential loss due to changes in the value of tradable assets.
7	Risiko Likuiditas/Liquidity Risk Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan BPKH memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek, antara lain dikarenakan adanya mismatch profil jatuh tempo atas Aset dan Kewajiban. Mengacu kepada UU No.34/2014 pasal 47 dimana BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Liquidity risk refers to the risk of the BPKH being unable to meet its short-term obligations, primarily due to a mismatch in the maturity profiles of its assets and liabilities. This is in accordance with Law No. 34/2014, Article 47, which mandates the BPKH to manage and provide Hajj funds equivalent to two times the Hajj Pilgrimage Cost (BPIH).
8	Risiko Hukum/Legal Risk Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat muncul disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangan-undangan yang mendukung, atau kelemahan dalam hal perikatan/perjanjian dengan pihak ketiga. Legal risk is the risk arising from legal claims and/or weaknesses in legal aspects. Legal risks can occur due to weaknesses in legal aspects such as lawsuits, a lack of supporting legislation, or weaknesses in third-party agreements.
9	Risiko Kepatuhan/Compliance Risk Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan, ketentuan eksternal dan internal BPKH. Sesuai Undang-undang, BPKH diwajibkan untuk patuh pada ketentuan bahwa setiap investasi yang dilakukan harus sesuai dengan aspek syariah. Selain aspek syariah, setiap kegiatan yang dilakukan juga diharuskan untuk mematuhi ketentuan eksternal dan internal yang berlaku. Compliance risk is the risk arising from the failure to comply with laws, regulations, and internal and external BPKH provisions. As mandated by law, the BPKH is required to ensure that all investments comply with Sharia principles. In addition to Sharia compliance, all activities must adhere to applicable external and internal regulations.

No	Jenis Risiko Risk Type
10	Risiko Operasional/Operational Risk Risiko Operasional disebabkan oleh kelemahan SDM, proses internal, teknologi dan faktor eksternal. Secara khusus risiko operasional juga menyoroti additional risk berupa Risiko <i>Fraud</i> (<i>Fraud Risk</i>) yang merupakan aktivitas risiko terkait kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak oleh pihak internal atau pihak eksternal. Operational risk is caused by weaknesses in human resources, internal processes, technology, and external factors. Specifically, operational risk also highlights an additional risk, Fraud Risk, which is a risk activity related to the organization's vulnerability to fraud committed by internal or external parties.

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN [GRI 2-13, 2-29, SEOJK E.4]

Stakeholder Engagement

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan haji, baik langsung maupun tidak langsung. Ini tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi lingkungan, dan sosial yang lebih luas, yang melibatkan berbagai pihak terkait. Melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan, BPKH dapat merumuskan berbagai kebijakan dan program-program kemaslahatan umat yang berkelanjutan serta memberi dampak positif bagi umat secara menyeluruh. Bidang Kemaslahatan BPKH mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan pertimbangan pengaruh dan dampak mereka terhadap Program Kemaslahatan.

Various stakeholders engagement, both directly and indirectly, is the key in maintaining the sustainability of Hajj fund management. Not only do they involve economic aspects, but also broader environment and social dimensions, involving various related parties. BPKH can formulate various policies and programs for the welfare of ummah that are sustainable and beneficial to the ummah as a whole through collaboration with stakeholders. BPKH's Benefit Program Division identifies stakeholders based on consideration of their influence and impact on the Benefit Program.

No.	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Metode dan Frekuensi Keterlibatan Method and Frequency of Engagement	Kepentingan dan Harapan Interests and Expectation
1	Badan Pelaksana BPKH Executive Board of BPKH	- Rapat badan pelaksana (1x/ minggu) - Rakor dengan anggota badan pelaksana (setiap hari) - Meeting of the Executive Board (1x/week) - Coordination meeting with Members of the Executive Board (every day)	- Penggunaan dana sesuai target - Keberlanjutan program - Kepatuhan peraturan - Eksistensi BPKH (syiar dan <i>branding</i>) - Use of funds according to the target - Program continuity - Regulatory compliance - Existence of BPKH (preaching and branding)
2	Dewan Pengawas BPKH Supervisory Board of BPKH	- Rapat gabungan (1x/bulan) - Laporan bulanan - Rapat evaluasi (3 bulan sekali/ triwulan) - Joint meeting (1x/month) - Monthly report - Quarterly evaluation meeting	- Penggunaan dana sesuai target - Keberlanjutan program - Kepatuhan peraturan - Eksistensi BPKH (syiar dan <i>branding</i>) - Use of funds according to the target - Program continuity - Regulatory compliance - Existence of BPKH (preaching and branding)



MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Mengelola Keberlanjutan BPKH

No.	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Metode dan Frekuensi Keterlibatan Method and Frequency of Engagement	Kepentingan dan Harapan Interests and Expectation
3	Kementerian Agama The Ministry of Religious Affairs	Rapat prioritas (awal tahun, atau saat ada perubahan) Priority meeting (beginning of the year, or when changes occur)	- Program prioritas - Program pendukung pelaksanaan ibadah haji - Priority programs - Programs supporting hajj pilgrimage implementation
4	Komisi VIII DPR Commission VIII of DPR	- Laporan pelaksanaan program - Usulan program (proposal) - Report of program implementation - Proposed program (proposal)	- Pengawasan - Pelaksanaan - Oversight - Implementation
5	Mitra Kemaslahatan (lembaga nonprofit) Benefit Program Partners (Non Profit Organization)	- Rapat koordinasi bulanan/mingguan - Rapat Badan Koordinasi (1x per tahun) - Rapat evaluasi program (2x per tahun) - Monthly/weekly coordination meetings - Coordinating body meeting (1x per year) - Program evaluation meeting (2x per year)	- Program - Sumber dan jumlah penggunaan dana - Usulan dan pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan - Programs - Source and amount of use of funds - Proposal and implementation of Benefit Program Activities
6	Penerima Manfaat Beneficiaries	Sosialisasi Socialization	Program Programs
7	Kementerian Keuangan The Ministry of Finance	Rapat penempatan DAU (1x per tahun) DAU placement meeting (1x per year)	Sumber penempatan dana dan jumlah dana Source of fund placement and amount of funds
8	Masyarakat Public	- Sosialisasi - Publikasi kegiatan di berbagai media - Socialization - Publication of activities in various media	- Program - Sumber dan jumlah penggunaan dana - Programs - Source and amount of funds usage
9	Presiden President	Laporan melalui Kementerian Agama Report through the Ministry of Religious Affairs	Kepatuhan peraturan Regulatory compliance
10	Pegawai Employees	Gathering, pelatihan Gathering, training	- Tata kelola - Transparansi - Penilaian kinerja - Pengembangan - TGovernance - Transparency - Performance assessment - Development

TANTANGAN PENERAPAN ASPEK KEBERLANJUTAN [SEOJK E.5]

Challenges In Sustainability Aspects Implementation

Pada tahun 2023, penerapan rencana strategi Program Kemaslahatan berada pada tahap ke-2 yaitu "Optimasi Kemaslahatan". Capaian kinerja dilihat dari:

1. Pencapaian Kegiatan Kemaslahatan untuk masing-masing ruang lingkup;
2. Dukungan terhadap program SDGs;
3. Hasil survei kepuasan penerima manfaat;
4. Cakupan jangkauan kewilayahan kegiatan; dan
5. Jumlah Mitra Kemaslahatan aktif.

Dalam konteks penerapan aspek keberlanjutan, BPKH masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah pelaksanaan program keberlanjutan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang masih sangat minim. Meskipun BPKH telah melakukan berbagai upaya, realisasi program di daerah-daerah ini masih membutuhkan perhatian lebih. Untuk mengatasi hal ini, BPKH terus berusaha meningkatkan pelaksanaan program-program keberlanjutan di daerah 3T agar dapat memberikan manfaat yang lebih merata.

Selain itu, kriteria lingkungan masih minim dalam persetujuan proposal program kemaslahatan. Saat ini, baru sedikit program kemaslahatan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Kedepannya, BPKH berkomitmen untuk meningkatkan jumlah program kemaslahatan yang memperhatikan aspek lingkungan, sehingga dapat memberikan dampak positif jangka panjang baik dari sisi kemaslahatan umat maupun pelestarian lingkungan.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh BPKH adalah terbatasnya jumlah program yang telah dianalisis menggunakan metode SROI. Hingga saat ini, BPKH baru memiliki dua program yang telah dianalisis SROI. Untuk ke depannya, BPKH berupaya meningkatkan jumlah program unggulan yang dianalisis SROI. Upaya ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak sosial dari program-program kemaslahatan yang dijalankan oleh BPKH, sekaligus memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

In 2023, the implementation of the Benefit Program strategic plan was in its 2nd stage, "Optimizing Benefit Program". Performance achievements are measured from:

1. Achievement of Benefit Program Activities for each scope;
2. Support for SDGs programs;
3. Results of beneficiary satisfaction surveys;
4. Coverage of the territorial reach of activities; and
5. Number of active Benefit Program Partners.

In the context of implementing sustainability aspects, BPKH still faces several challenges. One of the primary hurdles is the limited implementation of sustainability programs in 3T regions (Outermost, Frontier, and Disadvantaged). Despite BPKH's ongoing efforts, the realization of these programs in such areas requires further attention. To address this, BPKH is continuously striving to enhance the implementation of sustainability programs in 3T regions to ensure more equitable benefits.

Additionally, environmental criteria are still minimal in the approval process for benefit programs. Currently, only a few benefit programs consider environmental sustainability. Going forward, BPKH is committed to increasing the number of benefit programs that prioritize environmental aspects, thus contributing to both long-term community welfare and environmental conservation.

Another challenge faced by BPKH is the limited number of programs that have been analyzed using the Social SROI method. To date, BPKH has only analyzed two programs using SROI. In the future, BPKH aims to increase the number of flagship programs that undergo SROI analysis. This endeavor is expected to provide a clearer picture of the social impact of BPKH's welfare programs, while also ensuring that investments yield optimal benefits for the community.



TENTANG LAPORAN KEMASLAHATAN BPKH

About BPKH Kemaslahatan Report

- | | | | |
|------------|---|------------|--|
| 140 | Profil Laporan
Report Profile | 146 | Perubahan Signifikan
Significant Changes |
| 142 | Topik Material
Material Topics | 147 | Lampiran
Apendix |
| 146 | Keanggotaan Asosiasi
Association Membership | 148 | Indeks GRI
GRI Index |



154 Indeks POJK-51/2017
POJK-51/2017 Index

157 Lembar Umpan Balik
Feedback Form



Tentang Laporan Kemaslahatan BPKH

About BPKH Kemaslahatan Report

Profil Laporan

Report Profile



Laporan Kemaslahatan 2023 merupakan laporan ke-5 yang diterbitkan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH. Laporan ini mencakup penjelasan terkait kebijakan, inisiatif dan kinerja salah satu bidang atau divisi BPKH yaitu Bidang Kemaslahatan dalam menyalurkan DAU. Laporan ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023 dan diterbitkan secara berkala setiap tahun. Laporan Kemaslahatan 2023, akan diterbitkan pada bulan September 2024. Laporan yang terkait kinerja keuangan merupakan laporan konsolidasi pada periode yang sama dengan laporan ini, yang terbit setiap bulan November setiap tahunnya. [\[GRI 2-2, 2-3\]](#)

PEDOMAN YANG DIGUNAKAN

Pedoman dan standar yang digunakan dalam penulisan Laporan Kemaslahatan ini sesuai dengan Standar Global Reporting Initiatives (GRI) Standards 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga Global Sustainability Standards Board (GSSB). Selain itu, laporan ini juga berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

INFORMASI YANG DINYATAKAN ULANG

Terdapat beberapa informasi yang dinyatakan ulang pada laporan ini. Setiap informasi yang dinyatakan ulang dapat diidentifikasi dengan tanda (*). [\[GRI 2-4\]](#)

The 2023 Kemaslahatan Report is the 5th report published by BPKH's Benefit Program Division. This report provides a comprehensive overview of the policies, initiatives, and performance of the BPKH's Benefit Program Division in distributing the DAU. The report covers all activities carried out by the division from January 1 to December 31, 2023 and is published annually. For the 2023 Benefit/Kemaslahatan Report, will be published in September 2024. The report related to financial performance is a consolidated report for the same period as this report, which is published in November each year. [\[GRI 2-2, 2-3\]](#)

REFERENCES

The guidelines and standards used in this Kemaslahatan Report are based on the Global Reporting Initiatives (GRI) Standards 2021 issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB). Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies and OJK Circular Letter (SEOJK) Number 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Contents of Annual Reports of Issuers or Public Companies also become guidelines for this report.

RESTATEMENT OF INFORMATION

There is some information restated in this report. Each restated information can be identified by a (*) mark. [\[GRI 2-4\]](#)



PENJAMINAN KUALITAS LAPORAN

BPKH berkomitmen untuk selalu menyajikan Laporan Kemaslahatan yang berkualitas dan akurat. Untuk menjamin hal tersebut, proses peninjauan dan verifikasi dilakukan secara cermat oleh tim internal terkait di bawah pengawasan langsung dari Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH. Proses verifikasi internal ini dilakukan secara ketat dan menyeluruh, mulai dari pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan laporan. [GRI 2-14]

BPKH menunjuk PT Sucofindo sebagai verifikator dan penjaminan/assurance eksternal atas laporan ini. PT Sucofindo tidak terlibat dalam penyusunan laporan ini dan dinyatakan tidak memiliki benturan kepentingan apapun selama proses assurance. Ruang lingkup penjaminan Laporan Kemaslahatan BPKH 2023 dan ini mencakup seluruh kinerja dan kegiatan BPKH. Standar penjaminan yang digunakan dalam proses penjaminan ini adalah ISEAS 3000 dan AA1000AS tipe 2, dengan level penjaminan High Assurance/Confident mengikuti Accountability Principle. Informasi lebih lengkap terkait proses penjaminan ini dapat dilihat pada lembar laporan penjaminan eksternal independen di halaman XX laporan ini. [GRI 2-5]

TANGGAPAN UMPAN BALIK [SEOJK G.3]

Bidang Kemaslahatan BPKH menyediakan lembaran umpan balik pada bagian akhir laporan ini sebagai sarana interaktif dengan berbagai pihak pemangku kepentingan. Bagian ini berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada semua pembaca untuk menyampaikan usulan dan opini. Kontribusi ini akan sangat berarti dalam upaya peningkatan kualitas laporan pada periode berikutnya.

Pada periode pelaporan 2023, tidak ada masukan, usulan, ataupun opini yang diterima melalui lembar umpan balik. Meskipun demikian, Bidang Kemaslahatan BPKH berkomitmen untuk terbuka dan responsif terhadap segala masukan, usulan dan opini pemangku kepentingan dari berbagai platform lain.

KONTAK [GRI 2-3]

Untuk informasi, saran dan pertanyaan lebih lanjut terkait laporan ini, dapat menghubungi kontak kontak yang tertera pada halaman paling akhir laporan ini.

REPORT QUALITY GUARANTEE

BPKH is committed to always presenting a quality and accurate Kemaslahatan Report through careful review and verification process by the relevant internal teams under the direct supervision of the BPKH Governing Board and Supervisory Board. This internal verification process is carried out strictly and thoroughly, starting from data collection and analysis, to report preparation. [GRI 2-14]

BPKH has appointed PT Sucofindo as the external verifier and assurer of this report. PT Sucofindo was not involved in the preparation of this report and is declared to have no conflict of interest whatsoever during the assurance process. The scope of assurance for the BPKH 2023 Sustainability Report encompasses all of BPKH's performance and activities. The assurance standards used in this assurance process are ISEAS 3000 and AA1000AS Type 2, with a High Assurance/Confident level of assurance in accordance with the Accountability Principle. More detailed information regarding this assurance process can be found on the independent external assurance report sheet on page XX of this report. [GRI 2-5]

FEEDBACK RESPONSE [SEOJK G.3]

BPKH's Benefit Program Division provides a feedback form at the end of this report as an interactive tool with various stakeholders that serves as an opportunity for all readers to submit suggestions and opinions. This contribution will be very meaningful in our efforts to improve the report's quality in the next period.

In the 2023 reporting period, we received no inputs, suggestions or opinions through the feedback form. Nonetheless, BPKH's Benefit Program Division is committed to being open and responsive to all stakeholder inputs, suggestions and opinions from multiple platforms.

CONTACT [GRI 2-3]

For further information, suggestions and questions about this report, please contact the available contacts listed on the last page of this report.



Topik Material

Material Topics

PROSES PENENTUAN TOPIK MATERIAL [GRI 3-1]

Kandungan dalam laporan ini ditentukan dengan menggunakan konsep materialitas dan menerapkan prinsip-prinsip pelaporan. Topik material dipilih dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari dampak yang diakibatkan oleh kegiatan operasional, layanan, dan harapan dari pemangku kepentingan. Selain itu, perubahan positif yang diberikan Bidang Kemaslahatan BPKH dan topik-topik yang wajib diungkapkan berdasarkan POJK Nomor 51/2017 juga turut dipertimbangkan.

Bidang Kemaslahatan melakukan identifikasi atas dampak aktual dan potensial, negatif dan positif terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang relevan dengan kegiatan Program Kemaslahatan yang dijalankan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH. Identifikasi juga dilakukan terhadap seluruh aktivitas termasuk hubungan kerjasama dengan Mitra Kemaslahatan.

Setiap dampak yang teridentifikasi akan dinilai dan dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tingkat kemungkinan serta keparahannya. Dampak-dampak yang mendapat masukan terbanyak berdasarkan *threshold* yang ditetapkan, akan dianggap sebagai dampak yang signifikan dan menjadi prioritas. Dampak-dampak signifikan dan prioritas inilah yang akan dipilih menjadi topik material dalam pelaksanaan Program Kemaslahatan.

Seluruh tahapan penetapan topik material dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh fungsi-fungsi terkait yang relevan dengan Program Kemaslahatan untuk memperoleh masukan yang objektif. Selain itu, umpan balik dari laporan periode sebelumnya, yang diperoleh dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, juga menjadi pertimbangan penting dalam proses ini. Bidang Kemaslahatan juga melibatkan tenaga ahli dalam bidang keberlanjutan untuk membantu proses penetapan topik material. Hasil dari penetapan topik material kemudian diajukan pada rapat Dewan untuk ditinjau dan disetujui.

MATERIAL TOPIC DETERMINATION PROCESS [GRI 3-1]

The content in this report was determined using materiality concepts and applying reporting principles. Material topics were selected by considering various aspects, ranging from the impact caused by operational activities, services, and expectations from stakeholders. Furthermore, we also consider the positive changes provided by BPKH's Benefit Program Division and topics that must be disclosed based on POJK Number 51/2017.

The Benefit Program Division identifies the actual and potential impacts, negative and positive on economic, environmental, and social aspects, including aspects related to human rights that are relevant to the Benefit Program activities carried out by the BPKH's Benefit Program Division. We also identify all those activities, including collaboration relationships with Benefit Program Partners.

By considering the likelihood and severity level, each identified impact will be thoroughly assessed and analyzed. Impacts that receive the most input based on the set threshold will be classified as significant impacts and become priority. These significant and priority impacts will be selected as material topics in the implementation of the Benefit Program.

To obtain objective input, all stages of determining material topics are carried out through Focus Group Discussions (FGD) attended by related functions relevant to the Benefit Program. Additionally, feedback from internal and external stakeholders on the previous period reports is also an important consideration in this process. The Benefit Program Division also engages sustainability experts to assist in the process of determining material topics. The results of the material topic determination are then submitted to the Board meeting for review and approval.

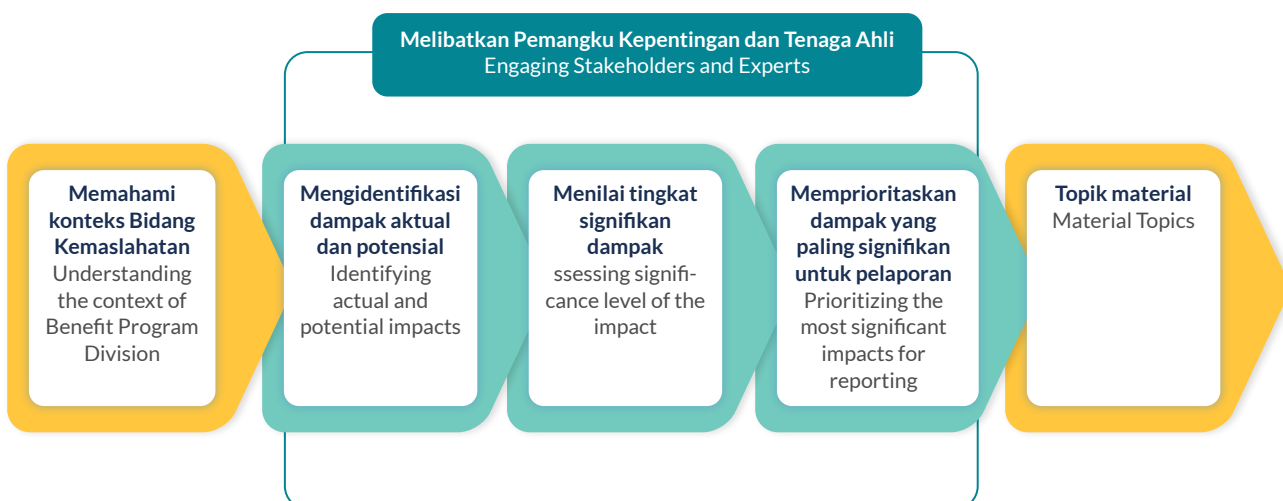


Pada tahun 2023, Bidang Kemaslahatan melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh topik material yang ada dalam laporan tahun sebelumnya. Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan ada tidaknya perubahan signifikan dalam konteks kemaslahatan. Jika tidak terdapat perubahan signifikan maka seluruh topik material dianggap masih relevan. [GRI 2-4]

In 2023, the Benefit Program Division conducted a review of all material topics included in the previous year's report. The review is conducted by considering any significant changes in the context of the benefit. If there are no significant changes, then all material topics are still considered relevant. [GRI 2-4]

Proses Penetapan Topik Material

Material Topics Determination Process





Tentang Laporan Kemaslahatan BPKH

About BPKH Kemaslahatan Report

DAFTAR TOPIK MATERIAL* [GRI 3-2, 3-3, 2-4]

Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2023, daftar topik material dinyatakan ulang dengan tujuan untuk mengoreksi dan menyempurnakan penyajian yang terdapat dalam laporan sebelumnya. Perlu dicatat bahwa tidak ada implikasi yang terkait dengan klaim atau informasi apa pun yang terkait pernyataan ulang ini. Berikut daftar topik material yang telah ditentukan:

MATERIAL TOPIC LIST* [GRI 3-2, 3-3, 2-4]

The material topic list in the 2023 Kemaslahatan Report has been restated in order to correct and improve the presentation contained in previous reports. It should be noted that there are no implications to any claims or information related to this restatement. The following material topic list has been determined:

Topik Material Material Topics	Penjelasan Topik Materiak Explanation of Material Topics	Korelasi dengan Standar GRI Correlation with GRI Standards	Batasan Limitations			
			Bidang Kemaslahatan Benefit Program Division	BPKH	Masyarakat Community	Mitra Partner
Nilai manfaat yang dihasilkan dan disalurkan Return value generated and distributed	Program Kemaslahatan dilaksanakan untuk memastikan optimalisasi nilai DAU, dan merupakan bentuk pelaksanaan mandate peraturan yang berlaku. Sejalan dengan misi bidang kemaslahatan The Benefit Program is implemented to ensure the optimization of DAU value, and is a form of implementation of the applicable regulatory mandate that align with the benefit program division's mission	Tidak ada None	✓	✓	✓	
Dampak ekonomi tidak langsung Indirect economic impact	Program Kemaslahatan yang diselenggarakan mencakup dukungan terhadap infrastruktur untuk kemaslahatan umat The Benefit program includes infrastructure support for the welfare of the ummah	203-1 203-2	✓		✓	
Praktik pengadaan Procurement practices	Program Kemaslahatan dilaksanakan bersama mitra kemaslahatan lokal Part of the institution's governance that must be applied throughout management and employees	204-1	✓			✓
Anti Korupsi Anti-corruption	Bagian dari tata Kelola lembaga yang harus diterapkan di seluruh manajemen dan pegawai Bagian dari tata Kelola lembaga yang harus diterapkan di seluruh manajemen dan pegawai	205-2 205-3	✓	✓		✓

Topik Material Material Topics	Penjelasan Topik Materiak Explanation of Material Topics	Korelasi dengan Standar GRI Correlation with GRI Standards	Batasan Limitations			
			Bidang Kemaslahatan Benefit Program Division	BPKH	Masyarakat Community	Mitra Partner
Pendidikan dan pelatihan Education and training	Memiliki pegawai dengan kompetensi yang mumpuni memungkinkan kegiatan dapat dilakukan secara optimal Having employees with qualified competencies allows activities to be conducted optimally	404-1	✓			
Masyarakat lokal Local community	Program Kemaslahatan ditujukan untuk masyarakat lokal, khususnya umat Islam The Benefit Program is aimed at the local community, especially Muslims	413-1 413-2	✓		✓	✓
Penilaian sosial mitra Partner social assessment	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kemaslahatan merupakan kegiatan sosial yang spesifik untuk kemaslahatan umat. Maka penting bagi Lembaga untuk bekerja sama dengan mitra yang memiliki visi yang sama. The Benefit Program Division's activities are specific social activities for the welfare of the ummah. So it is critical for the Institute to work with partners who share our vision	414-1	✓			✓
Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat Beneficiary health and safety	Tujuan program adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat, Kesehatan dan keselamatan tentunya menjadi bagian dari hal ini The program's objective is to provide welfare for the ummah, which makes health and safety part of the objective	416-2	✓		✓	✓
Memberikan peluang yang sama (penyaluran manfaat) Providing equal opportunities (distribution of benefits)	Menjadi kuantitatif aspek kinerja utama bidang kemaslahatan, cakupan jangkauan kegiatan Being a quantitative aspect of the benefit program division's main performance and the range's scope of the activities	Tidak ada None	✓		✓	✓



Tentang Laporan Kemaslahatan BPKH

About BPKH Kemaslahatan Report

Keanggotaan Asosiasi [GRI 2-28, SEOJK C.5]

Membership of Association



BPKH merupakan regulator yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola keuangan terkait ibadah haji, dan merupakan badan independen yang tidak tergabung dalam keanggotaan asosiasi tertentu. Dalam konteks pengelolaan keuangan haji, di mana aspek keuangan sangat sensitif dan memerlukan pengawasan yang ketat, posisi independen BPKH memberikan keleluasaan untuk menjalankan tugasnya tanpa adanya keterikatan dengan entitas atau kepentingan lain.

BPKH is the regulator responsible for overseeing and managing Hajj-related funds. As an independent body, BPKH is not a member of any specific association. In the context of Hajj fund management, where financial aspects are highly sensitive and require close oversight, BPKH's independent position allows flexibility to carry out its duties without any attachment to other entities or interests.

Perubahan Signifikan

Significant Changes

Pada tahun 2023, layanan usaha BPKH, mengalami perubahan signifikan dengan diluncurkannya entitas anak baru bernama "BPKH Limited". Entitas ini berfokus pada pengelolaan setoran awal jemaah haji melalui investasi syariah di Arab Saudi. Namun untuk ruang lingkup Kemaslahatan, tidak ada perubahan signifikan apapun yang terjadi, termasuk rantai pasok. [GRI 2-6, SEOJK C.6]

BPKH's business service saw significant change in 2023 with the launch of a new subsidiary known as "BPKH Limited" that focused on managing the initial deposit of hajj pilgrims through sharia investments in Saudi Arabia. However, there were no significant changes in the BPKH's Benefit Program, including the supply chain. [GRI 2-6, SEOJK C.6]



LAMPIRAN

Appendix

PERNYATAAN PENGGUNAAN Statement of use	BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) TELAH MELAPORKAN SESUAI DENGAN STANDAR GRI UNTUK PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2022 Hajj Fund Management Agency (BPKH) has reported in accordance with the GRI Standards for the period 01 January - 31 December 2023
GRI 1 YANG DIGUNAKAN GRI 1 used	GRI 1: LANDASAN 2021 GRI 1: Foundation 2021

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure		Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
				Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
Pengungkapan umum General disclosures						
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 General Disclosures 2021	2-1	Rincian organisasi Organizational details	24-25			
	2-2	Entitas yang disertakan dalam pelaporan keberlanjutan Perseroan Entities included in the organization's sustainability reporting	25			
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi, dan poin kontak Reporting period, frequency and contact point	141, 158			
	2-4	Informasi yang dinyatakan ulang Restatements of information	134, 144			
	2-5	Penjaminan eksternal External guarantor			BPKH telah menunjuk PT Sucofindo sebagai verifikator dan penjaminan/assurance eksternal atas laporan ini. PT Sucofindo tidak terlibat dalam penyusunan laporan ini dan dinyatakan tidak memiliki benturan kepentingan apapun selama proses assurance. Pada saat laporan ini terbit, proses penjaminan belum selesai dilaksanakan. Jika proses penjaminan telah selesai dilaksanakan, laporan penjaminan eksternal independen atas laporan ini akan disajikan pada halaman akhir laporan ini. Terkait dengan standar penjaminan yang digunakan, level penjaminan dan sebagainya, semuanya diungkapkan dalam laporan penjaminan tersebut	
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lain Activities, value chain and other business relationships	25, 31			
	2-7	Ketenagakerjaan Employees	99-101			
	2-8	Pekerja yang bukan pekerja Langsung Workers who are not employees	99			

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
			Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
	2-9 Struktur tata kelola dan komposisinya Governance structure and composition	112-115			
	2-10 Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	119			
	2-11 Ketua badan tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	115			
	2-12 Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	116, 122			
	2-13 Delegasi penanggungjawab dalam pengelolaan dampak Delegation of responsibility for managing impacts	117, 135			
	2-14 Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	116			
	2-15 Konflik kepentingan Conflicts of interest	126			
	2-16 Komunikasi masalah penting Communication of critical concerns	118			
	2-17 Pengetahuan kolektif dari badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	119			
	2-18 Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	122			
	2-19 Kebijakan remunerasi Remuneration policies	120			
	2-20 Proses untuk menentukan remunerasi Process to determine remuneration	121			

Indeks Konten GRI

GRI Content Index

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
			Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
	2-21	Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio	121		
	2-22	Pernyataan strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	9, 27, 45		
	2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	26, 107, 108, 123, 128		
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan Embedding policy commitments	107		
	2-25	Proses untuk memperbaiki dampak negatif Processes to remediate negative impacts	129, 131		
	2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah Mechanisms for seeking advice and raising concerns	129		
	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Compliance with laws and regulations	129		
	2-28	Keanggotaan asosiasi Membership associations	146		
	2-29	Keterlibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement	135		
	2-30	Perjanjian perundingan kolektif Collective bargaining agreements	102		
Topik material Material topics					
GRI 3: Topik material 2021 Material topics 2021	3-1	Proses untuk menentukan topik material Process to determine material topics	142		
	3-2	Daftar topik material List of material topics	144		
Nilai Manfaat Yang Dihasilkan dan Disalurkan Generated and Distributed Return Value					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	29		

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
			Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
Penyaluran Nilai Manfaat Return Value Distribution	-	Dana Abadi Umat (DAU) Ummah Trust Fund	29		
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impacts					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	82		
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 Indirect Economic Impacts 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Infrastructure investments and services supported	82		
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Significant indirect economic impacts	83		
Praktik Pengadaan Procurement Practices					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	31		
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016 Procurement Practices 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal Proportion of spending on local suppliers	31		
Anti Korupsi Anti-corruption					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	126		
GRI 205: Anti- Korupsi 2016 Anti-corruption 2016	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi Operations assessed for risks related to corruption		Tidak berlaku/tidak relevan dengan operasional BPKH. Operasi-operasi proses penyaluran manfaat menjadi diskresi Mitra Kemaslahatan. Not applicable/not relevant to BPKH operations. Operations of the benefit distribution process are at the discretion of the Welfare Partner.	
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi Communication and training about anti-corruption policies and procedures	128		

Indeks Konten GRI

GRI Content Index

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
			Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
	205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Confirmed incidents of corruption and actions taken	128			
Pendidikan dan Pelatihan Training and Education					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3 Manajemen topik material Management of material topics	102			
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 Training and Education 2016	404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per pegawai Average hours of training per year per employee	102			
	404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs			Tidak berlaku/tidak relevan dengan operasional BPKH. BPKH merupakan lembaga Pemerintah Pusat, sehingga sistem penilaian kinerja dan peningkatan keterampilan setiap pegawainya sudah menjadi bagian integral dari pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan pusat. Not applicable/not relevant to BPKH operations. BPKH is a Central Government institution, so the performance assessment system and skill improvement of each employee has become an integral part of human resource management in the central government environment.	
	404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews			Tidak berlaku/tidak relevan dengan operasional BPKH. BPKH merupakan lembaga Pemerintah Pusat, sehingga sistem penilaian kinerja dan peningkatan keterampilan setiap pegawainya sudah menjadi bagian integral dari pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan pusat. Not applicable/not relevant to BPKH operations. BPKH is a Central Government institution, so the performance assessment system and skill improvement of each employee has become an integral part of human resource management in the central government environment.	
Masyarakat Lokal Local Communities					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3 Manajemen topik material Management of material topics	48			
GRI 413: Masyarakat Setempat 2016 Local Communities 2016	413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	48-81			
	413-2 Operasi yang secara aktual dan berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	47			

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure		Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
				Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
Penilaian Sosial Mitra Kemaslahatan Benefit Program Partners Social Assessment						
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	31	Tidak berlaku/tidak relevan dengan operasional BPKH. Melihat aktivitas inti BPKH, secara langsung tidak ada rantai pasok yang kompleks seperti perusahaan/manufaktur. Not applicable/not relevant to BPKH operations. Looking at BPKH's core activities, there is no direct complex supply chain like a company/manufacturer.		
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016 Supplier Social Assessment 2016	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria mitra New suppliers that were screened using Benefit Program Partners criteria	33			
	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil Negative social impacts in the supply chain and actions taken				
Kesehatan dan Keselamatan Penerima Manfaat Beneficiary Health and Safety						
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	108	Tidak berlaku/tidak relevan dengan operasional BPKH. Peran utama BPKH adalah mengelola dana haji dan menyalurkannya untuk kemaslahatan umat Islam. Secara langsung, produk atau jasa yang dihasilkan BPKH mungkin tidak sebanding dengan aspek komersial yang diatur oleh GRI 416-1. Not applicable/not relevant to BPKH operations. The main role of BPKH is to manage Hajj funds and channel them for the benefit of the Muslim community. Directly, the products or services produced by BPKH may not be comparable to the commercial aspects regulated by GRI 416-1.		
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016 Customer Health and Safety 2016	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa Assessment of the health and safety impacts of product and service categories				
	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	109			
Memberikan Peluang Yang Sama (Penyaluran Manfaat) Providing Equal Opportunities (Benefit Distribution)						
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	42			
	-	Penyaluran nilai manfaat yang merata Return value distribution	44			

DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SEOJK) NOMOR 16/SEOJK.04/2021 [SEOJK G.4]

List of Disclosures According to Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 16/SEOJK.04/2021

No	Nama indeks Index name	Halaman Page
A. Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
A.1.	Penjelasan strategi keberlanjutan Explanation of sustainability strategy	27-28
B. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Sustainability Aspect Performance Highlights		
B.1.	Aspek ekonomi Economic aspect	6
B.2.	Aspek lingkungan hidup Environmental aspects	7
B.3.	Aspek sosial Social aspect	7
C. Profil Organisasi Organization profile		
C.1.	Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Vision, mission and sustainability values	26
C.2.	Alamat Organisasi Organization's address	25
C.3.	Skala usaha Business scale	25
C.4.	Produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan Products, services, and business activities carried out	25
C.5.	Keanggotaan pada asosiasi Association membership	146
C.6.	Perubahan Perusahaan yang bersifat signifikan Significant Company changes	146
D. Sambutan Pimpinan Chairman's remarks		
D.1.	Sambutan Pimpinan BPKH BPKH Chairman's remarks	8-16

No	Nama indeks Index name	Halaman Page
E. Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
E.1.	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Responsible for Implementing Sustainable Finance	115
E.2.	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	119
E.3.	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment of the Implementation of Sustainable Finance	131
E.4.	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Relations with Stakeholders	135
E.5.	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Problems Against the Implementation of Sustainable Finance	137
F. Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
F.1.	Kegiatan membangun budaya keberlanjutan Activities to build a culture of sustainability	45-47
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2.	Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam tiga tahun terakhir Overview of economic performance over the past three years	30
Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance		
F.6.	Jumlah dan intensitas energi yang digunakan The amount and intensity of energy used	91
F.7.	Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan Energy efficiency efforts and achievements include the use of renewable energy sources	91
F.8.	Penggunaan Air Water usage	89
F.11.	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan Berdasarkan jenisnya Number and intensity of emissions produced by type	91

DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51/POJK.03/2017 –

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SEOJK) NOMOR 16/SEOJK.04/2021

List of Disclosures According to Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 –
Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 16/SEOJK.04/2021

No	Nama indeks Index name	Halaman Page
F.12.	Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan Efforts and achievement of emission reductions made	91
F.13.	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis Amount of waste and effluent generated by type	-
Kinerja Sosial Social Performance		
F.18.	Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja Statement of equal employment opportunity	99
F.20.	Upah minimum regional Regional minimum wage	101
F.21.	Lingkungan bekerja yang layak dan aman Decent and safe work environment	108-109
F.22.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai Training and capacity building of employees	102
F.23.	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations on Surrounding Communities	82
F.24.	Pengaduan Masyarakat Community Complaints	129-131
F.25.	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental Social Responsibility Activities (CSR)	51-81, 92-95
F.27.	Produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan Products and services that have been evaluated for safety for customers	84-85
F.28.	Dampak Produk dan/ Jasa Impact of Products and/ Services	48-50
G. Lain-lain Others		
G.1.	Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada) Written verification from an independent party (if any)	
G.2.	Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	157-158
G.3.	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Responses to Feedback on the Previous Year's Sustainability Report	141
G.4.	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik List of Disclosures According to Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 about the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies	154-156

LEMBAR UMPAN BALIK [SEOJK G.2]

FEEDBACK FORM

Laporan Kemaslahatan ini memuat informasi mengenai kegiatan Program Kemaslahatan yang dijalankan dari 01 Januari – 31 Desember 2023.

This Kemaslahatan Report covers information on the Benefit Program activities from January 01 - December 31, 2023.

Kami mengucapkan terima kasih saudara telah membaca Laporan Kemaslahatan ini dan kami berharap bisa mendapatkan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan. Respon saudara sangat berarti bagi kami, oleh karena itu izinkan kami menanyakan beberapa hal terkait laporan ini.

We thank you for reading this Kemaslahatan Report and we hope to get feedback in order to improve the report's quality. Your response means a lot to us, so please allow us to ask you some questions about this report.

Profil Pemangku Kepentingan Stakeholder Profiles

- | | |
|--|--|
| () Presiden RI
President of the Republic of Indonesia | () Mitra Kemaslahatan (Lembaga Non-Profit)
Benefit Partners (Non-Profit Institution) |
| () Badan Pelaksana BPKH
Executive Board of BPKH | () Penerima Manfaat
Beneficiaries |
| () Dewan Pengawas BPKH
Supervisory Board of BPKH | () Masyarakat umum
Public |
| () Kementerian Agama
Ministry of Religion | () Pegawai
Employee |
| () Kementerian Keuangan
Ministry of Finance | () Lainnya
Others..... |
| () Komisi VIII DPR
Representatives of the
Republic of Indonesia | |

Nama :
Name :
Institusi/Perusahaan :
Institution/Company :
Email :
Email :
Telp/HP :
Phone/HP :

LEMBAR UMPAN BALIK

Lembar Umpan Balik

No.	Pertanyaan Questions	Ya Yes	Tidak No
1.	Laporan ini mudah dimengerti This report is easy to understand	()	()
2.	Laporan ini memberikan informasi secara menyeluruh dan transparan This report provides comprehensive and transparent information	()	()
3.	Laporan ini menarik dan dirancang dengan baik The report is interesting and well designed	()	()
4.	Topik apakah yang paling bermanfaat menurut anda? What topics did you find most useful?		
5.	Materi apa yang dirasa perlu ditingkatkan? What material do you feel needs improvement?		
6.	Selain yang telah disajikan, informasi apakah yang ingin anda peroleh melalui laporan ini? Other than what has been presented, what information would you like to gain from this report?		
7.	Kontribusi apa yang dirasa perlu ditingkatkan BPKH? What contributions do you feel BPKH needs to improve?		
8.	Saran dan masukan lain: Other suggestions and inputs:		

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI BAPAK/IBU.

MOHON AGAR LEMBAR UMPAN BALIK INI DIKIRIMKAN KEMBALI KE ALAMAT:

Thank you for your participation. Please send back this feedback form to the address:



Divisi Kemaslahatan

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Benefit Program Division

Hajj Fund Management Agency (BPKH)

Muamalat Tower Lt.15, Jl. Prof. Dr. Satrio No.Kav. 18, Jakarta Selatan 12940

Muamalat Tower 15th floor, Jl. Prof. Dr. Satrio No.Kav. 18, South Jakarta 12940

[2-3]

 (021) 83793001

 082190906002

 kemaslahatan@bpkh.go.id

 www.bpkh.go.id



Laporan Kesesuaian dengan Standar GRI Statement of GRI Standards in Accordance Check

National Center for Corporate Reporting (NCCR) telah melakukan pengecekan kesesuaian dengan Standar GRI 2021 atas Laporan Keberlanjutan Badan Pengelola Keuangan Haji 2023 ("Laporan"). Pengecekan dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana Standar GRI 2021 telah diterapkan dalam Laporan tersebut. Pengecekan ini bukan merupakan opini atas kinerja keberlanjutan maupun kualitas informasi yang dimuat dalam Laporan tersebut.

Kami menyimpulkan bahwa Laporan ini telah disusun berdasarkan Standar GRI 2021.

Jakarta, 18 September 2024

The National Center for Corporate Reporting has conducted a GRI Standards 2021 in Accordance Check on Badan Pengelola Keuangan Haji 2023 ("Report"). The check communicates the extent to which the GRI Standards 2021 has been applied in the Report. The check does not provide an opinion on the sustainability performance of the reporter or the quality of the information provided in the Report.

We conclude that this report has been prepared in accordance with GRI Standards 2021.

Jakarta, September 18, 2024

National Center for Corporate Reporting
GRI Standards Aligning Service

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrew K. Twohig'.

**Andrew K. Twohig, BCom, BA (Hons), MA, CSRA
Director**

Independent Assurance Statement

No. 2157/KSP-IX/2024

To the management and stakeholders of Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),

We were engaged by Badan Pengelola Keuangan Haji ('BPKH') to provide assurance regarding its Sustainability Report 2023 ('the Report'). The assurance engagement was conducted by our assurance team, which possesses extensive relevant professional and technical competencies and experience. The team comprised certified sustainability reporting specialists and certified sustainability reporting assurers to ensure a high level of competency in executing the engagement.

Independence

We carried out all assurance undertakings with independence and autonomy, having not been involved in the preparation of any key part of the Report, nor did we provide any services to BPKH during 2023 that could conflict with the independence of the assurance engagement.

Assurance Standards, Levels, and Criteria

Our work was carried out in accordance with AA1000 Assurance Standards v3 (AA1000AS v3) issued by AccountAbility and International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised), 'Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information,' issued by the International Auditing and Assurance Standards Board.

By designing our evidence-gathering procedures to obtain a moderate level of assurance as set out in AA1000AS v3, readers of the report can be confident that all risks or errors have been reduced to a very low level, although not necessarily to zero. Moreover, BPKH's adherence to the AccountAbility Principles (AP) was evaluated in accordance with the criteria of AA1000AP (2018) on Inclusivity, Materiality, Responsiveness, and Impact. In addition, the Report, within the agreed scope, has been assessed according to the GRI Standards criteria.

Limitations

Our scope of work was limited to a review of the accuracy and reliability of specified data and interviews with data providers, persons in charge of data collection and processing, as well as persons in charge of sustainability performance-related information.

Responsibility

BPKH is responsible for the preparation of the report and all information and claims therein, which include establishing sustainability management targets, performance management, data collection, and other performance actions.

In performing this engagement, meanwhile, our responsibility to the management of BPKH is solely for the purpose of verifying the statements it has made in relation to its sustainability performance, specifically as described in the agreed scope, and expressing our opinion on the conclusions reached.

Methodology

In order to assess the veracity of certain assertions and specified data sets included within the Report, as well as the systems and processes used to manage and report them, the following methods were employed during the engagement process:

Reviews were conducted on the Report, internal policies, documentation, management and information systems, and included interviews with relevant staff in sustainability-related management and reporting. This also involved following data trails to the initial aggregated source and checking data samples in greater depth.

Scope of Assurance

We provided a Type 2 assurance engagement under AA1000AS v3. This involved:

- 1) Assessment of BPKH's adherence to the AA1000AP (2018); and
- 2) Assessment of the accuracy and quality of the specified sustainability performance information contained within the Report, in relation to the agreed scope of GRI Standards:
 - 203. Indirect Economic Impacts
 - 205. Anti-corruption
 - 404. Training and Education
 - 413. Local Communities

Conclusions

Conclusions in regard to adherence to the AA1000AP (2018) of Inclusivity, Materiality, Responsiveness, and Impact include the following findings:

Inclusivity

BPKH has demonstrated a commitment to expanding the welfare of the people, particularly in remote areas. However, to enhance its commitment to the principle of inclusivity, BPKH is recommended to improve its good organizational governance strategy and review and update existing policies to ensure they promote inclusivity and address any potential biases or discrimination within the organization. We also encourage BPKH to ensure that the benefits can be felt by communities throughout Indonesia.

Materiality

We found that BPKH has demonstrated its commitment to materiality by engaging with its stakeholders and using their feedback to identify the sustainability issues relevant to its operations.

However, we recommend that BPKH continue to strengthen its adherence to materiality principles by conducting assessments to establish the sustainability aspects that can provide guidance and decision-making support.

Responsiveness

We found that BPKH has demonstrated a strong commitment to engaging with stakeholders and addressing their concerns in various aspects. Through proactive stakeholder and local community engagement, BPKH has been able to build strong relationships with its stakeholders and create a culture of trust and collaboration.

Impact

BPKH has demonstrated a strong commitment to understanding, monitoring, and engaging with the local community. BPKH focuses on measuring and reporting social performance metrics to minimize or eliminate negative impacts while maximizing positive relationships with the community and other stakeholders.

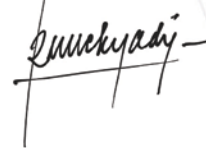
Conclusion on the accuracy and quality of the specified sustainability performance.

Based on our limited assurance engagement, nothing has come to our attention that causes us to believe the data of the Report, in relation to the agreed scope, has been materially misstated.

All key assurance findings are included herein, while detailed observations and follow-up recommendations have been submitted to BPKH management in a separate report.

Jakarta, September 25, 2024

PT Sucofindo
SBU KSP Head



AA1000
Licensed Report
000-432/V3-L1RSL

Rikrik Supriadi

Certified Sustainability Practitioner No. 10231411

Certified Assurance Practitioner No. 10023116

Certified Sustainability Reporting Specialist No. S-27-1306322

Certified Sustainability Reporting Assurer No. A-06-1407059

Sucofindo is an independent and state-owned company based in Indonesia that offers a wide range of inspection, testing of industrial products, marine survey, quality assurance and quality control, certification of management system such as ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001, as well as certification of various product standards. Sucofindo is member of IDSURVEY Holding Company.

Sucofindo is known for its high level of professionalism and competence, and its services are recognized not just in Indonesia, but also internationally. Sucofindo has a variety of technologies and equipment that helps them provide expertise and support their client's business objectives. Over the years, Sucofindo has gained a reputation for its reliability, integrity, and consistency with delivering quality services.



BIDANG KEMASLAHATAN



Muamalat Tower Lt. 14-19, Jalan Prof. Dr. Satrio
Kav. 18, Jakarta Selatan 12940, Indonesia



(021) 83793001



0821-9090-6002



kemaslahatan@bpkh.go.id



www.bpkh.go.id